



Katalog: 9199017

Edisi 71
April 2016

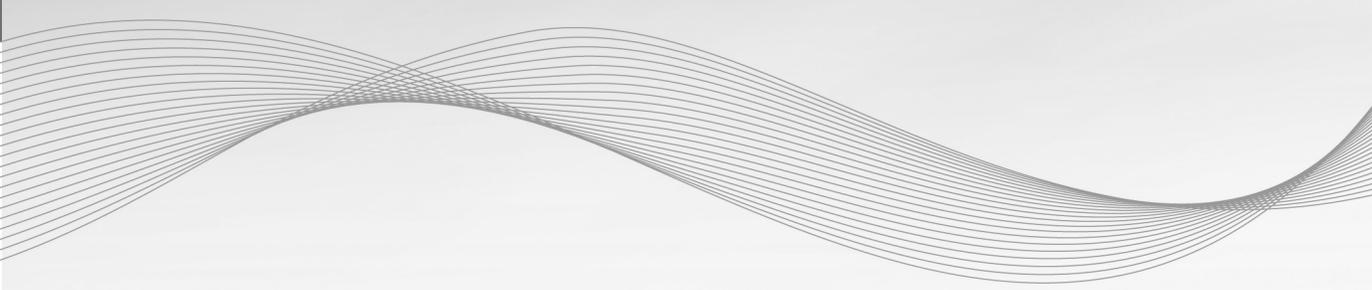
Laporan Bulanan **Data Sosial Ekonomi**



BADAN PUSAT STATISTIK

Edisi 71
April 2016

Laporan Bulanan
Data Sosial Ekonomi



Laporan Bulanan

Data Sosial Ekonomi

April 2016

ISSN: 2087-930X

Katalog BPS: 9199017

No. Publikasi: 03220.1605

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xxiv + 185 halaman

Naskah:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Direktorat Statistik Distribusi

Direktorat Neraca Produksi

Direktorat Statistik Harga

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata

Direktorat Neraca Pengeluaran

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Direktorat Statistik Industri

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penyunting:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Dicetak dan Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

HEADLINES

1. Inflasi

Pada Maret 2016 terjadi inflasi sebesar 0,19 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2016 sebesar 0,62 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2016 terhadap Maret 2015) sebesar 4,45 persen.

2. Pertumbuhan PDB

- Ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79 persen, melambat dibanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen.
- PDB triwulan IV-2015 tumbuh sebesar 5,04 persen dibanding PDB Triwulan IV-2014 (*y-on-y*).
- PDB triwulan IV-2015 mengalami kontraksi sebesar 1,83 persen dibanding PDB Triwulan III-2015 (*q-to-q*).

3. Ekspor

- Nilai ekspor Februari 2016 sebesar US\$11,30 miliar, naik 7,80 persen jika dibanding ekspor Januari 2016 dan turun 7,18 persen dibanding ekspor Februari 2015.
- Nilai ekspor nonmigas Februari 2016 mencapai US\$10,19 miliar yang terdiri dari produk hasil pertanian US\$0,22 miliar, hasil industri pengolahan US\$8,69 miliar, serta hasil tambang dan lainnya US\$1,28 miliar.

4. Impor

- Nilai impor Februari 2016 sebesar US\$10,16 miliar, turun 2,91 persen dibanding impor Januari 2016 dan turun 11,71 persen jika dibanding impor Februari 2015.
- Nilai impor menurut golongan penggunaan barang Februari 2016 mencakup barang konsumsi sebesar US\$1,00 miliar, bahan baku/penolong US\$7,36 miliar, dan barang modal US\$1,80 miliar.

5. Kependudukan

- Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa penduduk Indonesia Juni 2014 berjumlah 252.164,8 ribu orang.
- Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2014 termasuk tipe *expansive*, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda.

6. Ketenagakerjaan

- Pada Agustus 2015, jumlah penganggur sebesar 7,56 juta orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,18 persen.
- Dalam setahun terakhir (Agustus 2014–Agustus 2015), jumlah penduduk bekerja bertambah 190 ribu orang.

7. Upah Buruh

- Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Februari 2016 naik masing-masing sebesar 0,41 persen dan 0,18 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya.
- Upah riil harian buruh tani Februari naik sebesar 0,33 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya, upah riil harian buruh bangunan Februari 2016 naik 0,27 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya.

8. Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Perdesaan dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

- NTP Maret 2016 turun 0,89 persen dibanding Februari 2016.
- Pada Maret 2016, terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,95 persen.
- NTUP Maret 2016 turun 0,33 persen dibanding Februari 2016.

9. Harga Pangan

- Rata-rata harga beras Maret 2016 sebesar Rp13.301,00 per kg, turun 0,56 persen dari bulan sebelumnya.
- Harga cabai rawit naik 31,52 persen; cabai merah naik 20,37 persen; minyak goreng naik 1,15 persen; daging ayam ras turun 9,18 persen; telur ayam ras turun 9,08 persen; dan ikan kembung turun 1,33 persen.

10. a. Indeks Harga Produsen

Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan) pada triwulan IV-2015 naik 0,29 persen terhadap triwulan III-2015 (*q-to-q*). Sedangkan terhadap triwulan IV-2014 (*y-on-y*) naik 1,82 persen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

- IHPB Umum Nonmigas Maret 2016 naik sebesar 2,02 persen dibanding bulan sebelumnya.
- Pada Februari 2016 IHPB Umum turun sebesar 0,69 persen dibanding bulan sebelumnya.

11. Indeks Tendensi Bisnis dan Konsumen

- Kondisi bisnis triwulan IV-2015 meningkat dibandingkan kondisi pada triwulan sebelumnya. Optimisme pelaku bisnis pada triwulan IV-2015 lebih rendah dibandingkan triwulan III-2015. Nilai ITB triwulan IV-2015 sebesar 105,22 sedangkan triwulan III-2015 sebesar 106,04.
- Kondisi bisnis triwulan I-2016 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme pelaku bisnis pada triwulan I-2016 diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan IV-2015. Perkiraan nilai ITB triwulan I-2016 sebesar 104,28 sedangkan triwulan IV-2015 sebesar 105,22.
- Kondisi ekonomi konsumen triwulan IV-2015 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan IV-2015 lebih rendah dibandingkan triwulan III-2015. Nilai ITK triwulan IV-2015 sebesar 102,77 sedangkan triwulan III-2015 sebesar 109,00.
- Kondisi ekonomi konsumen triwulan I-2016 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan I-2016 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan Triwulan IV-2015. Perkiraan nilai ITK triwulan I-2016 sebesar 105,38 sedangkan triwulan IV-2015 sebesar 102,77.

12. Produksi Tanaman Pangan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2015

- Produksi padi tahun 2015 sebanyak 75,36 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami peningkatan sebanyak 4,51 juta ton (6,37 persen) dibandingkan tahun 2014.
- Produksi jagung tahun 2015 sebanyak 19,61 juta ton pipilan kering, mengalami kenaikan sebanyak 0,60 juta ton (3,17 persen) dibandingkan tahun 2014.
- Produksi kedelai tahun 2015 sebanyak 963,10 ribu ton biji kering, meningkat sebanyak 8,10 ribu ton (0,85 persen) dibandingkan tahun 2014.

13. Industri

- Pertumbuhan produksi industri pengolahan/manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan IV-2015 naik 4,02 persen dibanding triwulan IV-2014 (*y-on-y*), dan mengalami kenaikan 1,69 persen dari triwulan III-2015 (*q-to-q*).
- Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan IV-2015 naik 5,79 persen dibanding triwulan IV-2014 (*y-on-y*), dan mengalami kenaikan 1,35 persen dari triwulan III-2015 (*q-to-q*).

14. Pariwisata

- Jumlah kunjungan penduduk mancanegara atau wisatawan mancanegara (wisman) dalam arti luas selama Januari–Februari 2016 mencapai 1,70 juta kunjungan atau naik 4,46 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2015.
- Jumlah kunjungan penduduk mancanegara atau wisman dalam arti luas pada Februari 2016 mencapai 888,3 ribu kunjungan.
- TPK Hotel Berbintang pada bulan Februari 2016 mencapai 52,15 persen atau naik 4,56 poin dibanding TPK Februari 2015, dan mengalami kenaikan 2,82 poin dibandingkan TPK Januari 2016.

15. Transportasi

- Jumlah penumpang angkutan udara domestik Februari 2016 turun 8,01 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang angkutan udara internasional Februari 2016 turun 7,80 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Februari 2016 turun 16,87 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang kereta api Februari 2016 turun 6,51 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

16. Kemiskinan September 2015

Jumlah penduduk miskin pada September 2015 sebanyak 28,51 juta orang (11,13 persen), menurun 0,08 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen).

17. Produksi Hortikultura

- Produksi cabai besar pada tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton.
- Produksi cabai rawit pada tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton.
- Produksi bawang merah pada tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton.

18. a. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2014

Biaya produksi per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai masing-masing adalah sebesar Rp12,7 juta; Rp7,8 juta; Rp9,1 juta; dan Rp9,1 juta. Sedangkan nilai produksinya masing-masing adalah sebesar Rp17,2 juta; Rp10,2 juta; Rp12,0 juta; dan Rp9,0 juta.

b. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah, dan Jeruk Tahun 2014

- Biaya produksi usaha tanaman cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 masing-masing mencapai Rp52,1 juta; Rp34,0 juta; dan Rp67,2 juta.
- Biaya produksi usaha tanaman jeruk per 100 pohon selama setahun yang dipanen sendiri dan yang ditebaskan tahun 2014 masing-masing mencapai Rp5,4 juta dan Rp5,7 juta.

c. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014

Rata-rata biaya produksi usaha setahun per hektar untuk komoditas kelapa sawit sebesar Rp9,7 juta (57,05 persen dari total nilai produksi); karet sebesar Rp9,2 juta (71,54 persen dari total nilai produksi); dan tebu Rp24,2 juta (77,98 persen dari total nilai produksi).

d. Struktur Ongkos Usaha Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Ras Petelur, dan Ayam Ras Pedaging Tahun 2014.

- Biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen).
- Biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen).
- Biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen).
- Biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen).

e. Struktur Ongkos Usaha Perikanan Tahun 2014

- Biaya produksi per hektar dalam satu siklus usaha budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta (48,36 persen terhadap nilai produksi); Rp4,2 juta (71,91 persen terhadap nilai produksi); dan Rp3,2 juta (44,16 persen terhadap nilai produksi).
- Biaya produksi per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor dan perahu motor tempel masing-masing sebesar Rp4,1 juta (66,54 persen terhadap nilai produksi) dan Rp436 ribu (53,71 persen terhadap nilai produksi).

f. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jati, Mahoni, Sengon Tahun 2014

Biaya produksi per 100 pohon untuk tanaman jati, mahoni, dan sengon masing-masing Rp0,9 juta; Rp1,2 juta; dan Rp0,8 juta atau masing-masing sebesar 10,20 persen; 19,30 persen; dan 20,71 persen terhadap nilai produksi.

g. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Tahun 2014

Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga. Sebesar 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan dan hanya 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah. Sebesar 37,35 persen rumah tangga di sekitar kawasan hutan melakukan pemungutan hasil hutan/menangkap satwa liar. Dari rumah tangga di sekitar kawasan hutan, sebesar 18,51 persen sumber pendapatannya berasal dari memungut hasil hutan/menangkap satwa liar.

19. Tipologi Wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014

- Berdasarkan hasil Podes 2014, pada bulan April 2014 tercatat 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa¹, 8.412 kelurahan dan 69 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota.
- Sebanyak 258 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain (desa/kelurahan terdepan), yaitu 62 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua.
- Terdapat 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) yang berada di 77 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005².
- Indeks Kesulitan Geografis (IKG) bervariasi antar desa dengan rentang antara 6,83 sampai 97,89.

¹ Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat.

² Menurut PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

20. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Februari 2016

- Rupiah terapresiasi 3,06 persen terhadap dolar Amerika.
- Rupiah terapresiasi 0,75 persen terhadap dolar Australia.
- Rupiah terdepresiasi 1,79 persen terhadap yen Jepang.
- Rupiah terapresiasi 1,71 persen terhadap euro.

21. Perdagangan Komoditas Strategis 2015

Alur distribusi perdagangan terpanjang cabai merah, bawang merah, dan jagung pipilan berada di Jawa Tengah, sedangkan beras dan daging ayam ras di DKI Jakarta. Alur distribusi perdagangan terpendek beras, cabai merah dan jagung pipilan berada di Sulawesi Utara, bawang merah di Maluku Utara; dan daging ayam ras di Kalimantan Barat.

22. Indeks Perilaku Anti Korupsi

- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2015 sebesar 3,59 pada skala 0 sampai 5. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan capaian sebesar 3,61.
- Indeks Persepsi meningkat dari tahun 2014 ke 2015, dari 3,71 menjadi 3,73. Sementara indeks pengalaman turun dari 3,49 pada tahun 2014 menjadi 3,39 pada tahun 2015.
- IPAK 2015 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (3,71) lebih tinggi dibanding di wilayah perdesaan (3,46).
- IPAK 2015 di kalangan laki-laki (3,63) sedikit lebih tinggi dibanding di kalangan perempuan (3,55).
- IPAK masyarakat dengan usia 40 sampai 59 tahun merupakan yang tertinggi dibandingkan IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun dan lebih dari 60 tahun. IPAK masyarakat usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,62, IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,59, sedangkan IPAK masyarakat usia 60 tahun ke atas sebesar 3,49.
- Pendidikan kemungkinan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi IPAK, atau semakin tinggi pendidikan semakin anti korupsi. IPAK 2015 untuk masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,49, SLTA sebesar 3,80 dan di atas SLTA sebesar 4,00.

KATA PENGANTAR

Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi ini diterbitkan setiap awal bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dan informasi yang dimuat tetap mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Indonesia.

Buku ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi April 2016 ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan inflasi (s.d. Maret 2016), perkembangan triwulanan pertumbuhan ekonomi (s.d. triwulan III-2015), ekspor-impor (s.d. Februari 2016), perkembangan tahunan penduduk (s.d. Juni 2014), ketenagakerjaan (s.d. Agustus 2015), upah buruh (s.d. Februari 2016), nilai tukar petani dan harga pangan (s.d. Maret 2016), harga produsen (s.d. triwulan IV-2015) dan harga perdagangan besar (s.d. Maret 2016), perkembangan triwulanan indeks tendensi bisnis dan konsumen (s.d. triwulan III-2015), produksi tanaman pangan (angka sementara tahun 2015), perkembangan triwulanan indeks produksi industri (s.d. triwulan IV-2015), pariwisata dan transportasi (s.d. Februari 2016), data kemiskinan (September 2015), struktur ongkos usaha pertanian dan survei kehutanan 2014, nilai tukar eceran rupiah Februari 2016, produksi cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah tahun 2014, perdagangan komoditas strategis 2015, serta indeks perilaku anti korupsi Indonesia (IPAK) 2015.

Lebih lanjut, keseluruhan data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan statistik resmi (*official statistics*) yang menjadi rujukan resmi bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Apabila masih diperlukan data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, dipersilahkan melihat publikasi BPS lainnya atau melalui *website* BPS: <http://www.bps.go.id>.

Jakarta, 5 April 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Suryamin, M.Sc.

DAFTAR ISI

<i>HEADLINES</i>	iii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xxi
FOKUS PERHATIAN	1
I. INFLASI MARET 2016	15
II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2015.....	20
III. EKSPOR FEBRUARI 2016	32
IV. IMPOR FEBRUARI 2016	37
V. KEPENDUDUKAN JUNI 2014	44
VI. KETENAGAKERJAAN AGUSTUS 2015	50
VII. UPAH BURUH FEBRUARI 2016.....	57
VIII. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN MARET 2016	59
IX. HARGA PANGAN MARET 2016	66
X. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN IV-2015 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR MARET 2016	73
XI. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULANAN IV-2015	82
XII. PRODUKSI TANAMAN PANGAN ANGKA SEMENTARA (ASEM) 2015	90
XIII. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN IV-2015	95
XIV. PARIWISATA FEBRUARI 2016	100
XV. TRANSPORTASI NASIONAL FEBRUARI 2015	104
XVI. KEMISKINAN SEPTEMBER 2015.....	107
XVII. PRODUKSI HORTIKULTURA 2014.....	113
XVIII. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERTANIAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN, 2014.....	118
XIX. TIPOLOGI WILAYAH HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2014	132
XX. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH FEBRUARI 2016	149

XXI. PERDAGANGAN KOMODITAS STRATEGIS 2015.....	154
XXII. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2015.....	157
XXIII. SUPLEMEN: METODOLOGI	166

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota Maret 2016 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100).....	17
Tabel 1.2	Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi Maret 2016 Menurut Komponen Perubahan Harga (2012=100)	17
Tabel 1.3	Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen).....	18
Tabel 1.4	Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen)	18
Tabel 1.5	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, Januari 2016–Februari 2016 (persen).....	19
Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)	21
Tabel 2.2	Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha	22
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (persen)	23
Tabel 2.4	Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran	24
Tabel 2.5	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)	25
Tabel 2.6	Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan IV-2015 (persen).....	26
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2015 (persen).....	28
Tabel 2.8	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2015 (triliun rupiah).....	29
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2015 (persen).....	30
Tabel 2.10	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2015 (triliun rupiah).....	30
Tabel 2.11	PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2010–2015.....	31
Tabel 3.1	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ($\Delta\%$).....	33
Tabel 3.2	Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$) Triwulanan 2014–2015	34
Tabel 3.3	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya (Δ)	34

Tabel 3.4	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ).....	35
Tabel 3.5	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2014–2016 (FOB: juta US\$)	35
Tabel 3.6	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang dan Pelabuhan Muat, Januari–Februari 2016.....	36
Tabel 4.1	Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya Januari–Februari 2015 dan 2016	39
Tabel 4.2	Perkembangan Impor Indonesia Februari 2015–Februari 2016	39
Tabel 4.3	Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit dan Perubahannya Januari–Februari 2015 dan 2016	40
Tabel 4.4	Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang Januari–Februari 2016	40
Tabel 4.5	Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang Januari–Februari 2015 dan 2016	41
Tabel 4.6	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2015–Februari 2016 (Nilai CIF: Juta US\$)	41
Tabel 4.7	Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Februari 2016 (juta US\$).....	42
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Indonesia, Januari 2015–Februari 2016 (miliar US\$).....	42
Tabel 4.9	Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Februari 2016.....	43
Tabel 5.1	Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014 (ribu orang)	44
Tabel 5.2	Demografi Penduduk Indonesia, 2014.....	49
Tabel 6.1	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2013–2015 (juta orang).....	50
Tabel 6.2	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2013–2015 (juta orang)	52
Tabel 6.3	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2013–2015 (juta orang)	53
Tabel 6.4	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (juta orang)	53

Tabel 6.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (persen).....	54
Tabel 6.6	Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi 2014–2015	56
Tabel 7.1	Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah) Februari 2014–Februari 2015.....	58
Tabel 8.1	Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100).....	61
Tabel 8.2	Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran Maret 2014–Maret 2016	64
Tabel 8.3	Tingkat Inflasi Perdesaan Maret 2016, Tahun Kalender dan <i>Year on Year</i> 2016 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)	65
Tabel 8.4	Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya, Maret 2016 (2012=100)	65
Tabel 9.1	Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, Maret 2015–Maret 2016.....	67
Tabel 9.2	Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, Maret 2015–Maret 2016.....	69
Tabel 9.3	Rata-Rata Harga Beras di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>), Maret 2015–Maret 2016	70
Tabel 9.4	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok Maret 2015–Maret 2016 (rupiah).....	71
Tabel 10.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor Triwulan IV-2015	74
Tabel 10.2	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor Triwulan IV-2015.....	77
Tabel 10.3	Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia Januari 2016–Maret 2016, (2010=100)	78
Tabel 10.4	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar Maret 2016 (2010=100)	79
Tabel 10.5	Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia Maret 2016 Menurut Jenis Bangunan (2010=100).....	80
Tabel 11.1	Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan IV-2015 Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha.....	83

Tabel 11.2	Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2016 Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk	84
Tabel 11.3	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2015 dan Triwulan IV-2015 Menurut Variabel Pembentuk	86
Tabel 11.4	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2016 Menurut Variabel Pembentuk	88
Tabel 11.5	Indeks Tendensi Konsumen Triwulan IV-2014–Triwulan IV-2015 dan Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan I-2016 Tingkat Nasional dan Provinsi	89
Tabel 12.1	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Wilayah, 2013–2015	90
Tabel 12.2	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut <i>Subround</i> , 2013–2015	91
Tabel 12.3	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Menurut Wilayah, 2013–2015	92
Tabel 12.4	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Menurut Wilayah, 2013–2015	93
Tabel 12.5	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Palawija Lainnya, 2013–2015	94
Tabel 13.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan 2013–2015 (persen) 2010=100	96
Tabel 13.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2013–2015 (persen) 2010=100	96
Tabel 13.3	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan IV-2015 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)	97
Tabel 13.4	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan Triwulan I-2013–Triwulan IV-2015 (persen)	99
Tabel 13.5	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan IV-2015 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)	99
Tabel 14.1	Jumlah Kunjungan Penduduk Mancanegara ke Indonesia, Februari 2016	100

Tabel 14.2	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Reguler dan Pintu Lainnya, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Februari 2015–Februari 2016.....	103
Tabel 15.1	Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi Februari 2015–Februari 2016	106
Tabel 16.1	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2015–September 2015.....	108
Tabel 16.2	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), September 2015.....	109
Tabel 16.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2015–September 2015.....	111
Tabel 16.4	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, September 2015.....	112
Tabel 17.1	Perkembangan Produksi Cabai Besar (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014.....	114
Tabel 17.2	Perkembangan Produksi Cabai Rawit (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014.....	115
Tabel 17.3	Perkembangan Produksi Bawang Merah (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014	117
Tabel 18.1	Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang (ribu rupiah), 2014.....	118
Tabel 18.2	Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha Tanaman Jagung dan Kedelai (ribu rupiah), 2014.....	119
Tabel 18.3	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah per Hektar per Musim Tanam, 2014	120
Tabel 18.4	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Rawit per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014	121
Tabel 18.5	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Bawang Merah per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014	121
Tabel 18.6	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jeruk per 100 Pohon yang Dipanen Sendiri dan Ditebaskan 2014	122
Tabel 18.7	Nilai Produksi Dan Biaya Per Hektar Usaha Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014	123

Tabel 18.8	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun Usaha Sapi Potong dan Sapi Perah 2014	124
Tabel 18.9	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Tahun Usaha Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging, 2014.....	126
Tabel 18.10	Nilai Produksi dan Biaya per Hektar per Siklus Usaha Budidaya Rumput Laut, Bandeng, dan Udang Windu, 2014.....	127
Tabel 18.11	Nilai Produksi dan Biaya per Trip Usaha Penangkapan Ikan di Laut Menggunakan Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel, 2014	128
Tabel 18.12	Nilai Produksi dan Ongkos Produksi per 100 Pohon Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014	129
Tabel 18.13	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah, 2004 dan 2014.....	130
Tabel 19.1	Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan Menurut Provinsi, 2014	137
Tabel 19.2	Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2014.....	138
Tabel 19.3	IKG Desa Menurut Provinsi, 2014	139
Tabel 21.1	Rata-rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Menurut Komoditi, 2015.....	156
Tabel 22.1	Nilai IPAK Tahun 2012–2015	158
Tabel 22.2	Indeks Menurut Dimensi, 2012–2015.....	158
Tabel 22.3	IPAK Menurut Wilayah, 2012–2015	159
Tabel 22.4	IPAK Menurut Jenis Kelamin, 2012–2015	159
Tabel 22.5	IPAK Menurut Umur, 2012–2015.....	160
Tabel 22.6	IPAK Menurut Pendidikan Tertinggi, 2012–2015	160
Tabel 22.7	Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Keluarga merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2015	161
Tabel 22.8	Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Komunitas merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2015	162
Tabel 22.9	Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Tingkat Publik merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2015.....	163

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan 82 Kota, 2014–2016.....	15
Grafik 1.2	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2015–2016	19
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2014 s.d Triwulan IV-2015 (persen).....	20
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV-2015 (persen).....	21
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Triwulan IV-2015 (persen).....	24
Grafik 2.4	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan IV-2015 (persen).....	25
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2013–2015 (persen).....	27
Grafik 3.1	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB) Februari 2014–Februari 2016	32
Grafik 4.1	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF) Februari 2015–Februari 2016.....	37
Grafik 4.2	Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF) Januari–Februari 2015 dan 2016	38
Grafik 5.1	Piramida Penduduk Indonesia, 2014	45
Grafik 5.2	Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2014	46
Grafik 5.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971-2014.....	47
Grafik 6.1	Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur 2013–2015 (juta orang).....	51
Grafik 7.1	Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan Februari 2014–Februari 2016.....	57
Grafik 8.1	Nilai Tukar Petani (NTP), Maret 2015–Maret 2016 (2012=100)	59
Grafik 8.2	Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) Maret 2015–Maret 2016 (2012=100)	60
Grafik 8.3	Inflasi Perdesaan, Maret 2014–Maret 2016	63
Grafik 9.1	Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas Maret 2015–Maret 2016.....	66

Grafik 9.2	Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas Maret 2015–Maret 2016.....	68
Grafik 9.3	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok Februari 2015–Maret 2016 (rupiah).....	72
Grafik 10.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor Triwulan IV-2012 s.d. Triwulan IV-2015.....	74
Grafik 10.2	Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia Maret 2013–Maret 2016	79
Grafik 10.3	Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan Oktober 2015–Maret 2016	81
Grafik 11.1	Indeks Tendensi Bisnis Triwulan IV-2010–Triwulan IV-2015 dan Perkiraan Triwulan I-2016.....	85
Grafik 11.2	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2015 Tingkat Nasional dan Provinsi.....	87
Grafik 11.3	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2016 Tingkat Nasional dan Provinsi.....	88
Grafik 12.1	Pola Panen Padi, 2013–2015.....	91
Grafik 13.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (<i>y-on-y</i>) Triwulan I-2014–Triwulan IV-2015.....	95
Grafik 13.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (<i>y-on-y</i>) Triwulan IV-2013–Triwulan IV-2015	98
Grafik 14.1	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Menurut Pintu Masuk Februari 2014– Februari 2016.....	101
Grafik 14.2	Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Rata-rata 27 Provinsi di Indonesia, Februari 2014– Februari 2016	102
Grafik 15.1	Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi Februari 2015–Februari 2016.....	104
Grafik 16.1	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret 2015- September 2015.....	107
Grafik 17.1	Perkembangan Produksi Cabai Besar Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014.....	113
Grafik 17.2	Perkembangan Produksi Cabai Rawit Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014.....	115

Grafik 17.3	Perkembangan Produksi Bawang Merah Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014.....	117
Grafik 18.1	Persentase Ongkos Produksi Terhadap Nilai Produksi per 100 Pohon Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014	129
Grafik 18.2	Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan, 2004 dan 2014.....	131
Grafik 18.3	Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Pemungutan Hasil Hutan/Penangkapan Satwa Liar, 2014	131
Grafik 19.1	Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes, 2008–2014.....	132
Grafik 19.2	Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2014.....	133
Grafik 19.3	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014.....	134
Grafik 19.4	Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014.....	134
Grafik 19.5	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama	135
Grafik 19.6	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik.....	135
Grafik 19.7	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih	136
Grafik 19.8	Persentase Desa Menurut Kelompok IKG, 2014	140
Grafik 20.1	Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Februari 2016 dibanding Januari 2015 M.V).....	153
Grafik 20.2	Kurs Tengah Rupiah terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Minggu Terakhir).....	153
Grafik 21.1	Pola Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia, 2015	154

FOKUS PERHATIAN

1. Pada Maret 2016 terjadi inflasi sebesar 0,19 persen

Pada Maret 2016 terjadi inflasi sebesar 0,19 persen. Dari 82 kota, tercatat 58 kota mengalami inflasi dan 24 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Bukittinggi sebesar 1,18 persen dengan IHK 123,05 dan terendah terjadi di Yogyakarta, Malang, Tangerang, dan Singkawang sebesar 0,02 persen dengan IHK masing-masing sebesar 121,00, 123,69, 131,06, dan 122,89. Inflasi Maret 2016 sebesar 0,19 persen lebih tinggi dibanding kondisi Maret 2015 yang mengalami inflasi sebesar 0,17 persen. Inflasi tahun kalender 2016 sebesar 0,62 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2016 terhadap Maret 2015) sebesar 4,45 persen.

2. Pada tahun 2015 perekonomian Indonesia tumbuh 4,79 persen

PDB Indonesia tahun 2015 tumbuh sebesar 4,79 persen, terjadi pada hampir semua lapangan usaha ekonomi kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang berkontraksi sebesar 5,08 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 10,06 persen. Secara triwulanan, PDB triwulan IV-2015 tumbuh 5,04 persen dibanding triwulan IV-2014 (*y-on-y*), dimana pertumbuhan tertinggi terjadi di Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,52 persen. Apabila dibandingkan dengan triwulan III-2015 (*q-to-q*), PDB triwulan IV-2015 mengalami kontraksi sebesar 1,83 persen yang utamanya disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 23,34 persen.

Dari sisi pengeluaran, PDB Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,38 persen. Pertumbuhan PDB triwulan IV-2015 dibandingkan triwulan IV-2014 (*y-on-y*) didukung oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi

Rumah Tangga. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 8,32 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,31 persen. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*), PDB triwulan IV 2015 mengalami perlambatan terutama disebabkan oleh penurunan pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta terjadinya peningkatan pada Komponen Impor Barang dan Jasa. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menurun sebesar 1,85 persen, sementara Komponen Impor Barang dan Jasa naik sebesar 5,70 persen.

3. Nilai ekspor Indonesia Februari 2016 mencapai US\$11,30 miliar, turun 7,18 persen (*year-on-year*)

Nilai ekspor Indonesia Februari 2016 mencapai US\$11,30 miliar, turun 7,18 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*), sedangkan dibanding ekspor Januari 2016 naik 7,80 persen. Nilai ekspor nonmigas Februari 2016 mencapai US\$10,19 miliar atau naik 8,67 persen dibanding ekspor nonmigas Januari 2016. Ekspor migas pada Februari 2016 mencapai US\$1,11 miliar atau naik 0,47 persen dibanding bulan sebelumnya. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Februari 2016 turun sebesar 7,69 persen dibanding ekspor nonmigas hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2015, dan ekspor nonmigas hasil tambang dan lainnya turun 21,12 persen, demikian juga ekspor nonmigas hasil pertanian turun 14,80 persen.

4. Nilai impor Indonesia Februari 2016 sebesar US\$10,16 miliar, turun sebesar 2,91 persen (*year-on-year*)

Nilai impor Indonesia Februari 2016 sebesar US\$10,16 miliar, atau turun sebesar 2,91 persen dibanding impor Januari 2016, dan turun 11,71 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor nonmigas Februari 2016 sebesar US\$9,05 miliar atau turun 2,13 persen dibanding Januari 2016. Sementara impor migas Februari 2016 tercatat sebesar US\$1,11 miliar, turun 8,79 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan nilai impor nonmigas terbesar Februari 2016 adalah golongan

kendaraan bermotor dan bagiannya sebesar US\$129,2 juta, atau naik 35,35 persen dibanding Januari 2016 (US\$365,5 juta). Negara asal barang impor nonmigas terbesar Jan–Feb 2016 ditempati oleh Tiongkok (US\$4,87 miliar) dengan pangsa 26,65 persen.

5. Jumlah penduduk Indonesia Juni 2014 sebanyak 252.164,8 ribu orang

Hasil proyeksi penduduk Indonesia keadaan Juni 2014 menunjukkan penduduk Indonesia berjumlah 252.164,8 ribu orang terdiri dari 126.715,2 ribu orang laki-laki dan 125.449,6 ribu orang perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2010-2014 sekitar 1,40 persen per tahun.

6. Pada Agustus 2015, penduduk yang bekerja pada Sektor Konstruksi meningkat 12,77 persen dibandingkan Februari 2014

Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014, penduduk bekerja meningkat terutama pada Sektor Konstruksi sebanyak 930 ribu orang (12,77 persen), Sektor Perdagangan sebanyak 850 ribu orang (3,42 persen), dan Sektor Keuangan sebanyak 240 ribu orang (7,92 persen). Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian sebanyak 1,2 juta orang (3,13 persen), Sektor Jasa Kemasyarakatan/Perorangan sebanyak 480 ribu orang (2,61 persen), dan Sektor Lainnya sebanyak 120 ribu orang (6,94 persen).

7. Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Februari 2016 masing-masing sebesar Rp47.437,00 dan Rp81.367,00.

Rata-rata upah nominal buruh tani pada Februari 2016 sebesar Rp47.437,00, naik 0,41 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, dan upah riil naik sebesar 0,33 persen. Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Februari 2016 tercatat Rp81.367,00, naik 0,18 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, sedangkan upah riil naik sebesar 0,27 persen.

- 8. Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2016 tercatat 101,32, turun 0,89 persen dibanding Februari 2016, inflasi perdesaan sebesar 0,95 persen dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) turun sebesar 0,33 persen dibanding Februari 2016.**

NTP Maret 2016 tercatat 101,32 atau turun sebesar 0,89 persen dibanding NTP Februari 2016 sebesar 102,23. Penurunan NTP bulan ini disebabkan turunnya NTP di empat subsektor yaitu Tanaman Pangan sebesar 2,54 persen, Tanaman Perkebunan Rakyat 0,08 persen, Peternakan 0,55 persen dan Perikanan 0,70 persen, sebaliknya Subsektor Tanaman Hortikultura naik sebesar 0,58 persen.

Pada Maret 2016 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,95 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 127,72. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di semua provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,82 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Aceh dan Sulawesi Barat sebesar 0,05 persen.

Pada Maret 2016 terjadi penurunan NTUP sebesar 0,33 persen. Hal ini karena terjadi It turun (0,22 persen), sebaliknya indeks BPPBM naik (0,12 persen). Penurunan NTUP disebabkan oleh turunnya tiga subsektor penyusun NTUP yaitu Tanaman Pangan (1,92 persen), Peternakan (0,01 persen) dan Perikanan (0,22 persen). Sebaliknya, NTUP Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat naik masing-masing sebesar 1,11 persen dan 0,45 persen.

- 9. Rata-rata harga beras pada Maret 2016 sebesar Rp13.301,00 per kg, turun 0,56 persen**

Rata-rata harga beras pada Maret 2016 sebesar Rp13.301,00 per kg, turun 0,56 persen dari bulan sebelumnya. Dibandingkan Maret 2015, harga beras naik 1,62 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 4,45 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah cabai rawit 31,52 persen; cabai merah 20,37 persen; minyak goreng 1,15 persen; sedangkan yang mengalami penurunan harga adalah komoditas daging ayam ras 9,18 persen; telur ayam ras 9,08 persen; dan ikan kembung 1,33 persen.

10. a. Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan) pada triwulan IV-2015 naik 0,29 persen terhadap triwulan III-2015 (*q-to-q*), sedangkan terhadap triwulan IV-2014 (*y-on-y*) naik 1,82 persen

Indeks Harga Produsen (IHP) gabungan (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) mengalami kenaikan sebesar 0,29 persen pada triwulan IV-2015 (*q-to-q*). Kenaikan terjadi pada IHP Sektor Pertanian (2,06 persen) dan IHP Sektor Industri Pengolahan (0,47 persen), sedangkan IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar 5,10 persen.

Dibandingkan terhadap triwulan IV-2014 (*y-on-y*), IHP naik 1,82 persen. IHP Sektor Pertanian dan IHP Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4,45 persen dan 4,07 persen. Sedangkan Sektor Pertambangan dan Penggalian turun sebesar 17,75 persen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nonmigas Maret 2016 naik sebesar 2,02 persen dari bulan sebelumnya

IHPB Umum Nonmigas Maret 2016 naik sebesar 2,02 persen dari bulan sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada Sektor Pertanian, yaitu 11,16 persen dan terendah terjadi pada Sektor Pertambangan dan Penggalian, yaitu 0,33 persen. Sektor Industri naik 0,68 persen sedangkan Kelompok Barang Impor Nonmigas dan Kelompok Barang Ekspor Nonmigas turun masing-masing 0,29 persen dan 1,61 persen. Dibandingkan bulan sebelumnya, IHPB Umum Februari 2016 turun 0,69 persen. Penurunan IHPB terbesar terjadi pada Kelompok Barang Impor sebesar 2,49 persen. IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi Maret 2016 turun 0,02 persen. Penurunan terbesar terjadi pada Kelompok Bangunan Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan sebesar 0,11 persen.

11. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan IV-2015 sebesar 105,22 dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2015 sebesar 102,77

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan IV-2015 sebesar 105,22 berarti kondisi bisnis meningkat dari triwulan sebelumnya. Hal ini karena adanya peningkatan pendapatan usaha (nilai indeks sebesar 107,49), penggunaan kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 103,95), dan rata-rata jumlah jam kerja (nilai indeks sebesar 103,86). Pada triwulan I-2016 kondisi bisnis diprediksi meningkat dari triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 104,28).

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) nasional pada triwulan IV-2015 sebesar 102,77 artinya kondisi ekonomi konsumen meningkat dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga, relatif rendahnya pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi, dan tingkat konsumsi yang meningkat. Meningkatnya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional terjadi karena adanya peningkatan kondisi ekonomi konsumen di 28 provinsi Indonesia (84,85 persen).

Pada triwulan I-2016 kondisi ekonomi konsumen diprediksi akan meningkat (ITK sebesar 105,38). Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan mendatang terjadi di 28 provinsi (84,85 persen).

12. Produksi padi tahun 2015 (ASEM 2015) sebanyak 75,36 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 6,37 persen dibanding tahun 2014

Produksi padi tahun 2015 sebanyak 75,36 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami peningkatan sebanyak 4,51 juta ton (6,37 persen) dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi terjadi karena peningkatan luas panen seluas 0,32 juta hektar (2,31 persen) dan produktivitas sebesar 2,04 kuintal/hektar (3,97 persen). Dibandingkan tahun 2014, produksi jagung tahun 2015 naik sebanyak 0,60 juta ton (3,17 persen) yang disebabkan oleh kenaikan produktivitas sebesar 2,25 kuintal/hektar (4,54 persen). Meskipun, terjadi penurunan luas panen seluas 50,20 ribu hektar (1,31 persen). Produksi kedelai tahun 2015 meningkat sebanyak 8,10 ribu ton (0,85 persen) dibandingkan tahun 2014 yang disebabkan adanya peningkatan produktivitas sebesar 0,18

kuintal/hektar (1,16 persen). Meskipun, terjadi penurunan luas panen seluas 1,80 ribu hektar (0,29 persen).

13. Pertumbuhan produksi IBS naik 4,02 persen dan IMK naik 5,79 persen pada triwulan IV-2015 (*year-on-year*)

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan IV-2015 naik 4,02 persen dibanding triwulan IV-2014 (*year-on-year*) dan mengalami kenaikan 1,69 persen dari triwulan III-2015 (*q-to-q*). Pertumbuhan bulanan produksi IBS pada Desember 2015 turun 1,89 persen dari November 2015 (*m-to-m*), November 2015 turun 1,87 persen dari Oktober 2015, dan Oktober 2015 naik 0,60 persen dari September 2014. Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan IV-2015 naik 5,79 persen disbanding triwulan IV-2014 (*y-on-y*), dan mengalami kenaikan 1,35 persen dari triwulan III-2015 (*q-to-q*).

14. Jumlah kunjungan penduduk mancanegara atau wisman dalam arti luas selama Februari 2016 mencapai 888,3 ribu kunjungan

Kunjungan wisman dalam arti luas ke Indonesia selama Februari 2016 sebanyak 888,3 ribu kunjungan, yang terdiri atas 780,9 ribu kunjungan wisman melalui 19 pintu utama; 82,2 ribu kunjungan selain dari 19 pintu utama; dan 25,13 ribu kunjungan WNA dengan maksud kunjungan bekerja Indonesia kurang dari setahun.

Sementara itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi pada Februari 2016 mencapai 52,15 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 2,82 poin dibandingkan TPK Februari 2015.

15. Jumlah penumpang angkutan udara domestik Februari 2016 mencapai 5,8 juta orang, naik 22,79 persen (*year-on-year*)

Pada Februari 2016, jumlah penumpang angkutan udara domestik mencapai 5,8 juta orang atau naik 22,79 persen (*year-on-year*), angkutan udara internasional naik 9,78 persen, penumpang pelayaran dalam negeri naik 37,90 persen, dan penumpang kereta api naik 16,33 persen. Dibandingkan dengan

bulan sebelumnya, angkutan udara domestik turun 8,01 persen, angkutan udara internasional turun 7,80 persen, penumpang pelayaran dalam negeri turun 16,87 persen, dan penumpang kereta api turun 6,51 persen.

16. Jumlah penduduk miskin pada September 2015 sebanyak 28,51 juta orang (11,13 persen), menurun 0,08 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen)

Selama periode Maret 2015–September 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 0,03 juta orang (dari 10,65 juta orang pada Maret 2015 menjadi 10,62 juta orang pada September 2015). Hal yang sama juga terjadi di daerah perdesaan, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,05 juta orang (dari 17,94 juta orang pada Maret 2015 menjadi 17,89 juta orang pada September 2015).

17. Produksi cabai besar sebesar 1,075 juta ton, cabai rawit sebesar 0,800 juta ton dan bawang merah sebesar 1,234 juta ton

Produksi cabai besar segar dengan tangkai tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, terjadi kenaikan produksi sebesar 61,73 ribu ton (6,09 persen). Produksi cabai rawit segar dengan tangkai tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, terjadi kenaikan produksi sebesar 86,98 ribu ton (12,19 persen). Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, produksi meningkat sebesar 223,22 ribu ton (22,08 persen).

18. a. Biaya produksi per musim tanam per hektar padi sawah sebesar 12,7 juta dengan komponen terbesar upah pekerja dan jasa pertanian sebesar 48,23 persen

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai masing-masing adalah sebesar Rp12,7 juta; Rp7,8 juta; Rp9,1 juta; dan Rp9,1 juta. Komponen terbesar dari total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai adalah untuk upah pekerja dan jasa pertanian yang masing-masing adalah sebesar 48,23 persen (Rp6,1 juta); 62,36 persen

(Rp4,9 juta); 44,93 persen (Rp4,1 juta); dan 44,82 persen (Rp4,1 juta) dari total biaya.

b. Biaya produksi usaha tanaman cabai merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp52,1 juta

Total biaya produksi usaha per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri untuk tanaman cabai merah Rp52,1 juta; tanaman cabai rawit Rp34,0 juta; tanaman bawang merah Rp67,2 juta; tanaman jeruk Rp5,4 juta. Persentase biaya produksi terbesar adalah upah pekerja, yaitu untuk cabai merah sebesar 47,74 persen; cabai rawit sebesar 54,85 persen; dan tanaman jeruk sebesar 32,07 persen. Untuk bawang merah persentase biaya produksi terbesar adalah biaya untuk benih sebesar 38,58 persen.

c. Rata-rata biaya produksi kelapa sawit setahun per hektar mencapai Rp9,7 juta

Pengeluaran paling besar digunakan untuk tenaga kerja sebesar 31,71 persen. Sedangkan rata-rata biaya usaha perkebunan karet setahun per hektar mencapai Rp9,2 juta dengan pengeluaran paling besar digunakan untuk biaya tenaga kerja sebesar 57,09 persen. Pada komoditas tebu, rata-rata biaya produksi setahun per hektar mencapai Rp24,2 juta, sebagian besar digunakan untuk pengeluaran sewa lahan yang mencapai 32,37 persen dari total biaya produksi.

d. Biaya produksi sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun

Total biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen). Total biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen). Total biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen). Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per

5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen).

e. Biaya produksi per hektar budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta; Rp4,2 juta; dan Rp3,2 juta

Jumlah biaya per hektar budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta; Rp4,2 juta; dan Rp3,2 juta. Biaya terbesar untuk budidaya rumput laut adalah benih/bibit sebesar Rp3,0 juta (41,33 persen). Sedangkan biaya terbesar usaha bandeng dan udang windu adalah upah pekerja, yaitu sebesar Rp965 ribu (23,21 persen) dan Rp796 ribu (24,73 persen).

Jumlah biaya per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor sebesar Rp4,1 juta dan menggunakan perahu motor tempel sebesar Rp436 ribu. Biaya terbesar yang dikeluarkan adalah upah/gaji pekerja masing-masing sebesar Rp1,7 juta (40,94 persen) dan Rp177 ribu (40,47 persen).

f. Biaya produksi terbesar usaha tanaman jati selama setahun yang lalu adalah upah pekerja, yaitu sebesar 63,99 persen

Pengeluaran terbesar usaha tanaman jati selama setahun yang lalu adalah upah pekerja, yaitu sebesar 63,99 persen. Upah pekerja usaha untuk tanaman mahoni sebesar 63,00 persen dan tanaman sengon sebesar 59,00 persen.

g. Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga

Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga. Sebesar 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan dan hanya 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah. Sebesar 37,35 persen rumah tangga di sekitar kawasan hutan melakukan pemungutan hasil hutan/menangkap satwa liar. Dari rumah tangga di

sekitar kawasan hutan, sebesar 18,51 persen sumber pendapatannya berasal dari memungut hasil hutan/menangkap satwa liar.

19. Tipologi Wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014

Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Berdasarkan hasil Podes 2014, pada April 2014 tercatat 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa³, 8.412 kelurahan dan 69 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota.

Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaan infrastruktur:

- Terdapat 10.985 desa/kelurahan (13,37 persen) tidak ada SD (termasuk MI).
- Terdapat 275 kecamatan (3,89 persen) tidak ada SLTP.
- Terdapat 816 kecamatan (11,54 persen) tidak ada SLTA.
- Sebanyak 117 kecamatan (1,65 persen) tidak tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu).
- Sebanyak 1.495 kecamatan (21,13 persen) tidak ada pasar dengan bangunan.
- Sebanyak 12.659 desa/kelurahan (15,40 persen) tidak ada keluarga pengguna listrik PLN.
- Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19 persen) tidak ada penerangan di jalan utama desa.
- Sebanyak 12.636 desa/kelurahan (15,73 persen) dari 80.337 desa/kelurahan yang sarana transportasinya darat, ternyata kondisi jalannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.

³ Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat

Berdasarkan Podes 2014 teridentifikasi sebanyak 258 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain (desa/kelurahan terdepan), yaitu 62 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua.

Menurut Podes 2014, terdapat 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) yang berada di 77 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005⁴.

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit tertimbang dengan skala 0–100 yang dihitung untuk setiap desa. Semakin besar indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. IKG bervariasi antar desa dengan rentang antara 6,83 sampai 97,89.

20. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Februari 2016

a. Rupiah terapresiasi 3,06 persen terhadap dolar Amerika.

Rupiah terapresiasi 3,06 persen terhadap dolar Amerika pada Februari 2016. Level tertinggi rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Amerika terjadi pada minggu keempat Februari 2016 yaitu Rp13.431,32 per dolar Amerika.

b. Rupiah terapresiasi 0,75 persen terhadap dolar Australia.

Rupiah terapresiasi 0,75 persen terhadap dolar Australia pada Februari 2016. Level tertinggi rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Australia terjadi pada minggu kedua Februari 2016 yang mencapai Rp9.555,59 per dolar Australia.

⁴ Menurut PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional

c. Rupiah terdepresiasi 1,79 persen terhadap yen Jepang.

Rupiah terdepresiasi 1,79 persen terhadap yen Jepang pada Februari 2016. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap yen Jepang terjadi pada minggu keempat Februari 2016 yang mencapai Rp118,68 per yen Jepang.

d. Rupiah terapresiasi 1,71 persen terhadap euro.

Rupiah terapresiasi 1,71 persen terhadap euro pada Februari 2016. Level tertinggi rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap euro terjadi pada minggu keempat Februari 2016 yang mencapai Rp14.789,51 per euro.

21. Marjin perdagangan dan pengangkutan beras 10,42 persen, cabai merah 25,33 persen, bawang merah 22,61 persen, jagung pipilan 31,90 persen, dan daging ayam ras 11,63 persen

Dari Survei Poldis 2015 didapat informasi bahwa rata-rata rasio MPP beras adalah sebesar beras 10,42 persen, cabai merah 25,33 persen, bawang merah 22,61 persen, jagung pipilan 31,90 persen, dan daging ayam ras 11,63 persen. Distribusi perdagangan beras, cabai merah, bawang merah, jagung pipilan, dan daging ayam ras dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan dua hingga sembilan fungsi kelembagaan usaha perdagangan. Alur distribusi perdagangan terpanjang cabai merah, bawang merah, dan jagung pipilan berada di Jawa Tengah, sedangkan beras dan daging ayam ras di DKI Jakarta. Sedangkan alur distribusi perdagangan terpendek beras, cabai merah dan jagung pipilan berada di Sulawesi Utara, bawang merah di Maluku Utara; dan daging ayam ras di Kalimantan Barat.

22. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2015 sebesar 3,59

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2015 sebesar 3,59 pada skala 0 sampai 5. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan capaian 2014 sebesar 3,61. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

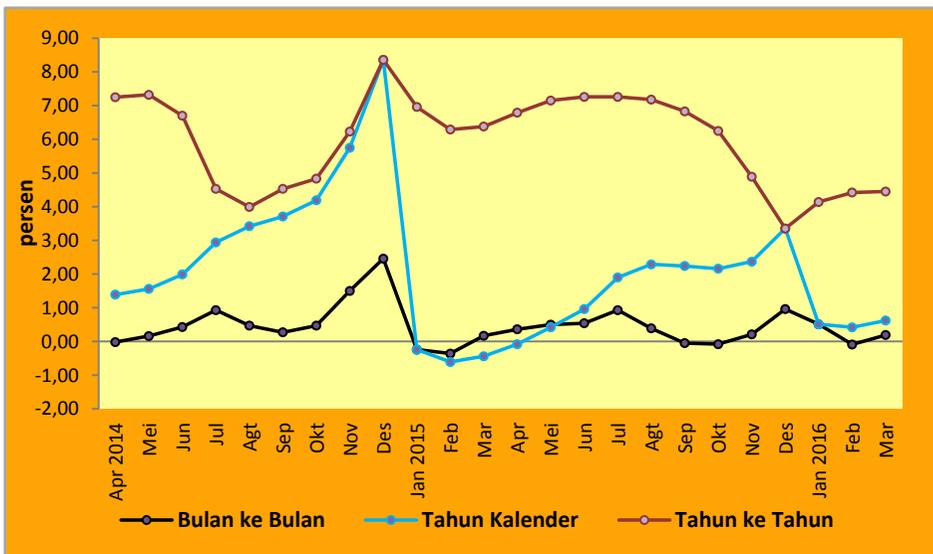
IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama yakni persepsi dan pengalaman. Indeks Persepsi cenderung meningkat dari kondisi 2013 ke 2015, sebaliknya pada Indeks Pengalaman cenderung menurun. Turunnya angka IPAK dipengaruhi menurunnya angka indeks pengalaman. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat semakin idealis 'membenci korupsi' namun hal ini tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

I. INFLASI MARET 2016

1. Pada Maret 2016 terjadi inflasi sebesar 0,19 persen. Dari 82 kota, tercatat 58 kota mengalami inflasi dan 24 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Bukittinggi sebesar 1,18 persen dengan IHK 123,05 dan terendah terjadi di Yogyakarta, Malang, Tangerang, dan Singkawang sebesar 0,02 persen dengan IHK masing-masing sebesar 121,00, 123,69, 131,06, dan 122,89. Inflasi Maret 2016 sebesar 0,19 persen lebih tinggi dibanding kondisi Maret 2015 yang mengalami inflasi sebesar 0,17 persen. Inflasi tahun kalender 2016 sebesar 0,62 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2016 terhadap Maret 2015) sebesar 4,45 persen.

Pada Maret 2016 terjadi inflasi sebesar 0,19 persen

Grafik 1.1
Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan 82 Kota, 2014–2016



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga, inflasi umum (*headline inflation*) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan 0,69 persen; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,36 persen; sandang 0,55 persen; kesehatan 0,30 persen; pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,03 persen; dan penurunan harga yang ditunjukkan oleh

penurunan indeks kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,07 persen; dan transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,22 persen.

3. Dari inflasi 0,19 persen, andil bawang merah 0,16 persen; andil cabai merah 0,13 persen; andil cabai rawit 0,05 persen; andil emas perhiasan 0,03 persen; andil bawang putih 0,02 persen; dan andil minyak goreng, mie, rokok kretek, rokok kretek filter, rokok putih, dan mobil masing-masing sebesar 0,01 persen.
4. Inflasi Maret 2016 sebesar 0,19 persen, angka tersebut lebih tinggi dibanding kondisi Maret 2015 yang mengalami inflasi 0,17 persen. Inflasi tahun kalender 2016 sebesar 0,62 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2016 terhadap Maret 2015) sebesar 4,45 persen.
5. Menurut karakteristik perubahan harga, inflasi Maret 2016 sebesar 0,19 persen dipengaruhi oleh kenaikan indeks pada komponen inti (*core*) 0,21 persen; dan komponen bergejolak (*volatile*) 0,75 persen; dan penurunan indeks pada komponen yang harganya diatur pemerintah (*administered prices*) 0,35 persen.
6. Inflasi Maret 2016 sebesar 0,19 persen berasal dari sumbangan inflasi komponen inti 0,12 persen, barang/jasa yang harganya diatur pemerintah memberikan sumbangan deflasi 0,07 persen, dan komponen bergejolak memberikan sumbangan inflasi 0,14 persen.
7. Inflasi komponen inti Maret 2016 sebesar 0,21 persen, tahun kalender 2016 sebesar 0,80 persen, dan tahun ke tahun (Maret 2016 terhadap Maret 2015) sebesar 3,50 persen.
8. Pada Februari 2016, Cina menjadi negara yang mengalami inflasi tertinggi dibandingkan beberapa negara lain, yaitu 1,60 persen.

Tabel 1.1
Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota Maret 2016
Menurut Kelompok Pengeluaran
(2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2015	IHK Desember 2015	IHK Maret 2016	Inflasi Maret 2016 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2016 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	118,48	122,99	123,75	0,19	0,62	4,45	0,19
1. Bahan Makanan	124,73	133,01	136,07	0,69	2,30	9,09	0,14
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	120,88	126,47	128,37	0,36	1,50	6,20	0,06
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	117,30	119,41	119,42	-0,07	0,01	1,81	-0,02
4. Sandang	107,86	110,14	111,75	0,55	1,46	3,61	0,04
5. Kesehatan	112,89	116,90	117,98	0,30	0,92	4,51	0,01
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	110,92	114,75	115,02	0,03	0,24	3,70	0,00
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	121,19	125,32	123,47	-0,22	-1,48	1,88	-0,04

¹⁾ Persentase perubahan IHK Februari 2016 terhadap IHK bulan sebelumnya.

²⁾ Persentase perubahan IHK Februari 2016 terhadap IHK Desember 2015.

³⁾ Persentase perubahan IHK Februari 2016 terhadap IHK Februari 2015

Tabel 1.2
Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi Maret 2016
Menurut Komponen Perubahan Harga
(2012=100)

Komponen	IHK Maret 2015	IHK Desember 2015	IHK Maret 2016	Inflasi Maret 2016 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2016 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	118,48	122,99	123,75	0,19	0,62	4,45	0,19
Inti	112,67	115,68	116,61	0,21	0,80	3,50	0,12
Harga Diatur Pemerintah	133,82	139,82	137,52	-0,35	-1,64	2,76	-0,07
Bergejolak	125,48	134,20	137,51	0,75	2,47	9,59	0,14

Tabel 1.3
Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen)

Bulan	Tingkat Inflasi Nasional (bulan ke bulan)						Tingkat Inflasi Nasional (kalender)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari	0,89	0,76	1,03	1,07	-0,24	0,51	0,89	0,76	1,03	1,07	-0,24	0,51
Februari	0,13	0,05	0,75	0,26	-0,36	-0,09	1,03	0,81	1,79	1,33	-0,61	0,42
Maret	-0,32	0,07	0,63	0,08	0,17	0,19	0,70	0,88	2,43	1,41	-0,44	0,62
April	-0,31	0,21	-0,10	-0,02	0,36		0,39	1,09	2,32	1,39	-0,08	
Mei	0,12	0,07	-0,03	0,16	0,50		0,51	1,15	2,30	1,56	0,42	
Juni	0,55	0,62	1,03	0,43	0,54		1,06	1,79	3,35	1,99	0,96	
Juli	0,67	0,70	3,29	0,93	0,93		1,74	2,50	6,75	2,94	1,90	
Agustus	0,93	0,95	1,12	0,47	0,39		2,69	3,48	7,94	3,42	2,29	
September	0,27	0,01	-0,35	0,27	-0,05		2,97	3,49	7,57	3,71	2,24	
Oktober	-0,12	0,16	0,09	0,47	-0,08		2,85	3,66	7,66	4,19	2,16	
November	0,34	0,07	0,12	1,50	0,21		3,20	3,73	7,79	5,75	2,37	
Desember	0,57	0,54	0,55	2,46	0,96		3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	

Tabel 1.4
Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen)

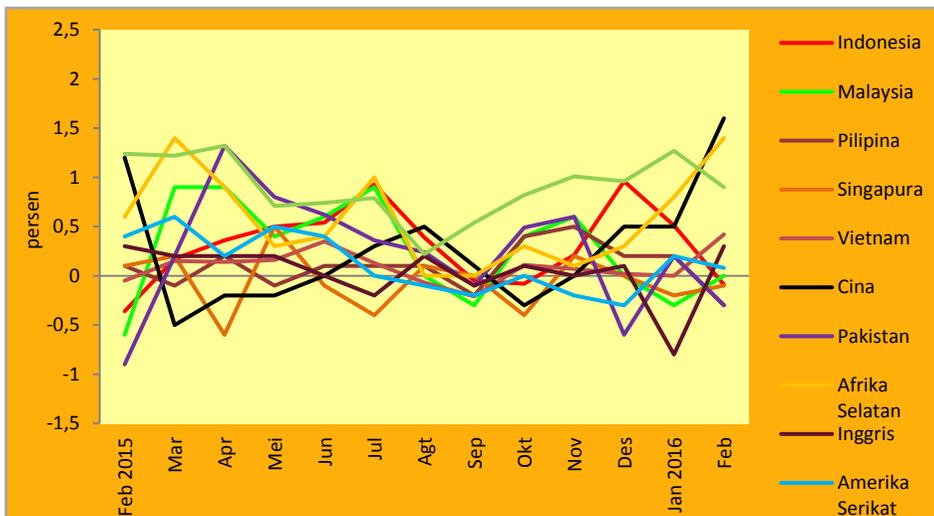
Bulan	2011:2010	2012:2011	2013:2012	2014:2013	2015:2014	2016:2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	7,02	3,65	4,57	8,22	6,96	4,14
Februari	6,84	3,56	5,31	7,75	6,29	4,42
Maret	6,65	3,97	5,90	7,32	6,38	4,45
April	6,16	4,50	5,57	7,25	6,79	
Mei	5,98	4,45	5,47	7,32	7,15	
Juni	5,54	4,53	5,90	6,70	7,26	
Juli	4,61	4,56	8,61	4,53	7,26	
Agustus	4,79	4,58	8,79	3,99	7,18	
September	4,61	4,31	8,40	4,53	6,83	
Oktober	4,42	4,61	8,32	4,83	6,25	
November	4,15	4,32	8,37	6,23	4,89	
Desember	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	

Tabel 1.5
Tingkat Inflasi Beberapa Negara, Januari 2016–Februari 2016 (persen)

Negara	Bulan ke Bulan		Tahun ke Tahun (<i>Y-on-Y</i>)	
	Januari 2016	Februari 2016	Januari 2016	Februari 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Indonesia	0,51	-0,09	4,14	4,42
2. Malaysia	-0,30	0,00	3,50	4,20
3. Pilipina	0,20	-0,30	1,30	0,90
4. Singapura	-0,20	-0,10	-0,60	-0,80
5. Vietnam	0,00	0,42	0,80	1,30
6. Cina	0,50	1,60	1,80	2,30
7. Pakistan	0,20	-0,30	3,30	4,00
8. Afrika Selatan	0,80	1,40	6,20	7,00
9. Inggris	-0,80	0,30	0,30	0,30
10. Amerika Serikat	0,20	0,08	1,40	1,02
11. Brazil	1,27	0,90	10,71	10,36

Sumber: <http://www.stats.gov.cn>, <http://www.statistics.gov.my>, <http://www.statpak.gov.pk>,
<http://www.census.gov.ph>, <http://www.singstat.gov.sg>, <http://www.gso.gov.vn>,
<http://www.bls.gov>, <http://www.ibge.gov.br>, <http://www.statistics.gov.uk>,
<http://www.statssa.gov.za>, dan www.bloomberg.com

Grafik 1.2
Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2015–2016



II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2015

1. PDB Indonesia triwulan IV-2015 dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2014 (*y-on-y*) tumbuh 5,04 persen tertinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya pada tahun 2015. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,52 persen.

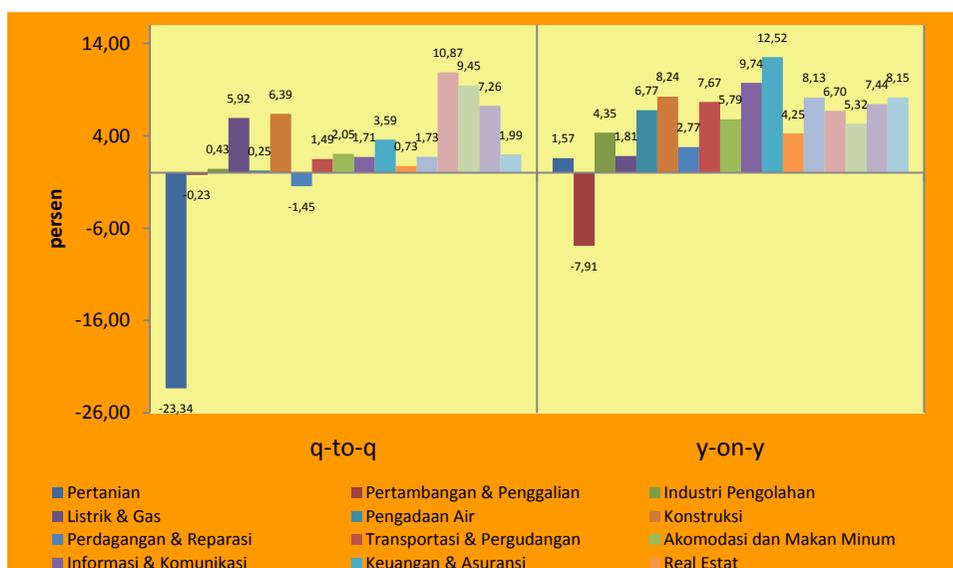
**Pada tahun 2015,
perekonomian Indonesia
tumbuh sebesar 4,79 persen**

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2014 s.d Triwulan IV-2015 (persen)



2. PDB Indonesia triwulan IV-2015 dibanding triwulan sebelumnya (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 1,83 persen. Perlambatan ini disebabkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 23,34 persen. Hal ini disebabkan faktor musiman beberapa komoditas pertanian yang mengalami penurunan.

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha
Triwulan IV-2015 (persen)



Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw III-2015 Terhadap Triw II-2015 (q-to-q)	Triw IV-2015 Terhadap Triw III-2015 (q-to-q)	Triw III-2015 Terhadap Triw III-2014 (y-on-y)	Triw IV-2015 Terhadap Triw IV-2014 (y-on-y)	Triw I s.d IV-2015 Terhadap Triw I s.d IV-2014 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Tahun 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,24	-23,34	3,34	1,57	4,02	0,53
B Pertambangan dan Penggalian	1,81	-0,23	-5,66	-7,91	-5,08	-0,47
C Industri Pengolahan	0,90	0,43	4,51	4,35	4,25	0,92
D Pengadaan Listrik dan Gas	-0,85	5,92	0,56	1,81	1,21	0,01
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,05	0,25	8,75	6,77	7,17	0,01
F Konstruksi	4,88	6,39	6,82	8,24	6,65	0,64
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1,80	-1,45	1,39	2,77	2,47	0,34
H Transportasi dan Pergudangan	4,08	1,49	7,26	7,67	6,68	0,26
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,61	2,05	4,48	5,79	4,36	0,13
J Informasi dan Komunikasi	3,19	1,71	10,74	9,74	10,06	0,45
K Jasa Keuangan dan Asuransi	7,08	3,59	10,36	12,52	8,53	0,32

Lapangan Usaha	Triw III-2015	Triw IV-2015	Triw III-2015	Triw IV-2015	Triw I s.d IV-2015	Sumber Pertumbuhan Tahun 2015
	Terhadap Triw II-2015 (q-to-q)	Terhadap Triw III-2015 (q-to-q)	Terhadap Triw III-2014 (y-on-y)	Terhadap Triw IV-2014 (y-on-y)	Terhadap Triw I s.d IV-2014 (c-to-c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
L Real Estat	1,21	0,73	4,78	4,25	4,82	0,14
M,N Jasa Perusahaan	2,15	1,73	7,63	8,13	7,69	0,12
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,26	10,87	1,27	6,70	4,75	0,16
P Jasa Pendidikan	1,85	9,45	8,08	5,32	7,45	0,23
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,75	7,26	6,33	7,44	7,10	0,08
R,S,T,U Jasa Lainnya	2,11	1,99	8,11	8,15	8,08	0,13
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	2,75	-1,67	3,86	4,01	4,10	4,00
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	23,59	-6,10	36,01	46,55	31,98	0,79
PRODUK DOMESTIK BRUTO	3,36	-1,83	4,74	5,04	4,79	4,79

3. Besaran PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2015 Rp2.945,0 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2010 pada triwulan yang sama adalah Rp2.270,4 triliun.

Tabel 2.2
Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Harga Berlaku (triliun rupiah)		Harga Konstan (triliun rupiah)		Distribusi ¹ (persen)	
	Triw III-2015	Triw IV-2015	Triw III-2015	Triw IV-2015	Triw III-2015	Triw IV-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	435,5	338,3	328,2	251,7	14,52	11,49
B Pertambangan dan Penggalian	217,8	206,8	189,9	189,5	7,26	7,02
C Industri Pengolahan	611,0	616,8	488,9	491,0	20,38	20,95
D Pengadaan Listrik dan Gas	32,9	35,3	23,5	24,9	1,10	1,20
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,2	2,2	1,9	1,9	0,07	0,07
F Konstruksi	305,0	332,5	223,6	237,9	10,17	11,29
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	394,5	392,1	308,1	303,7	13,16	13,32
H Transportasi dan Pergudangan	153,1	154,5	89,4	90,7	5,11	5,24
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	86,2	88,2	67,8	69,1	2,88	2,99
J Informasi dan Komunikasi	103,4	105,4	107,5	109,3	3,45	3,58
K Jasa Keuangan dan Asuransi	119,5	124,1	88,5	91,7	3,99	4,21
L Real Estat	83,3	84,4	67,7	68,2	2,78	2,88
M,N Jasa Perusahaan	48,5	49,7	37,5	38,1	1,62	1,68

Lapangan Usaha	Harga Berlaku (triliun rupiah)		Harga Konstan (triliun rupiah)		Distribusi ¹ (persen)	
	Triw III-2015	Triw IV-2015	Triw III-2015	Triw IV-2015	Triw III-2015	Triw IV-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	118,5	123,6	76,5	84,8	3,95	4,20
P Jasa Pendidikan	101,3	108,2	70,9	77,6	3,37	3,67
Q Jasa Keesehatan dan Kegiatan Sosial	31,7	33,9	24,6	26,4	1,05	1,15
R,S,T,U Jasa Lainnya	48,6	49,8	36,6	37,3	1,62	1,69
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	2 893,0	2 845,8	2 231,1	2 193,8	96,48	96,63
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	105,6	99,2	81,6	76,6	3,52	3,37
PRODUK DOMESTIK BRUTO	2 998,6	2 945,0	2 312,7	2 270,4	100,00	100,00

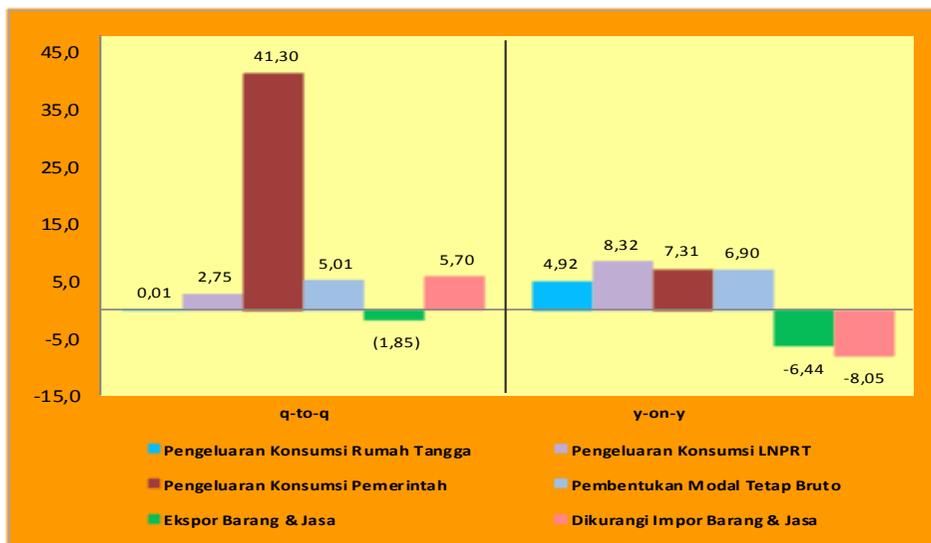
¹⁾ Atas dasar harga berlaku

4. Dari sisi pengeluaran, PDB Indonesia triwulan IV-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*) mengalami kontraksi terutama disebabkan oleh Komponen Impor Barang dan Jasa yang tumbuh 5,70 persen. Sementara Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebagai Komponen dengan *share* terbesar, hanya tumbuh 0,01 persen.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (persen)

Jenis Pengeluaran	Triw III- 2015	Triw IV- 2015	Triw III- 2015	Triw IV- 2015	Triw I s/d IV-2015	Sumber Pertumbuhan Triw IV- 2015 (<i>y-on-y</i>)
	Terhadap Triw II- 2015 (<i>q-to-q</i>)	Terhadap Triw III- 2015 (<i>q-to-q</i>)	Terhadap Triw III- 2014 (<i>y-on-y</i>)	Terhadap Triw IV- 2014 (<i>y-on-y</i>)	Terhadap Triw I s/d IV-2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,53	0,01	4,95	4,92	4,96	2,70
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	4,33	2,75	6,56	8,32	-0,63	0,09
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,26	41,30	7,11	7,31	5,38	0,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,51	5,01	4,79	6,90	5,07	2,31
5. Perubahan Inventori Diskrepani Statistik	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang & Jasa	-0,02	-1,85	-0,60	-6,44	-1,97	-1,58
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang & Jasa	-4,20	5,70	-5,90	-8,05	-5,84	-1,94
PDB	3,36	-1,83	4,74	5,04	4,79	5,04

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Triwulan IV-2015 (persen)



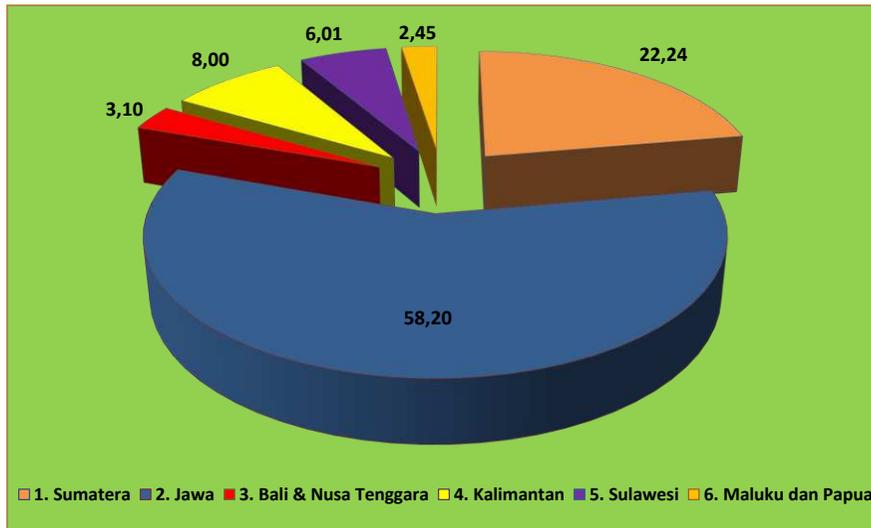
5. Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran triwulan IV-2015 dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2014 (*y-on-y*) tumbuh 5,04 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 8,32 persen. Sedangkan Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh minus 6,44 persen dan Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh minus 8,05 persen dibanding triwulan yang sama tahun 2014.

Tabel 2.4
Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran

Jenis Pengeluaran	Harga Berlaku (triliun rupiah)		Harga Konstan (triliun rupiah)		Distribusi ¹ (persen)	
	Triw III-2015	Triw IV-2015	Triw III-2015	Triw IV-2015	Triw III-2015	Triw IV-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1 654,7	1 667,9	1 245,3	1 245,4	55,18	56,64
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	33,6	34,9	25,2	25,9	1,12	1,18
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	292,9	398,4	192,9	272,6	9,77	13,53
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	970,4	1 030,0	737,7	774,6	32,36	34,97
5 Perubahan Inventori	86,4	-87,4	58,4	-57,6	2,88	-2,97
6 Ekspor Barang dan Jasa	620,4	593,9	505,6	496,2	20,69	20,16
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	595,0	612,7	452,7	478,5	19,84	20,80
PDB	2 998,6	2 945,0	2 312,7	2 270,4	100,00	100,00

¹⁾ Atas dasar harga berlaku

Grafik 2.4
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan IV-2015 (persen)



- Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan IV-2015 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,20 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,24 persen, Pulau Kalimantan 8,00 persen, dan Pulau Sulawesi 6,01 persen, dan sisanya 5,55 persen di pulau-pulau lainnya.

Tabel 2.5
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)

Wilayah/Pulau	2013	2014	2015	
			Trw III	Trw IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sumatera	23,05	23,01	22,16	22,24
2. Jawa	57,06	57,39	58,29	58,20
3. Bali dan Nusa Tenggara	2,80	2,87	3,13	3,10
4. Kalimantan	9,25	8,76	8,05	8,00
5. Sulawesi	5,50	5,65	6,06	6,01
6. Maluku dan Papua	2,34	2,32	2,31	2,45
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

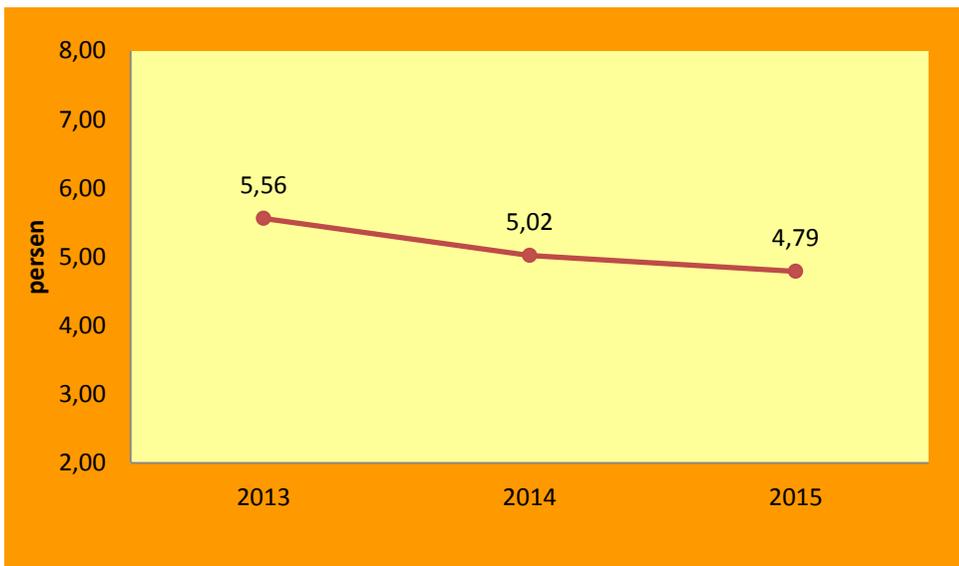
- Pertumbuhan ekonomi secara spasial pada triwulan IV-2015 menurut kelompok provinsi, dipengaruhi oleh empat provinsi penyumbang terbesar dengan total kontribusi sebesar 53,20 persen. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan pertumbuhan *y-on-y* masing-masing sebesar 6,48 persen, 5,94 persen, 5,23 persen, dan 6,08 persen.

Tabel 2.6
Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan IV-2015 (persen)

Provinsi	Pertumbuhan			Kontribusi	
	q-to-q	y-on-y	c-to-c	Terhadap Pulau	Terhadap Total 33 Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	-0,53	4,56	3,54	100,00	22,24
01. Aceh	-0,17	1,42	-0,72	4,98	1,11
02. Sumatra Utara	0,09	5,32	5,10	22,08	4,91
03. Sumatra Barat	1,01	5,74	5,41	6,92	1,54
04. Riau	1,99	4,45	0,22	25,83	5,74
05. Jambi	0,36	3,18	4,21	6,02	1,34
06. Sumatra Selatan	-3,55	3,94	4,50	12,58	2,80
07. Bengkulu	1,81	4,86	5,14	1,97	0,44
08. Lampung	-8,38	5,33	5,13	9,27	2,06
09. Kep. Bangka Belitung	1,32	4,28	4,08	2,35	0,52
10. Kepulauan Riau	2,44	5,20	6,02	7,99	1,78
Jawa	-0,46	5,87	5,45	100,00	58,20
11. DKI Jakarta	1,67	6,48	5,88	29,68	17,27
12. Jawa Barat	-0,46	5,23	5,03	22,35	13,01
13. Jawa Tengah	-2,56	6,08	5,44	14,70	8,56
14. DI Yogyakarta	-0,22	5,50	4,94	1,51	0,88
15. Jawa Timur	-1,73	5,94	5,44	24,68	14,36
16. Banten	0,48	4,87	5,37	7,09	4,12
Bali dan Nusa Tenggara	-2,30	7,61	10,29	100,00	3,10
17. Bali	1,38	5,96	6,04	49,88	1,54
18. Nusa Tenggara Barat	-8,76	11,98	21,24	28,16	0,87
19. Nusa Tenggara Timur	0,20	5,13	5,02	21,96	0,68
Kalimantan	1,46	1,45	1,31	100,00	8,00
20. Kalimantan Barat	3,20	4,35	4,81	16,24	1,30
21. Kalimantan Tengah	-0,39	6,56	7,01	10,85	0,87
22. Kalimantan Selatan	-3,70	4,14	3,84	14,72	1,18
23. Kalimantan Timur	2,59	-0,55	-0,85	58,18	4,66
Sulawesi	-1,03	8,34	8,18	100,00	6,01
24. Sulawesi Utara	6,82	5,57	6,12	14,09	0,85
25. Sulawesi Tengah	5,86	15,10	15,56	16,09	0,97
26. Sulawesi Selatan	-6,37	7,24	7,15	47,96	2,88
27. Sulawesi Tenggara	1,68	7,50	6,88	12,90	0,78
28. Gorontalo	-3,38	7,67	6,23	4,08	0,25
29. Sulawesi Barat	3,93	8,72	7,37	4,88	0,29
Maluku dan Papua	5,02	10,39	6,62	100,00	2,45
30. Maluku	3,08	6,49	5,44	12,33	0,30
31. Maluku Utara	0,56	6,05	6,10	9,43	0,23
32. Papua Barat	2,44	5,20	4,10	22,17	0,54
33. Papua	7,18	14,08	7,97	56,07	1,37

8. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2015 meningkat sebesar 4,79 persen terjadi pada hampir semua lapangan usaha ekonomi, kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 5,08 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06 persen dan diikuti oleh Jasa Keuangan dan Asuransi serta Jasa Lainnya yang masing-masing tumbuh sebesar 8,53 persen dan 8,08 persen.

Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2013–2015 (persen)



9. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan III-2015 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,27 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,37 persen, Pulau Kalimantan 7,99 persen, Pulau Sulawesi 6,08 persen, dan sisanya 5,29 persen di pulau-pulau lainnya.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2015 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ¹			Distribusi ²		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,20	4,24	4,02	13,36	13,34	13,52
B Pertambangan dan Penggalian	2,53	0,72	-5,08	11,01	9,87	7,62
C Industri Pengolahan	4,37	4,61	4,25	21,03	21,01	20,84
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,23	5,57	1,21	1,03	1,08	1,14
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,32	5,87	7,17	0,08	0,07	0,07
F Konstruksi	6,11	6,97	6,65	9,49	9,86	10,34
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,81	5,16	2,47	13,21	13,44	13,29
H Transportasi dan Pergudangan	6,97	7,36	6,68	3,93	4,42	5,02
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,80	5,77	4,36	3,03	3,04	2,96
J Informasi dan Komunikasi	10,39	10,10	10,06	3,57	3,50	3,52
K Jasa Keuangan dan Asuransi	8,76	4,68	8,53	3,88	3,87	4,03
L Real Estat	6,54	5,00	4,82	2,77	2,79	2,86
M,N Jasa Perusahaan	7,91	9,81	7,69	1,52	1,57	1,65
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,56	2,38	4,75	3,90	3,83	3,91
P Jasa Pendidikan	7,44	5,55	7,45	3,22	3,24	3,37
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96	7,96	7,10	1,01	1,03	1,07
R,S,T,U Jasa Lainnya	6,40	8,93	8,08	1,47	1,55	1,65
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	5,20	5,02	4,10	97,51	97,51	96,86
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	21,80	5,13	31,98	2,49	2,49	3,14
PRODUK DOMESTIK BRUTO	5,56	5,02	4,79	100,00	100,00	100,00

¹⁾ Atas dasar harga konstan 2010

²⁾ Atas dasar harga berlaku

10. Besaran PDB Indonesia pada tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 11.540,8 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2010) mencapai Rp 8.976,9 triliun.

Tabel 2.8
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013–2015 (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 275,0	1 409,7	1 560,4	1 083,1	1 129,1	1 174,5
B Pertambangan dan Penggalian	1 050,7	1 042,9	879,4	791,1	796,7	756,2
C Industri Pengolahan	2 007,4	2 219,4	2 405,4	1 772,0	1 853,7	1.932,5
D Pengadaan Listrik dan Gas	98,7	114,6	131,3	88,8	93,8	94,9
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,2	7,9	8,6	6,5	6,9	7,4
F Konstruksi	906,0	1 041,9	1 193,3	772,7	826,6	881,6
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1 261,1	1 420,1	1 534,1	1 119,3	1 177,1	1 206,1
H Transportasi dan Pergudangan	375,3	467,0	579,0	304,5	326,9	348,8
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	289,5	321,1	341,8	243,7	257,8	269,1
J Informasi dan Komunikasi	341,0	369,4	406,9	349,2	384,4	423,0
K Jasa Keuangan dan Asuransi	370,2	408,4	464,7	305,5	319,8	347,1
L Real Estat	264,3	294,6	329,8	244,2	256,4	268,8
M,N Jasa Perusahaan	144,6	166,0	190,3	125,5	137,8	148,4
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	372,2	404,6	450,7	289,5	296,3	310,4
P Jasa Pendidikan	307,9	342,1	388,7	250,0	263,9	283,5
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96,9	109,1	123,4	84,6	91,4	97,8
R,S,T,U Jasa Lainnya	140,3	163,5	190,5	123,1	134,1	144,9
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	9 308,3	10 302,3	11 178,3	7 953,3	8 352,7	8 695,0
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	237,8	263,5	362,5	203,2	213,6	281,9
PRODUK DOMESTIK BRUTO	9 546,1	10 565,8	11 540,8	8 156,5	8 566,3	8 976,9

11. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,79 persen ditopang oleh hampir semua Komponen, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang mengalami kontraksi sebesar 1,97 persen dan 0,63 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 5,38 persen, dan diikuti oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, masing-masing tumbuh sebesar 5,07 persen, dan 4,96 persen.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2015 (persen)

Jenis Pengeluaran	Laju Pertumbuhan ¹			Distribusi ²		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,43	5,16	4,96	55,74	55,99	55,92
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,18	12,19	-0,63	1,09	1,18	1,13
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,75	1,16	5,38	9,52	9,43	9,75
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	5,01	4,57	5,07	31,97	32,58	33,19
5 Perubahan Inventori	-	-	-	1,87	1,99	1,38
6 Ekspor Barang dan Jasa	4,17	1,00	-1,97	23,92	23,63	21,09
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1,86	2,19	-5,84	24,71	24,42	20,85
PDB	5,56	5,02	4,79	100,00	100,00	100,00

¹⁾ Atas dasar harga konstan 2010

²⁾ Atas dasar harga berlaku

12. Tahun 2015, Komponen Konsumsi Rumah Tangga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian sebesar 55,92 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 33,19 persen, Ekspor Barang dan Jasa sebesar 21,09 persen, Impor Barang dan Jasa sebesar 20,85 persen, Konsumsi Pemerintah sebesar 9,75 persen, dan Komponen Konsumsi LNPRT sebesar 1,13 persen.

Tabel 2.10
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2015 (triliun rupiah)

Jenis Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 321,1	5 915,7	6 453,2	4 423,4	4 651,5	4 882,3
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	103,9	124,2	130,9	88,6	99,4	98,8
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	908,6	996,2	1 125,5	727,8	736,3	775,9
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3 051,5	3 442,0	3 830,0	2 654,4	2 775,7	2 916,6
5 Perubahan Invenntori	178,1	210,4	158,8	124,5	156,7	112,8
6 Ekspor Barang dan Jasa	2 283,8	2 497,1	2 434,2	2 026,1	2 046,3	2 005,9
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2 359,2	2 580,5	2 405,8	1 945,9	1 988,5	1 872,4
Diskrepansi Statistik	58,4	-39,4	-186,0	57,6	88,9	56,9
PDB	9 546,1	10 565,8	11 540,8	8 156,5	8 566,3	8 976,9

13. Dalam kurun waktu 2010-2015, PDB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp28,8 juta (tahun 2010), sebesar Rp32,4 juta (tahun 2011), sebesar Rp35,1 juta (tahun 2012), sebesar Rp38,4 juta (tahun 2013), sebesar Rp41,9 juta (tahun 2014), dan sebesar Rp45,2 juta (tahun 2015).

Tabel 2.11
PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2010–2015

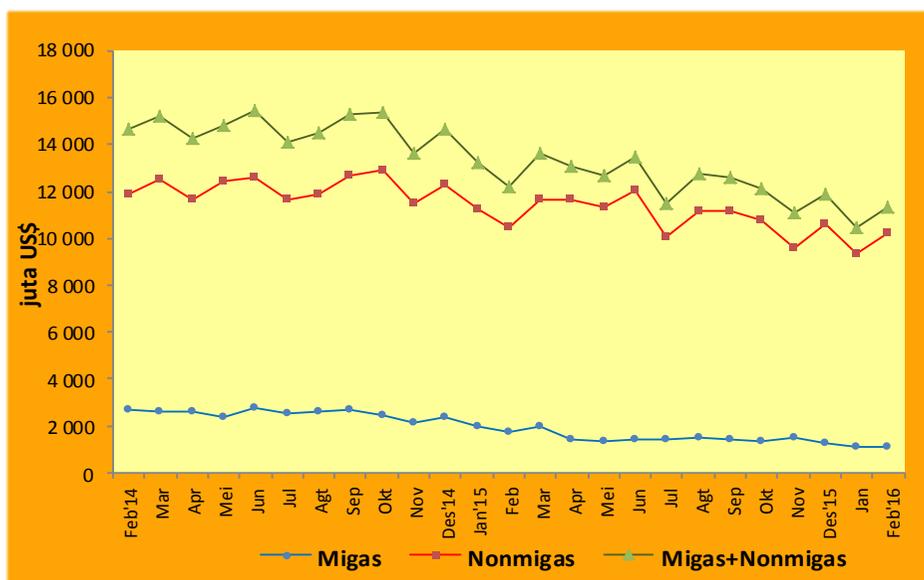
Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDB Per Kapita						
Atas Dasar Harga Berlaku						
a. Nilai (juta rupiah)	28,8	32,4	35,1	38,4	41,9	45,2
b. Indeks Peningkatan (persen)	-	12,46	8,47	9,29	9,21	7,82
c. Nilai (US\$)	3 171,8	3 691,9	3 740,9	3 666,8	3 530,6	3 377,1

III. EKSPOR FEBRUARI 2016

1. Nilai ekspor Indonesia Februari 2016 mencapai US\$11,30 miliar, atau naik sebesar 7,80 persen dibanding ekspor Januari 2016. Sementara dibanding Februari 2015, ekspor turun sebesar 7,18 persen.

Nilai ekspor Februari 2016 mencapai US\$11,30 miliar, naik 7,80 persen

Grafik 3.1
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB)
Februari 2014–Februari 2016



2. Ekspor nonmigas Februari 2016 mencapai US\$10,19 miliar, naik 8,67 persen dibanding ekspor nonmigas Januari 2016, sementara turun 2,25 persen dibanding ekspor Februari 2015.
3. Secara kumulatif nilai ekspor Januari–Februari 2016 mencapai US\$21,78 miliar atau turun 14,32 persen dibanding ekspor periode yang sama tahun 2015, demikian juga ekspor nonmigas mencapai US\$19,56 miliar atau turun 9,89 persen.
4. Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Februari 2016 terhadap Januari 2016 terjadi pada perhiasan/permata sebesar US\$593,7 juta (153,80 persen),

sedangkan penurunan terbesar terjadi pada bahan bakar mineral sebesar US\$48,7 juta (4,44 persen).

5. Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat Februari 2016 mencapai angka terbesar, yaitu US\$1,15 miliar, disusul Jepang US\$1,11 miliar dan Tiongkok US\$0,95 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 31,42 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (27 negara) sebesar US\$1,11 miliar.
6. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Februari 2016 turun sebesar 7,69 persen dibanding ekspor hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2015, dan ekspor hasil tambang dan lainnya turun 21,12 persen, sedangkan ekspor hasil pertanian turun 14,80 persen.
7. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada periode Januari–Februari 2016 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US\$3,95 miliar (18,13 persen), diikuti Jawa Timur sebesar US\$3,10 miliar (14,25 persen) dan Kalimantan Timur sebesar US\$2,21 miliar (10,13 persen).

Tabel 3.1
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya (Δ %)

Uraian	2015		2016			Δ (%)			Peran (%) Jan–Feb 2016
	Februari	Jan–Feb	Januari	Februari	Jan–Feb	y-on-y	m-on-m	y-on-y Jan–Feb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	12 172,8	25 417,7	10 480,6	11 298,5	21 779,1	-7,18	7,80	-14,32	100,00
Migas	1 753,4	3 712,4	1 108,0	1 113,3	2 221,3	-36,51	0,47	-40,16	10,20
Industri Pengolahan	207,5	420,4	85,5	55,5	141,0	-73,28	-35,13	-66,47	0,65
- Hasil Minyak	207,2	419,0	85,5	55,4	140,9	-73,27	-35,20	-66,38	0,65
- Gas	0,3	1,4	0,0	0,1	0,1	-75,10	238,81	-92,88	0,00
Pertambangan	1 545,9	3 292,0	1 022,5	1 057,8	2 080,3	-31,57	3,45	-36,81	9,55
- Minyak Mentah	604,9	1 086,7	357,5	476,6	834,2	-21,20	33,31	-23,23	3,83
- Gas	941,0	2 205,3	665,0	581,2	1 246,1	-38,24	-12,60	-43,49	5,72
Nonmigas	10 419,4	21 705,3	9 372,6	10 185,2	19 557,8	-2,25	8,67	-9,89	89,80
Pertanian	261,2	548,2	250,9	216,2	467,1	-17,22	-13,80	-14,80	2,15
Industri Pengolahan	8 607,8	17 881,0	7 815,0	8 691,5	16 506,5	0,97	11,21	-7,69	75,79
Pertambangan dan Lainnya	1 550,4	3 276,2	1 306,7	1 277,5	2 584,2	-17,60	-2,23	-21,12	11,86

Tabel 3.2
Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$)
Triwulanan 2014–2015

Uraian	2014	2015				Perubahan Triwulan (%)				
	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	I'15 thd IV'14	II'15 thd I'15	III'15 thd II'15	IV'15 thd III'14	IV'15 thd IV'14
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Total Ekspor	43 273,8	39 051,7	39 373,4	36 780,2	35 161,0	-9,76	0,82	-6,59	-4,40	-23,07
Migas	6 616,6	5 701,2	4 290,8	4 406,3	4 176,1	-13,83	-24,74	2,69	-5,22	-58,44
Industri Pengolahan	824,2	609,2	518,1	376,5	262,6	-26,08	-14,97	-27,32	-30,26	-213,89
-Hasil Minyak	1 432,8	1 419,5	1 267,8	1 064,0	874,5	-0,92	-10,69	-16,07	-17,81	-63,84
-Gas	1,3	1,7	7,3	1,2	2,0	35,71	329,33	-83,92	73,96	38,64
Pertambangan	5 792,4	5 092,0	3 772,7	4 029,8	3 913,5	-12,09	-25,91	6,81	-2,89	-48,01
-Minyak Mentah	2 025,6	1 859,7	1 577,4	1 638,8	1 403,5	-8,19	-15,18	3,89	-14,35	-44,32
-Gas	3 766,8	3 232,3	2 195,3	2 391,0	2 510,0	-14,19	-32,08	8,91	4,98	-50,08
Nonmigas	36 657,3	33 350,5	35 082,6	32 373,9	30 985,0	-9,02	5,19	-7,72	-4,29	-18,31
Pertanian	929,0	842,7	867,7	1 090,7	925,4	-9,29	2,96	25,70	-15,16	-0,39
Industri Pengolahan	30 106,0	27 315,5	29 082,1	26 334,7	25 871,2	-9,27	6,47	-9,45	-1,76	-16,37
Pertambangan dan Lainnya	5 622,3	5 192,3	5 132,8	4 948,5	4 188,4	-7,65	-1,15	-3,59	-15,36	-34,24

Tabel 3.3
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit
dan Perubahannya (Δ)

Golongan Barang (HS)	Januari 2016	Februari 2016	Δ	$\Delta\%$	Januari-Februari			
					2015	2016	$\Delta\%$	Peran (%) 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Bahan bakar mineral (27)	1 096,7	1 048,0	-48,7	-4,44	2 898,6	2 144,7	-26,01	10,97
2. Perhiasan/permata (71)	386,1	979,8	593,7	153,80	1 306,9	1 365,9	4,51	6,98
3. Alas kaki (64)	395,9	353,2	-42,7	-10,78	726,6	749,1	3,08	3,83
4. Kendaraan dan bagiannya (87)	344,3	389,1	44,8	13,00	906,7	733,4	-19,11	3,75
5. Barang-barang rajutan (61)	267,8	247,3	-20,5	-7,64	516,3	515,1	-0,23	2,63
6. Benda-benda dari besi dan baja (73)	110,1	191,7	81,6	74,17	243,1	301,8	24,14	1,54
7. Buah-buahan (08)	72,8	53,8	-19,0	-26,08	129,3	126,6	-2,03	0,65
8. Kapal laut (89)	18,7	87,3	68,6	366,88	24,1	106,0	339,29	0,54
9. Timah (80)	33,0	68,0	35,0	105,69	265,7	101,0	-61,98	0,52
10. Pupuk (31)	24,9	6,4	-18,5	-74,26	22,2	31,4	41,51	0,16
Total 10 Golongan Barang	2 750,3	3 424,6	674,3	24,52	7 039,5	6 175,0	-12,28	31,57
Lainnya	6 622,3	6 760,6	138,3	2,09	14 665,8	13 382,8	-8,75	68,43
Total Ekspor Nonmigas	9 372,6	10 185,2	812,6	8,67	21 705,3	19 557,8	-9,89	100,00

Tabel 3.4
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ)

Negara Tujuan	Januari 2016	Februari 2016	Δ	Δ%	Januari–Februari			Peran (%) 2016
					2015	2016	Δ%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASEAN	1 924,5	2 215,6	291,1	15,13	4 449,7	4 140,2	-6,96	21,17
1 Singapura	601,1	829,9	228,8	38,05	1 535,8	1 431,1	-6,82	7,32
2 Malaysia	428,7	442,8	14,1	3,30	1 009,2	871,5	-13,65	4,46
3 Thailand	336,2	360,6	24,4	7,27	786,4	696,8	-11,39	3,56
ASEANLainnya	558,5	582,3	23,8	4,26	1 118,3	1 140,8	2,02	5,83
Uni Eropa	1 164,5	1 110,6	-53,9	-4,63	2 422,9	2 275,1	-6,10	11,63
4 Jerman	212,9	204,6	-8,3	-3,90	408,3	417,5	2,26	2,13
5 Belanda	222,7	231,1	8,4	3,77	637,4	453,7	-28,81	2,32
6 Italia	139,2	128,3	-10,9	-7,82	346,1	267,5	-22,70	1,37
UniEropaLainnya	589,7	546,6	-43,1	-7,30	1 031,1	1 136,4	10,21	5,81
Negara Utama Lainnya	4 602,2	4 768,5	166,3	3,61	10 620,0	9 370,7	-11,76	47,91
7 Tiongkok	886,7	945,1	58,4	6,59	2 027,4	1 831,8	-9,65	9,37
8 Jepang	1 052,4	1 108,5	56,1	5,33	2 283,4	2 161,0	-5,36	11,05
9 AmerikaSerikat	1 230,2	1 146,3	-83,9	-6,82	2 450,0	2 376,4	-3,00	12,15
10 India	664,9	660,9	-4,0	-0,60	1 860,5	1 325,8	-28,74	6,78
11 Australia	165,2	275,4	110,2	66,71	382,2	440,6	15,28	2,25
12 Korea Selatan	383,5	407,1	23,6	6,14	901,8	790,6	-12,34	4,04
13 Taiwan	219,3	225,2	5,9	2,67	714,7	444,5	-37,81	2,27
Total 13 Negara Tujuan Lainnya	6 543,0	6 965,8	422,8	6,46	15 343,2	13 508,8	-11,96	69,07
Total Ekspor Nonmigas	9 372,6	10 185,2	812,6	8,67	21 705,3	19 557,8	-9,89	100,00

Tabel 3.5
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2014–2016 (FOB: juta US\$)

Bulan	2014			2015			2016		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jan	2 501,7	11 970,6	14 472,3	1 959,0	11 285,9	13 244,9	1 108,0	9 372,6	10 480,6
Feb	2 729,2	11 904,9	14 634,1	1 753,4	10 419,4	12 172,8	1 113,3	10 185,2	11 298,5
Mar	2 641,3	12 551,3	15 192,6	1 988,9	11 645,2	13 634,0			
Apr	2 651,4	11 641,1	14 292,5	1 458,2	11 646,4	13 104,6			
Mei	2 375,7	12 447,9	14 823,6	1 392,7	11 361,9	12 754,7			
Jun	2 786,0	12 623,5	15 409,5	1 439,9	12 074,2	13 514,1			
Jul	2 496,3	11 627,8	14 124,1	1 421,8	10 043,9	11 465,8			
Agt	2 598,1	11 883,5	14 481,6	1 530,9	11 195,2	12 726,0			
Sep	2 622,6	12 653,2	15 275,8	1 453,6	11 134,8	12 588,4			
Okt	2 413,2	12 879,5	15 292,8	1 379,6	10 742,2	12 121,7			
Nov	2 035,4	11 509,3	13 544,7	1 497,0	9 625,1	11 122,2			
Des	2 168,0	12 268,3	14 436,3	1 299,5	10 617,6	11 917,1			
Total	30 018,8	145 961,2	175 980,0	18 574,4	131 791,9	150 366,3	2 221,3	19 557,8	21 779,1

Tabel 3.6
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang
dan Pelabuhan Muat, Januari–Februari 2016

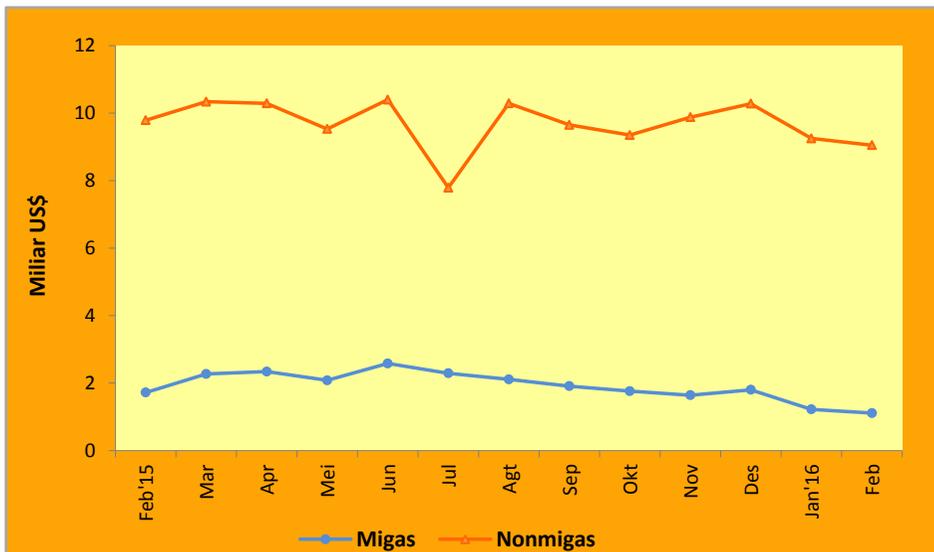
No Urut	Provinsi Asal Barang	Pelabuhan Muat						Total Ekspor		
		Prov Asal Barang			Prov Lain			Nilai	% Kolom	% Baris
		Nilai	% Kolom	% Baris	Nilai	% Kolom	% Baris			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	9,7	0,06	41,27	13,7	0,23	58,73	23,4	0,11	100,00
2	Sumatera Utara	1 138,8	7,18	99,53	5,3	0,09	0,47	1 144,2	5,25	100,00
3	Sumatera Barat	196,3	1,24	95,47	9,3	0,16	4,53	205,6	0,94	100,00
4	Riau	1 932,4	12,18	98,75	24,4	0,41	1,25	1 956,8	8,98	100,00
5	Kepulauan Riau	1 340,3	8,45	100,00	0,1	0,00	0,00	1 340,3	6,15	100,00
6	Jambi	106,1	0,67	38,03	172,9	2,92	61,97	279,0	1,28	100,00
7	Sumatera Selatan	300,1	1,89	95,15	15,3	0,26	4,85	315,4	1,45	100,00
8	Kep. Bangka Belitung	125,4	0,79	94,79	6,9	0,12	5,21	132,3	0,61	100,00
9	Bengkulu	7,3	0,05	45,21	8,8	0,15	54,79	16,1	0,07	100,00
10	Lampung	520,9	3,28	99,51	2,6	0,04	0,49	523,5	2,40	100,00
11	DKI Jakarta	1 615,5	10,18	99,85	2,4	0,04	0,15	1 617,9	7,43	100,00
12	Jawa Barat	83,1	0,52	2,11	3 864,8	65,31	97,89	3 947,9	18,13	100,00
13	Banten	143,7	0,91	10,62	1 209,7	20,44	89,38	1 353,4	6,21	100,00
14	Jawa Tengah	820,0	5,17	79,56	210,6	3,56	20,44	1 030,6	4,73	100,00
15	DI Yogyakarta	1,6	0,01	3,10	51,4	0,87	96,90	53,1	0,24	100,00
16	Jawa Timur	3 058,8	19,28	98,58	44,1	0,74	1,42	3 102,9	14,25	100,00
17	Bali	35,0	0,22	45,77	41,5	0,70	54,23	76,5	0,35	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	292,8	1,85	99,88	0,4	0,01	0,12	293,2	1,35	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	3,4	0,02	87,89	0,5	0,01	12,11	3,9	0,02	100,00
20	Kalimantan Barat	66,8	0,42	98,81	0,8	0,01	1,19	67,6	0,31	100,00
21	Kalimantan Tengah	66,3	0,42	35,94	118,2	2,00	64,06	184,5	0,85	100,00
22	Kalimantan Selatan	748,0	4,72	96,99	23,3	0,39	3,01	771,3	3,54	100,00
23	Kalimantan Timur	2 194,1	13,83	99,43	12,5	0,21	0,57	2 206,6	10,13	100,00
24	Kalimantan Utara	110,0	0,69	97,30	3,1	0,05	2,70	113,0	0,52	100,00
25	Sulawesi Utara	142,8	0,90	86,64	22,0	0,37	13,36	164,8	0,76	100,00
26	Gorontalo	0,9	0,01	90,99	0,1	0,00	9,01	1,0	0,00	100,00
27	Sulawesi Tengah	109,5	0,69	99,03	1,1	0,02	0,97	110,6	0,51	100,00
28	Sulawesi Selatan	146,8	0,93	97,13	4,3	0,07	2,87	151,1	0,69	100,00
29	Sulawesi Barat	-	-	-	34,9	0,59	100,00	34,9	0,16	100,00
30	Sulawesi Tenggara	8,9	0,06	46,66	10,1	0,17	53,34	19,0	0,09	100,00
31	Maluku	0,0	0,00	1,58	1,9	0,03	98,42	1,9	0,01	100,00
32	Maluku Utara	-	-	-	0,0	0,00	100,00	0,0	0,00	100,00
33	Papua	149,7	0,94	100,00	0,0	0,00	0,00	149,7	0,69	100,00
34	Papua Barat	386,8	2,44	99,91	0,4	0,01	0,09	387,2	1,78	100,00
Total Ekspor		15 861,8	100,00	-	5 917,3	100,00	-	21 779,1	100,00	-

IV. IMPOR FEBRUARI 2016

1. Nilai impor Indonesia Februari 2016 sebesar US\$10,16 miliar atau turun 2,91 persen dibanding impor Januari 2016. Dibanding impor Februari 2015 turun 11,17 persen.

**Impor Februari 2016
sebesar US\$10,16 miliar
atau turun 2,91 persen**

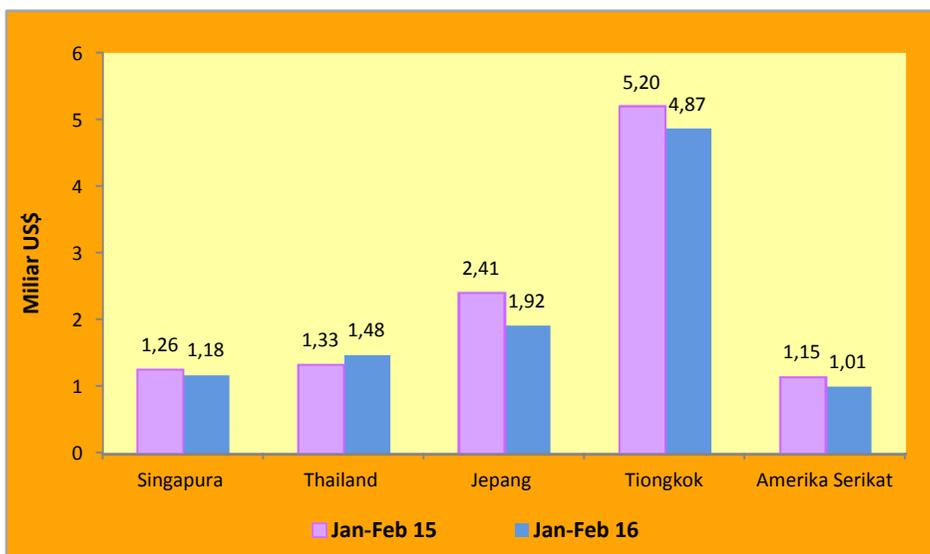
Grafik 4.1
Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF)
Februari 2015–Februari 2016



2. Impor nonmigas Februari 2016 sebesar US\$9,05 miliar, turun 2,13 persen dibanding Januari 2016 (US\$9,25 miliar). Selama Januari–Februari 2016 impor nonmigas mencapai US\$18,29 miliar atau turun 9,83 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$20,29 miliar).
3. Impor migas Februari 2016 sebesar US\$1,11 miliar, turun 8,79 persen dibanding Januari 2016 (US\$1,22 miliar). Selama Januari–Februari impor migas mencapai US\$2,34 miliar atau turun 39,09 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$3,83 miliar).

4. Peningkatan nilai impor nonmigas Februari 2016 terbesar adalah golongan kendaraan bermotor dan bagiannya sebesar US\$129,2 juta, atau naik 35,35 persen dibanding Januari 2016 (US\$365,5 juta). Impor golongan barang tersebut pada Januari–Februari 2016 mencapai US\$860,2 juta, turun 5,60 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
5. Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar periode Januari–Februari 2016 ditempati Tiongkok 26,65 persen, Jepang 10,50 persen, dan Thailand 8,11 persen. Impor nonmigas dari ASEAN dan Uni Eropa masing-masing 22,22 persen dan 9,68 persen.

Grafik 4.2
Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF)
Januari–Februari 2015 dan 2016



6. Nilai impor selama Januari–Februari 2016 pada golongan konsumsi mengalami peningkatan sebesar 34,38 persen, sedangkan bahan baku/penolong dan barang modal menurun masing-masing 19,18 persen dan 12,62 persen dibanding impor periode yang sama tahun sebelumnya.
7. Neraca perdagangan Indonesia Februari 2016 surplus sebesar US\$1,14 miliar.

Tabel 4.1
Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya
Januari–Februari 2015 dan 2016

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Jan–Feb 2016 (%)
	Jan 2016	Feb 2016	Jan–Feb 2015	Jan–Feb 2016	Feb 2016 thd Jan 2016	Jan–Feb 2016 thd Jan–Feb 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	10 467,0	10 162,4	24 122,8	20 629,4	-2,91	-14,48	100,00
Migas	1 221,5	1 114,1	3 834,7	2 335,6	-8,79	-39,09	11,32
- Minyak Mentah	393,9	325,0	1 094,4	718,9	-17,49	-34,31	3,48
- Hasil Minyak	685,1	680,1	2 426,6	1 365,2	-0,73	-43,74	6,62
- Gas	142,5	109,0	313,7	251,5	-23,51	-19,83	1,22
Nonmigas	9 245,5	9 048,3	20 288,1	18 293,8	-2,13	-9,83	88,68

Tabel 4.2
Perkembangan Impor Indonesia
Februari 2015–Februari 2016

Periode	Nilai CIF (Juta US\$)			Perubahan Terhadap Periode Sebelumnya (%)		
	Migas	Nonmigas	Total Impor	Migas	Nonmigas	Total Impor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015						
Februari	1 719,6	9 790,5	11 510,1	-18,70	-6,74	-8,74
Maret	2 268,0	10 340,7	12 608,7	31,89	5,62	9,54
Triwulan I	6 102,6	30 628,8	36 731,4	-41,55	-8,20	-16,15
April	2 336,3	10 290,0	12 626,3	3,01	-0,49	0,14
Mei	2 080,5	9 533,1	11 613,6	-10,95	-7,36	-8,02
Juni	2 577,5	10 400,6	12 978,1	23,89	9,10	11,75
Triwulan II	6 994,3	30 226,7	37 218,0	14,61	-1,32	1,32
Juli	2 294,3	7 787,6	10 081,9	-10,99	-25,12	-22,32
Agustus	2 108,0	10 291,2	12 399,2	-8,12	32,15	22,98
September	1 912,4	9 646,2	11 558,6	-9,28	-6,27	-6,78
Triwulan III	6 314,7	27 725,0	34 039,7	-9,72	-8,27	-8,54
Oktober	1 763,0	9 345,9	11 108,9	-7,81	-3,11	-3,89
November	1 640,4	9 879,1	11 519,5	-6,96	5,71	3,70
Desember	1 798,0	10 279,3	12 077,3	9,61	4,05	4,84
Triwulan IV	5 201,5	29 504,2	34 705,7	-17,63	6,42	1,96
Jan–Des	24 613,2	118 081,6	142 694,8	-43,37	-12,35	-19,91
2016						
Januari	1 221,5	9 245,5	10 467,0	-32,06	-10,06	-13,33
Februari	1 114,1	9 048,3	10 162,4	-8,79	-2,13	-2,91

Tabel 4.3
Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit dan Perubahannya
Januari–Februari 2015 dan 2016

Golongan Barang (HS)	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Feb'16 (%)
	Januari 2016	Februari 2016	Jan-Feb 2015	Jan-Feb 2016	Feb 2016 Thd Jan 2016	Jan-Feb'16 thd Jan-Feb'15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Mesin dan peralatan mekanik (84)	1 796,5	1 609,4	3 803,7	3 405,9	-10,41	-10,46	18,62
2. Mesin dan peralatan listrik (85)	1 109,2	1 171,9	2 578,4	2 281,1	5,65	-11,53	12,47
3. Besi dan baja (72)	503,0	464,1	1 402,2	967,1	-7,73	-31,03	5,29
4. Kendaraan bermotor dan bagiannya (87)	365,5	494,7	911,2	860,2	35,35	-5,60	4,70
5. Serealia (10)	443,6	388,8	507,5	832,4	-12,35	64,02	4,55
6. Benda-benda dari besi dan baja (73)	270,9	226,5	653,4	497,4	-16,39	-23,88	2,72
7. Pupuk (31)	116,1	167,9	342,9	284,0	44,62	-17,18	1,55
8. Gula dan kembang gula (17)	75,1	167,4	313,1	242,5	122,90	-22,55	1,33
9. Senjata dan amunisi (93)	185,0	31,0	13,2	216,0	-83,24	1 536,36	1,18
10. Susu, mentega dan telur (04)	44,5	71,3	161,6	115,8	60,22	-28,34	0,63
Total 10 Golongan Barang	4 909,4	4 793,0	10 687,2	9 702,4	-2,37	-9,21	53,04
Barang Lainnya	4 336,1	4 255,3	9 600,9	8 591,4	-1,86	-10,51	46,96
Total Impor Nonmigas	9 245,5	9 048,3	20 288,1	18 293,8	-2,13	-9,83	100,00

Tabel 4.4
Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang
Januari–Februari 2016

Negara	Nilai CIF (Juta US\$)				Persentase thd Total (%)			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (2 s.d. 4)	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (6 s.d. 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 ASEAN	719,1	3 919,6	641,4	5 280,1	13,62	74,23	12,15	100,00
2 Jepang	65,9	1 359,8	498,3	1 924,0	3,43	70,68	25,90	100,00
3 Korea Selatan	84,5	901,4	80,8	1 066,7	7,92	84,50	7,57	100,00
4 Tiongkok	484,2	2 984,1	1 433,2	4 901,5	9,88	60,88	29,24	100,00
5 India	27,9	380,0	52,6	460,3	6,06	82,55	11,43	100,00
6 Australia	62,7	564,6	16,0	643,3	9,75	87,75	2,49	100,00
7 Selandia Baru	37,1	37,8	1,7	76,6	48,43	49,35	2,22	100,00
8 Amerika Serikat	93,5	746,2	175,4	1 015,0	9,21	73,52	17,28	100,00
9 Uni Eropa	231,7	1 011,5	534,9	1 778,3	13,03	56,88	30,08	100,00
10 Lainnya	357,1	2 950,4	176,0	3 483,5	10,25	84,70	5,05	100,00
Total Impor	2 163,7	14 855,4	3 610,3	20 629,4	10,49	72,01	17,50	100,00

Tabel 4.5
Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang
Januari–Februari 2015 dan 2016

Negara Asal	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Feb'16 (%)
	Januari 2016	Februari 2016	Jan-Feb 2015	Jan-Feb 2016	Feb 2016 thd Jan 2016	Jan-Feb '16 thd Jan-Feb '15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASEAN	1 992,8	2 072,6	4 218,5	4 065,4	4,00	-3,63	22,22
1 Singapura	596,2	587,5	1 262,5	1 183,7	-1,46	-6,24	6,47
2 Thailand	662,2	821,8	1 334,8	1 484,0	24,10	11,18	8,11
3 Malaysia	377,4	319,2	829,7	696,6	-15,42	-16,04	3,81
ASEAN Lainnya	357,0	344,1	791,5	701,1	-3,61	-11,42	3,83
Uni Eropa	992,3	778,9	1 748,6	1 771,2	-21,51	1,29	9,68
4 Jerman	263,5	217,7	601,3	481,2	-17,38	-19,97	2,63
5 Belanda	111,1	54,9	99,0	166,0	-50,59	67,68	0,91
6 Italia	127,9	129,3	218,1	257,2	1,09	17,93	1,40
Uni Eropa Lainnya	489,8	377,0	830,2	866,8	-23,03	4,41	4,74
Negara Utama Lainnya	5 059,5	5 194,8	11 740,4	10 254,2	2,67	-12,66	56,05
7 Tiongkok	2 478,1	2 396,8	5 196,6	4 874,9	-3,28	-6,19	26,65
8 Jepang	901,0	1 019,6	2 410,6	1 920,6	13,16	-20,33	10,50
9 Amerika Serikat	506,0	507,1	1 148,0	1 013,1	0,22	-11,75	5,54
10 Korea Selatan	454,0	471,5	1 143,6	925,5	3,85	-19,07	5,06
11 Australia	244,6	374,4	735,5	619,0	53,07	-15,84	3,38
12 Taiwan	235,3	208,1	611,1	443,3	-11,56	-27,46	2,42
13 India	240,5	217,3	495,0	457,8	-9,65	-7,52	2,50
Total 13 Negara Utama	7 197,8	7 325,2	16 085,8	14 522,9	1,77	-	79,3
Negara Lainnya	2 047,7	1 723,1	4 202,3	3 770,9	-	-	20,6
Total Impor Nonmigas	9 245,5	9 048,3	20 288,1	18 293,8	-2,13	-	100,

Tabel 4.6
Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2015–Februari 2016
(Nilai CIF: Juta US\$)

Bulan	2015				2016			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	786,3	9 618,3	2 208,1	12 612,7	1 160,8	7 496,8	1 809,4	10 467,0
Februari	823,8	8 762,8	1 923,5	11 510,1	1 002,9	7 358,6	1 800,9	10 162,4
Maret	930,3	9 331,1	2 347,3	12 608,7				
April	910,4	9 680,9	2 035,0	12 626,3				
Mei	944,2	8 720,0	1 949,4	11 613,6				
Juni	1 027,9	9 773,5	2 176,7	12 978,1				
Juli	705,6	7 715,0	1 661,3	10 081,9				
Agustus	1 080,1	9 275,1	2 044,0	12 399,2				
September	823,1	8 691,9	2 043,6	11 558,6				
Oktober	773,6	8 262,7	2 072,6	11 108,9				
November	966,7	8 524,4	2 028,4	11 519,5				
Desember	1 104,6	8 725,3	2 247,4	12 077,3				
Total	10 876,5	107 081,0	24 737,3	142 694,8	2 163,7	14 855,4	3 610,3	20 629,4
Persentase thd Total (%)	7,62	75,05	17,33	100,00	10,49	72,01	17,50	100,00

Tabel 4.7
Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Februari 2016
 (juta US\$)

Negara Asal Barang	Desember 2015	Januari 2016	Februari 2016	Jan-Feb 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Tiongkok	2 771,6	2 490,9	2 410,7	4 901,6
2 Singapura	1 332,1	984,1	1 019,2	2 003,3
3 Jepang	989,8	902,6	1 021,3	1 923,9
4 Thailand	700,3	666,0	825,7	1 491,7
5 Malaysia	655,5	498,0	585,2	1 083,2
6 Korea Selatan	662,0	532,0	534,6	1 066,6
7 Amerika Serikat	701,4	506,9	508,1	1 015,0
8 Australia	370,0	244,7	398,7	643,4
9 Vietnam	304,9	281,1	276,3	557,4
10 Brazil	190,0	344,1	165,1	509,2
11 Jerman	269,6	264,1	218,9	483,0
12 India	235,6	242,1	218,3	460,4
13 Taiwan	259,2	239,0	211,1	450,1
14 Saudi Arabia	284,1	196,2	159,1	355,3
15 Italia	122,2	128,0	129,4	257,4
Total 15 Negara	9 848,3	8 519,8	8 681,7	17 201,5
Negara Lainnya	2 229,0	1 947,2	1 480,7	3 427,9
Total Impor	12 077,3	10 467,0	10 162,4	20 629,4
Persentase Terhadap Total				
Total 15 Negara	81,54	81,40	85,43	83,38
Negara Lainnya	18,46	18,60	14,57	16,62

Tabel 4.8
Neraca Perdagangan Indonesia, Januari 2015–Februari 2016
 (miliar US\$)

Bulan	Ekspor			Impor			Neraca		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2015									
Februari	1,75	10,42	12,17	1,72	9,79	11,51	0,03	0,63	0,66
Maret	1,99	11,64	13,63	2,27	10,34	12,61	-0,28	1,30	1,02
April	1,46	11,65	13,11	2,34	10,29	12,63	-0,88	1,36	0,48
Mei	1,37	11,32	12,69	2,08	9,53	11,61	-0,71	1,79	1,08
Juni	1,44	12,07	13,51	2,58	10,40	12,98	-1,14	1,67	0,53
Juli	1,42	10,05	11,47	2,29	7,79	10,08	-0,87	2,26	1,39
Agustus	1,53	11,20	12,73	2,11	10,29	12,40	-0,58	0,91	0,33
September	1,46	11,13	12,59	1,91	9,65	11,56	-0,45	1,48	1,03
Oktober	1,38	10,74	12,12	1,76	9,35	11,11	-0,38	1,39	1,01
November	1,50	9,61	11,11	1,64	9,88	11,52	-0,14	-0,27	-0,41
Desember	1,30	10,62	11,92	1,80	10,28	12,08	-0,50	0,34	-0,16
Jan-Des	18,55	131,73	150,28	24,61	118,08	142,69	-6,05	13,64	7,59
2016									
Januari	1,11	9,37	10,48	1,22	9,25	10,47	-0,11	0,12	0,01
Februari	1,11	10,19	11,30	1,11	9,05	10,16	0,00	1,14	1,14
Jan-Feb	2,22	19,56	21,78	2,33	18,30	20,63	-0,11	1,26	1,15

Tabel 4.9
Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Februari 2016

Periode	Ekspor		Impor	
	Berat Bersih (kg)	Nilai FOB (US\$)	Berat Bersih (kg)	Nilai CIF (US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	2 585 718	1 191 376	472 664 654	246 002 090
Triwulan I	174 680	244 309	114 269 033	62 697 096
Triwulan II	561 014	425 064	129 548 175	64 587 922
Triwulan III	131 620	203 161	109 668 226	56 043 208
Triwulan IV	1 718 404	318 842	119 179 220	62 673 864
2014	516 069	759 928	844 163 741	388 178 457
Triwulan I	85 560	169 269	60 796 853	26 870 252
Triwulan II	161 455	264 660	115 480 643	49 336 490
Triwulan III	82 694	123 665	164 561 686	72 532 308
Triwulan IV	186 360	202 334	503 324 559	239 439 407
2015	519 497	630 391	861 601 001	351 602 090
Triwulan I	39 985	51 936	66 562 915	29 213 209
Triwulan II	160 770	206 334	127 866 410	55 705 088
Triwulan III	152 844	195 941	35 181 781	14 964 060
Triwulan IV	165 898	176 180	631 989 895	251 719 733
2016	619 653	249 690	678 695 311	276 810 415
Januari	94 653	59 179	382 546 178	155 676 867
Februari	525 000	190 511	296 179 133	121 133 548

V. KEPENDUDUKAN JUNI 2014

1. Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 252.164,8 ribu orang. Penduduk laki-laki sebanyak 126.715,2 ribu orang, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 125.449,6 ribu orang. Rasio Jenis Kelamin penduduk Indonesia sebesar 101, artinya diantara 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.

Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 252.164,8 ribu orang

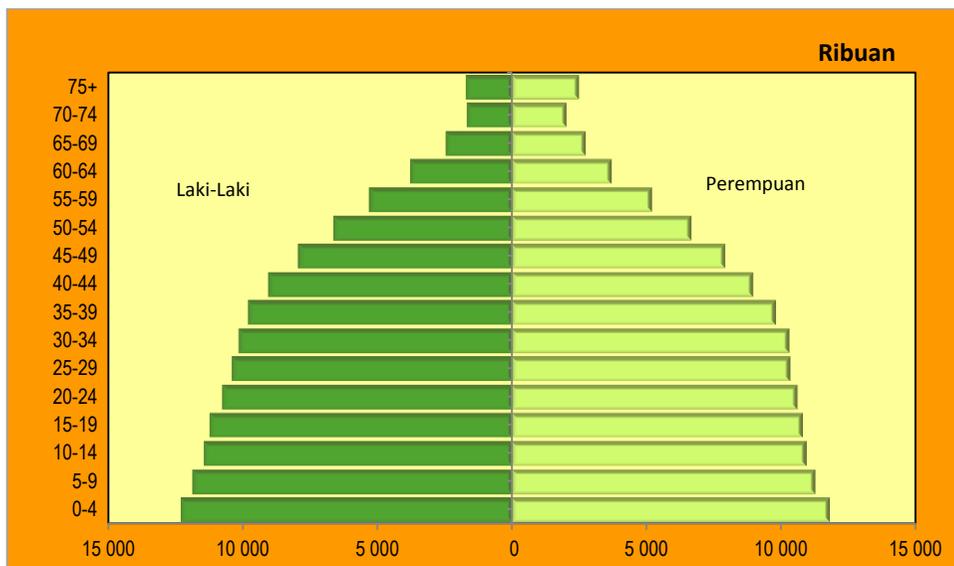
Tabel 5.1
Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014
(ribu orang)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	12 301,4	11 785,4	24 086,8
5-9	11 857,3	11 252,2	23 109,5
10-14	11 448,3	10 911,9	22 360,2
15-19	11 237,8	10 786,9	22 024,7
20-24	10 768,5	10 583,9	21 352,4
25-29	10 398,2	10 318,1	20 716,3
30-34	10 150,2	10 280,7	20 430,9
35-39	9 802,6	9 784,5	19 587,1
40-44	9 054,2	8 950,5	18 004,7
45-49	7 949,2	7 918,2	15 867,4
50-54	6 650,6	6 663,1	13 313,7
55-59	5 319,6	5 198,5	10 518,1
60-64	3 804,7	3 714,1	7 518,8
65-69	2 500,2	2 753,2	5 253,4
70-74	1 715,0	2 042,0	3 757,0
75+	1 757,4	2 506,4	4 263,8
Total	126 715,2	125 449,6	252 164,8

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

2. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2014 termasuk tipe *expansive*, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Grafik 5.1 menunjukkan piramida yang masih lebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah, sedangkan pada bagian atas meruncing.

Grafik 5.1
Piramida Penduduk Indonesia, 2014

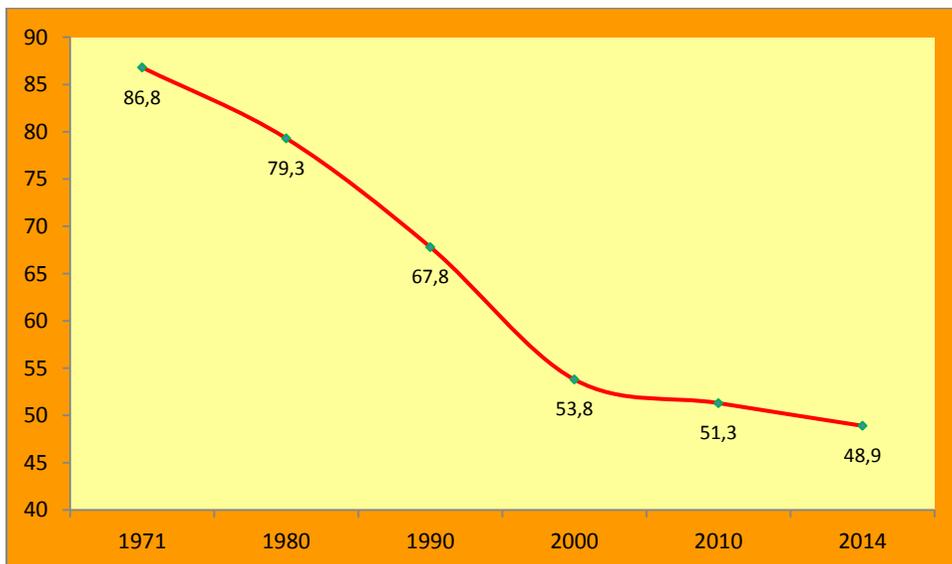


Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

3. Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971-2014. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara usia penduduk non produktif (penduduk 0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hasil proyeksi penduduk menunjukkan rasio ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 48,9. Angka ini mengandung makna bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung penduduk usia non produktif sekitar 48 - 49 orang. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rasio ketergantungan penduduk Indonesia memiliki tren yang menurun. Jika pada tahun 1971 rasio ketergantungan sebesar 86,8, maka pada tahun 2014 kondisinya semakin membaik dengan rasio ketergantungan sebesar 48,9. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki era bonus demografi, dimana kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan. Era bonus demografi akan mencapai puncaknya pada periode 2025-2030. Pulau dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Bali dan Nusa Tenggara (56,0), dan yang terendah Pulau Jawa (46,3). Tiga provinsi dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (67,5), Sulawesi Tenggara (61,0), dan

Maluku (60,4). Sedangkan tiga provinsi dengan rasio ketergantungan terendah adalah DKI Jakarta (39,3), Jawa Timur (44,5), dan Yogyakarta (45,1).

Grafik 5.2
Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2014



Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan
Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

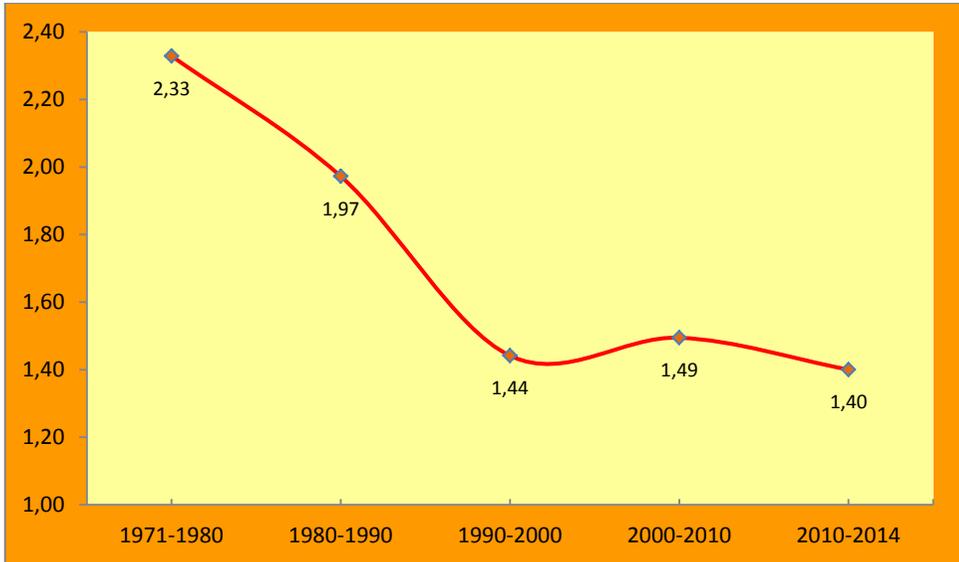
4. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2010-2014 sebesar 1,40 persen. Dibandingkan dengan periode 1971-1980 (2,33 persen), 1980-1990 (1,97 persen), 1990-2000 (1,44 persen), dan 2000-2010 (1,49 persen), maka laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2014 menunjukkan penurunan.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2010-2014 sebesar 1,40 persen

5. Pulau dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kalimantan, yaitu sebesar 2,09 persen. Lima pulau lainnya secara berurutan Maluku dan Papua (2,07 persen), Sumatera (1,70 persen), Bali dan Nusa Tenggara (1,46 persen), Sulawesi (1,45 persen) serta Jawa (1,17 persen). Menurut provinsi, empat provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Provinsi Kepulauan Riau (3,16 persen), Papua Barat (2,65 persen), Riau (2,64 persen) dan Kalimantan Timur (2,64 persen). Tiga provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terkecil

terdapat di Provinsi Jawa Timur (0,69 persen), Jawa Tengah (0,82 persen) dan DKI Jakarta (1,11 persen).

Grafik 5.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971-2014



Sumber : SP1971, SP1980, SP1990, SP2000, SP2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

6. Penduduk Indonesia sebagian besar berdomisili di Pulau Jawa, yaitu sebesar 56,9 persen. Kemudian, secara berturut-turut diikuti Pulau Sumatera (21,6 persen), Sulawesi (7,3 persen), Kalimantan (6,0 persen), Bali dan Nusa Tenggara (5,5 persen) serta Maluku dan Papua (2,7 persen). Menurut provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi dengan proporsi penduduk terbesar yaitu masing-masing 18,3 persen; 15,3 persen; dan 13,3 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan provinsi dengan proporsi penduduk terendah adalah Papua Barat, Gorontalo dan Maluku Utara yaitu masing-masing 0,3 persen; 0,4 persen dan 0,5 persen.
7. Kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 132 jiwa per km². Pulau Jawa merupakan pulau yang terpadat penduduknya (1.109 per km²), kemudian secara berurutan Pulau Bali dan Nusa Tenggara (190 per km²), Sumatera (113 per km²), Sulawesi (98 per km²), Kalimantan (28 per km²), dan yang paling jarang

**Kepadatan penduduk
Indonesia pada tahun 2014
sebesar 132 jiwa per km²**

penduduknya adalah Kepulauan Maluku dan Papua (14 per km²). Kepadatan penduduk menurut provinsi, terpadat di DKI Jakarta (15.173 per km²), Jawa Barat (1.301 per km²) dan Banten (1.211 per km²). Sedangkan tiga provinsi yang terjarang, yaitu Papua Barat (9 per km²), Papua (10 per km²) dan Kalimantan Tengah (16 per km²).

8. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua yaitu sebesar 108,0 sedangkan yang terendah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 97,7. Tiga provinsi dengan rasio jenis kelamin tertinggi yaitu Papua (111,9), Papua Barat (111,5) dan Kalimantan Timur (110,8) sedangkan yang terendah Nusa Tenggara Barat (94,2), Sulawesi Selatan (95,4) dan Jawa Timur (97,4).
9. Penduduk lanjut usia (lansia) merupakan penduduk yang berumur 60 tahun ke atas. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, lansia di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 8,2 persen. Penduduk lansia terbesar terdapat di Pulau Jawa (9,4 persen), kemudian berturut-turut Bali dan Nusa Tenggara (8,3 persen), Sulawesi (7,9 persen), Sumatera (6,5 persen), Kalimantan (5,8 persen) serta Maluku dan Papua (4,2 persen). Menurut provinsi, tiga provinsi dengan penduduk lansia terbesar adalah Yogyakarta (13,2 persen), Jawa Tengah (11,4 persen) dan Jawa Timur (11,2 persen), sedangkan yang terkecil adalah Papua (2,7 persen), Papua Barat (3,8 persen) dan Kepulauan Riau (3,8 persen).
10. Umur Harapan Hidup adalah kemungkinan umur yang akan dicapai seseorang dari sejak lahir. Hasil proyeksi penduduk tahun 2014 menunjukkan umur harapan hidup penduduk Indonesia sebesar 70,6 tahun. Tiga provinsi dengan umur harapan hidup tertinggi adalah Yogyakarta (74,5 tahun), Kalimantan Timur (73,7 tahun) dan Jawa Tengah (73,5 tahun). Sedangkan tiga provinsi dengan umur harapan hidup terendah adalah Sulawesi Barat (63,6 tahun), Papua (64,9 tahun) dan Nusa Tenggara Barat (65,1 tahun).

**Hasil proyeksi tahun 2014
menunjukkan umur harapan
hidup penduduk Indonesia
sebesar 70,6 tahun**

Tabel 5.2
Demografi Penduduk Indonesia, 2014

Provinsi	Penduduk (000)		Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2014 (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin	Rasio Ketergan- tungan	Penduduk Lansia (%)	Umur Harapan Hidup
	2010	2014	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Aceh	4 523	4 907	2,06	85	99,7	54,9	6,1	69,6
02. Sumatera Utara	13 029	13 767	1,39	189	99,6	56,6	6,5	68,2
03. Sumatera Barat	4 865	5 132	1,34	122	98,8	55,9	8,6	68,4
04. Riau	5 575	6 188	2,64	71	105,6	52,0	4,6	70,8
05. Kepulauan Riau	1 693	1 917	3,16	234	104,6	49,4	3,8	69,3
06. Jambi	3 108	3 344	1,85	67	104,2	47,9	6,2	70,5
07. Sumatera Selatan	7 482	7 942	1,50	87	103,3	49,9	6,8	69,0
08.Kep. Bangka Belitung	1 230	1 344	2,23	82	108,0	46,4	6,5	69,8
09. Bengkulu	1 722	1 845	1,74	93	104,1	48,4	6,3	68,5
10. Lampung	7 634	8 026	1,26	232	105,3	49,8	7,6	69,8
Sumatera	50 860	54 412	1,70	113	102,4	52,5	6,5	
11. DKI Jakarta	9 640	10 075	1,11	15 173	101,3	39,3	6,2	72,1
12. Jawa Barat	43 227	46 030	1,58	1 301	102,9	48,0	7,8	72,4
13. Banten	10 689	11 705	2,30	1 211	104,1	46,7	5,1	69,2
14. Jawa Tengah	32 444	33 523	0,82	1 022	98,4	48,4	11,4	73,5
15. Yogyakarta	3 468	3 637	1,20	1 161	97,7	45,1	13,2	74,5
16. Jawa Timur	37 566	38 610	0,69	808	97,4	44,5	11,2	70,5
Jawa	137 033	143 580	1,17	1 109	100,2	46,3	9,4	
17. Bali	3 907	4 105	1,24	710	101,4	46,0	10,1	71,3
18. Nusa Tenggara Barat	4 516	4 774	1,40	257	94,2	54,1	7,5	65,1
19. Nusa Tenggara Timur	4 706	5 037	1,71	103	98,2	67,5	7,4	66,0
Bali dan Nusa Tenggara	13 130	13 916	1,46	190	97,7	56,0	8,3	
20. Kalimantan Barat	4 411	4 716	1,68	32	103,9	51,1	6,6	69,9
21. Kalimantan Tengah	2 221	2 440	2,38	16	109,2	46,9	5,0	67,6
22. Kalimantan Selatan	3 643	3 923	1,87	101	102,7	48,8	6,3	67,6
23. Kalimantan Timur	3 576	3 970	2,64	19	110,8	46,7	4,9	73,7
Kalimantan	13 851	15 048	2,09	28	106,2	48,6	5,8	
24. Sulawesi Utara	2 278	2 387	1,17	172	104,2	46,7	9,4	71,0
25. Gorontalo	1 045	1 116	1,65	99	100,4	49,0	6,8	67,1
26. Sulawesi Tengah	2 646	2 831	1,71	46	104,5	50,7	7,1	67,3
27. Sulawesi Selatan	8 060	8 432	1,13	180	95,4	53,5	8,7	69,7
28. Sulawesi Barat	1 165	1 258	1,95	75	100,6	56,7	6,3	63,6
29. Sulawesi Tenggara	2 244	2 448	2,20	64	100,9	61,0	6,2	70,5
Sulawesi	17 437	18 472	1,45	98	99,2	53,0	7,9	
30. Maluku	1 542	1 657	1,82	35	101,8	60,4	6,5	65,1
31. Maluku Utara	1 043	1 139	2,21	36	104,3	59,2	5,3	67,4
32. Papua	2 857	3 091	1,99	10	111,9	48,5	2,7	64,9
33. Papua Barat	765	850	2,65	9	111,5	50,5	3,8	65,2
Maluku dan Papua	6 208	6 737	2,07	14	108,0	53,3	4,2	
Indonesia	238 519	252 165	1,40	132	101,0	48,9	8,2	70,6

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

VI. KETENAGAKERJAAN AGUSTUS 2015

A. Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2015

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2015 sebesar 6,18 persen meningkat dibanding TPT Februari 2015 (5,81 persen) dan meningkat dibandingkan TPT Agustus 2014 (5,94 persen).

Jumlah penganggur Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang

Tabel 6.1
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2013–2015
(juta orang)

Jenis kegiatan	2013 ¹⁾	2014 ²⁾		2015	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Angkatan Kerja	120,17	125,32	121,87	128,30	122,38
Bekerja	112,76	118,17	114,63	120,85	114,82
Penganggur	7,41	7,15	7,24	7,45	7,56
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,77	69,17	66,60	69,50	65,76
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,17	5,70	5,94	5,81	6,18
4. Pekerja tidak penuh	37,74	36,97	35,77	35,68	34,31
Setengah penganggur	11,00	10,57	9,68	10,04	9,74
Paruh waktu	26,74	26,40	26,09	25,64	24,57
Bekerja di bawah 15 jam perminggu	8,85	7,28	6,69	7,54	6,46

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

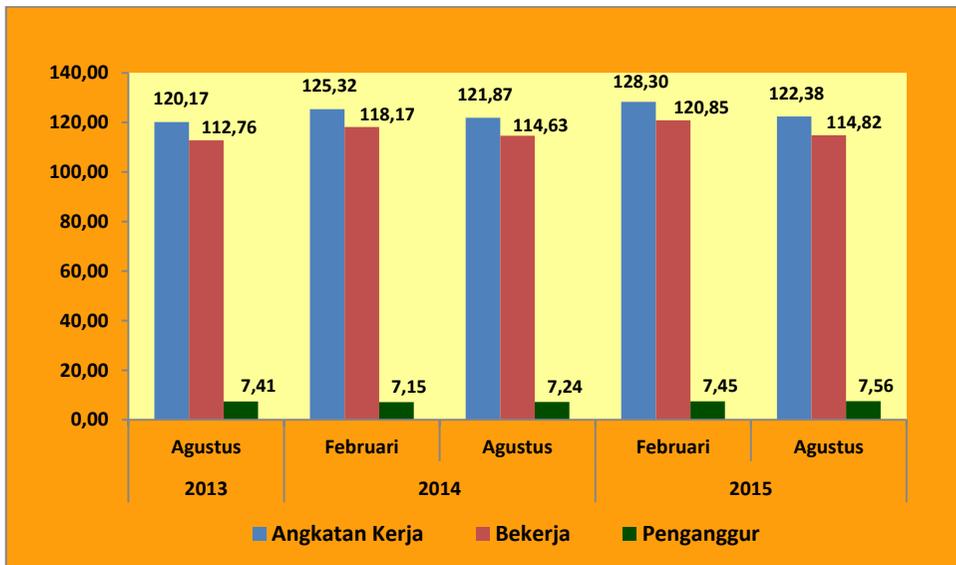
²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia pada Agustus 2015 sebesar 65,76 persen mengalami penurunan sebesar 3,74 persen jika dibandingkan dengan TPAK Februari 2015 sebesar 69,50 persen.
3. Pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) pada Agustus 2015 sebanyak 34,31 juta orang (29,88 persen) mengalami penurunan dibanding Februari 2015 sebanyak 35,68 juta orang (29,52 persen).
4. Penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu pada Agustus 2015 mencapai 6,46 juta orang (5,63 persen), mengalami penurunan jika dibandingkan Februari 2015 sebanyak 7,54 juta orang (6,24 persen).
5. Pada Agustus 2015 terdapat 9,74 juta orang (8,48 persen) penduduk bekerja berstatus setengah penganggur, yaitu mereka yang bekerja tidak penuh dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

B. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Pengangguran

1. Angkatan kerja Indonesia pada Agustus 2015 sebanyak 122,4 juta orang, berkurang sebanyak 5,9 juta orang dibanding Februari 2015 dan bertambah sebanyak 510 ribu orang dibanding Agustus 2014.

Grafik 6.1
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur
2013–2015 (juta orang)



2. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2015 sebanyak 114,8 juta orang, berkurang 6,0 juta orang dibanding keadaan Februari 2015 dan bertambah 190 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2014.
3. Jumlah penganggur pada Agustus 2015 mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 110 ribu orang dibanding Februari 2015 dan 320 ribu orang jika dibanding Agustus 2014.

C. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

1. Struktur lapangan pekerjaan hingga Agustus 2015 tidak mengalami perubahan, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa Kemasyarakatan, dan Sektor Industri masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014, penduduk bekerja meningkat terutama pada Sektor Konstruksi sebanyak 930 ribu orang (12,77 persen), Sektor Perdagangan sebanyak 850 ribu orang (3,42 persen), dan Sektor Keuangan sebanyak 240 ribu orang (7,92 persen). Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian sebanyak 1,2 juta orang (3,13 persen), Sektor Jasa Kemasyarakatan/Perorangan sebanyak 480 ribu orang (2,61 persen), dan Sektor Lainnya sebanyak 120 ribu orang (6,94 persen).

Tabel 6.2
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
2013–2015 (juta orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	2013 ¹⁾	2014 ²⁾		2015	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	39,22	40,83	38,97	40,12	37,75
2. Industri	14,96	15,39	15,26	16,38	15,25
3. Konstruksi	6,35	7,21	7,28	7,72	8,21
4. Perdagangan	24,10	25,81	24,83	26,65	25,68
5. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5,10	5,33	5,11	5,19	5,11
6. Keuangan	2,90	3,19	3,03	3,65	3,27
7. Jasa Kemasyarakatan/perorangan	18,45	18,48	18,42	19,41	17,94
8. Lainnya ³⁾	1,68	1,93	1,73	1,73	1,61
Jumlah	112,76	118,17	114,63	120,85	114,82

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

³⁾ Lapangan pekerjaan utama pada Sektor Lainnya terdiri dari: Sektor Pertambangan dan Sektor Listrik, Gas, dan Air

D. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

1. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan kategori buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2015 sebanyak 48,5 juta orang (42,24 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 66,3 juta orang (57,76 persen) bekerja pada kegiatan informal.
2. Dalam setahun terakhir (Agustus 2014–Agustus 2015), penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar berkurang 110 ribu orang sedangkan penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai bertambah sebanyak 2,0 juta orang. Keadaan ini menyebabkan jumlah pekerja formal bertambah sekitar 1,9 juta orang dan persentase pekerja formal naik dari 40,62 persen pada Agustus 2014 menjadi 42,24 persen pada Agustus 2015.
3. Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Dalam setahun terakhir (Agustus 2014–Agustus 2015), pekerja informal berkurang sebanyak 1,8 juta orang, dan persentase pekerja informal berkurang dari 59,38 persen pada

Agustus 2014 menjadi 57,76 persen pada Agustus 2015. Pekerja informal yang tidak mengalami penurunan adalah mereka yang bekerja dengan status pekerja bebas baik di pertanian maupun di nonpertanian.

Tabel 6.3
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2013–2015 (juta orang)

Status Pekerjaan Utama	2013 ¹⁾		2014 ²⁾		2015	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Berusaha sendiri	19,21	20,32	20,49	21,65	19,53	
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	19,34	19,74	19,27	18,80	18,19	
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3,86	4,14	4,18	4,21	4,07	
4. Buruh/Karyawan/pegawai	41,12	43,35	42,38	46,62	44,43	
6. Pekerja bebas di pertanian	5,20	4,74	5,09	5,08	5,09	
7. Pekerja bebas di nonpertanian	6,06	6,75	6,41	6,80	7,45	
8. Pekerja keluarga/tak dibayar	17,97	19,13	16,81	17,69	16,06	
Jumlah	112,76	118,17	114,63	120,85	114,82	

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

E. Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan

1. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2015 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 50,8 juta orang (44,27 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 20,7 juta (18,03 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 12,6 juta orang mencakup 3,1 juta orang (2,68 persen) berpendidikan Diploma dan sebanyak 9,5 juta orang (8,33 persen) berpendidikan Universitas.

Tabel 6.4
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (juta orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2013 ¹⁾		2014 ²⁾		2015	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. SD ke bawah	53,81	55,31	53,96	54,61	50,83	
2. Sekolah Menengah Pertama	20,56	21,06	20,35	21,47	20,70	
3. Sekolah Menengah Atas	17,88	18,91	18,58	19,81	19,81	
4. Sekolah Menengah Kejuruan	9,97	10,91	10,52	11,80	10,84	
5. Diploma I/II/III	2,93	3,13	2,96	3,14	3,08	
6. Universitas	7,61	8,85	8,26	10,02	9,56	
Jumlah	112,76	118,17	114,63	120,85	114,82	

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

- Perbaikan kualitas penduduk bekerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas). Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan rendah menurun dari 74,3 juta orang (64,83 persen) pada Agustus 2014 menjadi 71,5 juta orang (62,30 persen) pada Agustus 2015. Sementara penduduk bekerja berpendidikan tinggi meningkat dari 11,2 juta orang (9,79 persen) pada Agustus 2014 menjadi 12,6 juta orang (11,01 persen) pada Agustus 2015.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan

- Jumlah pengangguran pada Agustus 2015 mencapai 7,6 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan dari 5,81 persen pada Februari 2015 menjadi 6,18 persen pada Agustus 2015.
- Pada Agustus 2015, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 12,65 persen, disusul oleh TPT Sekolah Menengah Atas sebesar 10,32 persen, sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,74 persen.
- Jika dibandingkan keadaan Agustus 2014, TPT yang mengalami penurunan hanya terjadi pada tingkat pendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama.

Tabel 6.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (1)	2013 ¹⁾		2014 ²⁾		2015	
	Agustus (2)	Februari (3)	Agustus (4)	Februari (5)	Agustus (6)	
1. SD ke bawah	3,44	3,69	3,04	3,61	2,74	
2. Sekolah Menengah Pertama	7,59	7,44	7,15	7,14	6,22	
3. Sekolah Menengah Atas	9,72	9,10	9,55	8,17	10,32	
4. Sekolah Menengah Kejuruan	11,21	7,21	11,24	9,05	12,65	
5. Diploma I/II/III	5,95	5,87	6,14	7,49	7,54	
6. Universitas	5,39	4,31	5,65	5,34	6,40	
Jumlah	6,17	5,70	5,94	5,81	6,18	

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

G. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi

1. Pada Agustus 2015, TPT tertinggi terjadi di Provinsi Maluku dan Provinsi Aceh masing-masing sebesar 9,93 persen sedangkan TPT terendah terjadi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Barat masing-masing sebesar 1,99 persen dan 3,35 persen.
2. Dibanding Februari 2015, penurunan terbesar untuk persentase tingkat pengangguran terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dengan tingkat penurunan sebesar 2,85 persen, sedangkan yang mengalami peningkatan terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat dengan peningkatan sebesar 3,21 persen.

Tabel 6.6
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi
2014–2015

Provinsi	2014 ¹⁾		2015			
	Agustus		Februari		Agustus	
	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	191,5	9,02	174,7	7,73	216,8	9,93
Sumatera Utara	390,7	6,23	421,2	6,39	428,8	6,71
Sumatera Barat	151,7	6,50	148,7	5,99	161,6	6,89
Riau	176,8	6,56	199,8	6,72	217,1	7,83
Jambi	79,8	5,08	46,2	2,73	70,3	4,34
Sumatera Selatan	192,9	4,96	202,2	5,03	238,9	6,07
Bengkulu	31,3	3,47	31,3	3,21	46,7	4,91
Lampung	184,8	4,79	139,5	3,44	196,9	5,14
Kep. Bangka Belitung	32,7	5,14	23,2	3,35	41,9	6,29
Kepulauan Riau	58,8	6,69	81,0	9,05	55,3	6,20
DKI Jakarta	429,1	8,47	463,9	8,36	368,2	7,23
Jawa Barat	1 775,2	8,45	1 875,9	8,40	1 794,9	8,72
Jawa Tengah	996,3	5,68	970,6	5,31	863,8	4,99
DI Yogyakarta	67,4	3,33	85,5	4,07	80,2	4,07
Jawa Timur	843,5	4,19	892,0	4,31	906,9	4,47
Banten	484,1	9,07	488,9	8,58	509,4	9,55
Bali	44,1	1,90	33,6	1,37	47,2	1,99
Nusa Tenggara Barat	127,7	5,75	120,1	4,98	128,4	5,69
Nusa Tenggara Timur	73,2	3,26	75,1	3,12	88,4	3,83
Kalimantan Barat	93,7	4,04	113,2	4,78	121,3	5,15
Kalimantan Tengah	38,7	3,24	40,4	3,14	57,8	4,54
Kalimantan Selatan	73,8	3,80	100,0	4,83	97,7	4,92
Kalimantan Timur	133,7	7,38	118,2	7,17	115,5	7,50
Kalimantan Utara	-	-	16,6	5,79	16,1	5,68
Sulawesi Utara	80,0	7,54	102,6	8,69	99,2	9,03
Sulawesi Tengah	49,4	3,68	42,6	2,99	56,8	4,10
Sulawesi Selatan	188,8	5,08	218,3	5,81	220,6	5,95
Sulawesi Tenggara	48,1	4,43	42,3	3,62	63,1	5,55
Gorontalo	20,9	4,18	16,3	3,06	24,1	4,65
Sulawesi Barat	12,6	2,08	11,7	1,81	20,6	3,35
Maluku	70,7	10,51	47,8	6,72	72,2	9,93
Maluku Utara	25,5	5,29	28,8	5,56	31,1	6,05
Papua Barat	20,0	5,02	18,8	4,61	33,4	8,08
Papua	57,7	3,44	63,6	3,72	69,5	3,99
Indonesia	7 244,9	5,94	7 454,8	5,81	7 560,8	6,18

¹⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

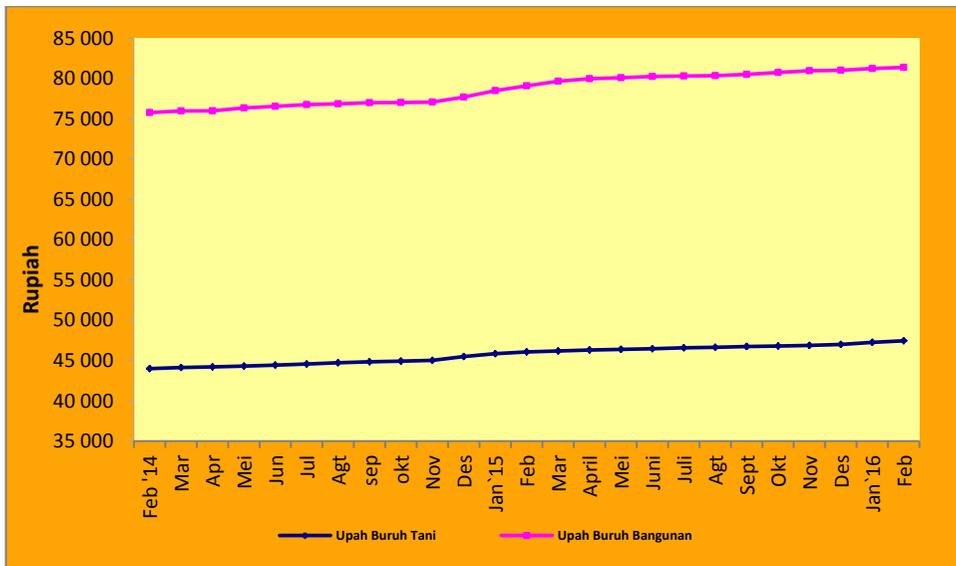
VII. UPAH BURUH FEBRUARI 2016

1. Upah Harian Buruh Tani

Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Februari 2016 naik sebesar 0,41 persen dibanding upah buruh tani bulan sebelumnya, yaitu dari Rp47.241,00 menjadi Rp47.437,00. Secara riil naik sebesar 0,33 persen, yaitu dari Rp37.372,00 menjadi Rp37.494,00.

Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Februari 2016 sebesar Rp47.437,00, naik 0,41 persen

Grafik 7.1
Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan
Februari 2014–Februari 2016



2. Upah Buruh Bangunan

Pada Februari 2016, rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) naik sebesar 0,18 persen dibanding upah nominal Januari 2016, yaitu dari Rp81.221,00 menjadi Rp81.367,00, sedangkan upah riil naik sebesar 0,27 persen, yaitu dari Rp65.702,00 menjadi Rp65.879,00.

Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan pada periode Februari 2016 sebesar Rp81.367,00, naik 0,18 persen

Tabel 7.1
Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah)
Februari 2014–Februari 2015

Bulan	Upah Buruh Tani (harian)		Upah Buruh Bangunan (harian)	
	Nominal	Riil ¹⁾	Nominal	Riil ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Februari 2014	43 992	39 372	75 772	68 091
Maret	44 125	39 416	75 961	68 206
April	44 212	39 514	75 987	68 242
Mei	44 314	39 516	76 326	68 436
Juni	44 430	39 330	76 535	68 328
Juli	44 569	39 134	76 756	67 896
Agustus	44 717	39 119	76 854	67 665
September	44 833	39 045	76 991	67 601
Oktober	44 924	38 955	77 011	67 305
November	45 026	38 466	77 056	66 348
Desember	45 491	37 839	77 682	65 279
Januari 2015	45 846	38 144	78 484	66 114
Februari	46 059	38 605	79 083	66 861
Maret	46 180	38 522	79 657	67 233
April	46 306	38 546	79 970	67 253
Mei	46 386	38 383	80 087	67 019
Juni	46 458	38 130	80 237	66 786
Juli	46 572	37 887	80 293	66 216
Agustus	46 629	37 757	80 342	66 000
September	46 739	37 855	80 494	66 158
Oktober	46 800	37 918	80 744	66 418
November	46 881	37 822	80 946	66 447
Desember	46 995	37 486	81 002	65 861
Januari 2016	47 241	37 372	81 221	65 702
Februari	47 437	37 494	81 367	65 879

Catatan: ¹⁾ Upah riil = upah nominal/indeks konsumsi rumah tangga perdesaan, mulai Desember 2013 menggunakan tahun dasar (2012=100)

²⁾ Upah riil = upah nominal/IHK umum perkotaan menggunakan tahun dasar (2012=100)

VIII. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN MARET 2016

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

1. NTP Maret 2016 tercatat 101,32 atau turun sebesar 0,89 persen dibanding NTP Februari 2016 sebesar 102,23. Penurunan NTP bulan ini disebabkan turunnya NTP di empat subsektor yaitu Tanaman Pangan sebesar 2,54 persen, Tanaman Perkebunan Rakyat 0,08 persen, Peternakan 0,55 persen dan Perikanan 0,70 persen, sebaliknya Subsektor Tanaman Hortikultura naik sebesar 0,58 persen.

**NTP Maret 2016 turun
sebesar 0,89 persen**

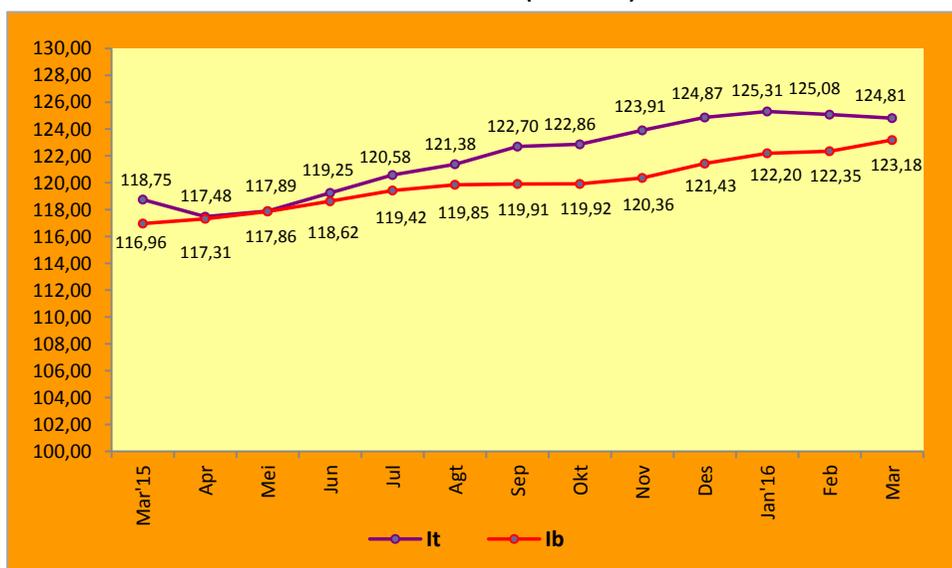
Grafik 8.1
Nilai Tukar Petani (NTP), Maret 2015–Maret 2016 (2012=100)



2. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada Maret 2016 turun 0,22 persen bila dibanding It pada Februari 2016, yaitu dari 125,08 menjadi 124,81. Penurunan indeks tersebut disebabkan turunnya It di tiga subsektor, yaitu Tanaman Pangan (1,71 persen), Peternakan (0,17 persen), dan Perikanan (0,09 persen). Sebaliknya, Subsektor Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat naik masing-masing sebesar 1,32 persen dan 0,61 persen.

3. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) pada Maret 2016 naik sebesar 0,68 persen dibanding Ib Februari 2016. Kenaikan indeks ini disebabkan naiknya indeks kelompok Konsumsi Rumah Tangga dan indeks kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal masing-masing sebesar 0,95 persen dan 0,12 persen.

Grafik 8.2
Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)
Maret 2015–Maret 2016 (2012=100)



4. NTP Tanaman Pangan (NTPP) pada Maret 2016 turun sebesar 2,54 persen dibanding NTPP Februari 2016. Penurunan NTPP disebabkan It Tanaman Pangan turun (1,71 persen), sebaliknya Ib Tanaman Pangan naik (0,85 persen). NTP Tanaman Hortikultura (NTPH) naik sebesar 0,58 persen. Hal ini disebabkan kenaikan It Tanaman Hortikultura (1,32 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Hortikultura (0,74 persen). NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) turun sebesar 0,08 persen. Hal ini disebabkan kenaikan It Tanaman Perkebunan Rakyat (0,61 persen) lebih kecil dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Perkebunan Rakyat (0,69 persen). NTP Peternakan (NTPT) turun sebesar 0,55 persen disebabkan It Peternakan turun (0,17 persen), sebaliknya Ib Peternakan naik (0,38 persen). NTP Perikanan (NTNP) turun 0,70 persen disebabkan It Perikanan turun (0,09 persen), sebaliknya Ib Perikanan naik (0,61 persen).

Tabel 8.1
Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100)

Subsektor	Februari 2016	Maret 2016	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Gabungan/Nasional			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,23	101,32	-0,89
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	125,08	124,81	-0,22
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	122,35	123,18	0,68
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	126,52	127,72	0,95
- Indeks BPPBM	114,03	114,16	0,12
Gabungan/Nasional tanpa Perikanan			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,19	101,28	-0,89
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	125,06	124,79	-0,22
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	122,38	123,21	0,68
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	126,50	127,70	0,95
- Indeks BPPBM	114,06	114,19	0,11
1. Tanaman Pangan			
a. Nilai Tukar Petani (NTPP)	103,31	100,69	-2,54
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	128,80	126,60	-1,71
- Padi	125,75	123,32	-1,93
- Palawija	135,84	134,48	-1,00
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	124,67	125,73	0,85
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	126,90	128,24	1,06
- Indeks BPPBM	117,68	117,93	0,22
2. Tanaman Hortikultura			
a. Nilai Tukar Petani (NTPH)	101,95	102,54	0,58
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	125,73	127,39	1,32
- Sayur-sayuran	122,79	125,60	2,29
- Buah-buahan	128,24	129,01	0,60
- Tanaman Obat	120,83	121,79	0,79
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	123,32	124,23	0,74
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	126,53	127,68	0,91
- Indeks BPPBM	113,53	113,77	0,21
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Nilai Tukar Petani (NTPR)	96,21	96,14	-0,08
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	118,06	118,79	0,61
- Tanaman Perkebunan Rakyat	118,06	118,79	0,61
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	122,71	123,56	0,69
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	125,79	126,85	0,85
- Indeks BPPBM	113,15	113,33	0,16

Subsektor	Februari 2016	Maret 2016	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
4. Peternakan			
a. Nilai Tukar Petani (NTPT)	106,97	106,38	-0,55
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	126,43	126,22	-0,17
- Ternak Besar	128,22	128,12	-0,07
- Ternak Kecil	123,25	123,11	-0,11
- Unggas	123,99	123,71	-0,22
- Hasil Ternak	121,88	121,27	-0,50
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	118,19	118,65	0,38
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	126,69	127,91	0,96
- Indeks BPPBM	110,56	110,39	-0,16
5. Perikanan			
a. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	102,82	102,10	-0,70
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan pembudidaya ikan (It)	124,76	124,64	-0,09
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)	121,34	122,08	0,61
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	126,58	127,71	0,89
- Indeks BPPBM	112,55	112,69	0,13
5.1. Perikanan Tangkap			
a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,37	106,67	-0,65
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It)	130,09	129,80	-0,22
- Penangkapan Perairan Umum	129,92	128,91	-0,78
- Penangkapan Laut	129,83	129,58	-0,19
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	121,16	121,69	0,43
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	125,92	126,73	0,64
- Indeks BPPBM	113,72	113,86	0,12
5.2. Perikanan Budidaya			
a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	99,58	98,85	-0,74
b. Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya Ikan (It)	120,95	120,96	0,01
- Budidaya Air Tawar	120,93	120,87	-0,05
- Budidaya Laut	114,66	114,86	0,18
- Budidaya Air Payau	119,26	119,38	0,10
c. Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya Ikan (Ib)	121,46	122,37	0,75
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	127,08	128,44	1,07
- Indeks BPPBM	111,68	111,83	0,14

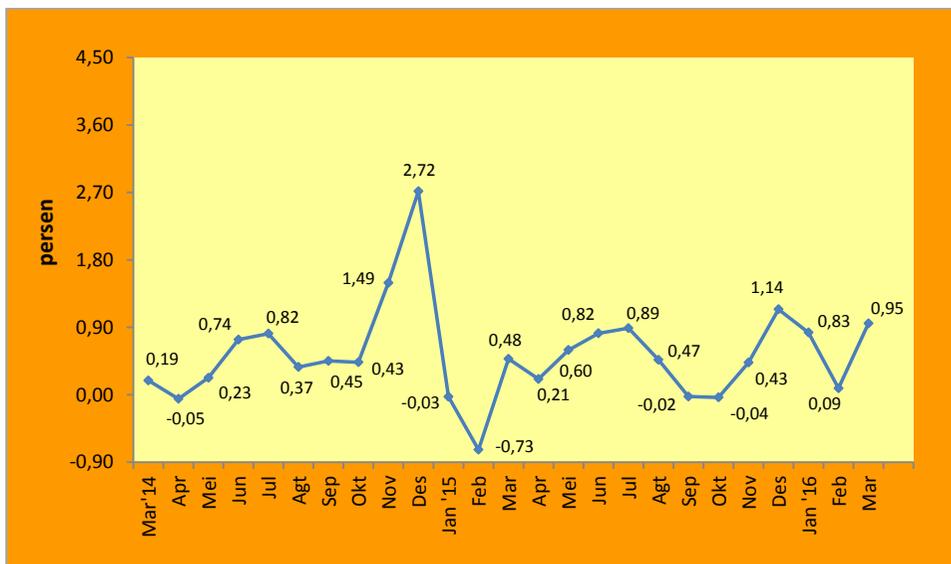
BPPBM = Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal

B. Inflasi Perdesaan

1. Pada Maret 2016 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,95 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 127,72. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di semua provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,82 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Aceh dan Sulawesi Barat sebesar 0,05 persen.

Pada Maret 2016 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,95 persen

Grafik 8.3
Inflasi Perdesaan, Maret 2014–Maret 2016



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga pada Maret 2016, terjadi kenaikan indeks harga di semua kelompok pengeluaran, yaitu: Bahan Makanan 1,88 persen; Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau 0,48 persen; Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 0,18 persen; Sandang 0,25 persen; Kesehatan 0,29 persen; Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 0,09 persen, serta Transportasi dan Komunikasi sebesar 0,03 persen.
3. Inflasi perdesaan Maret 2016 sebesar 0,95 persen dipicu oleh naiknya harga komoditas bawang merah, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan tomat sayur.

Tabel 8.2
Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran
Maret 2014–Maret 2016

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi dan Komunikasi	Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Maret 2014	0,02	0,39	0,35	0,39	0,39	0,21	0,22	0,19
April	-0,48	0,27	0,28	0,21	0,36	0,11	0,09	-0,05
Mei	0,20	0,30	0,31	0,23	0,30	0,11	0,12	0,23
Juni	1,32	0,39	0,33	0,43	0,28	0,19	0,20	0,74
Juli	1,24	0,45	0,41	1,72	0,31	0,81	0,18	0,82
Agustus	0,48	0,36	0,26	0,17	0,33	0,27	0,22	0,37
September	0,48	0,51	0,61	0,08	0,38	0,22	0,33	0,45
Oktober	0,59	0,32	0,47	0,22	0,34	0,25	0,24	0,43
November	1,79	0,47	0,61	0,37	0,59	0,20	4,39	1,49
Desember	3,29	1,10	1,32	1,08	0,80	0,27	7,07	2,72
Januari 2015	0,52	0,88	1,18	0,70	0,83	0,42	-5,22	-0,03
Februari	-1,41	0,44	0,40	0,35	0,48	0,21	-2,68	-0,73
Maret	0,33	0,48	0,46	0,25	0,42	0,13	1,31	0,48
April	-0,68	0,60	0,52	0,38	0,43	0,18	2,24	0,21
Mei	0,97	0,46	0,31	0,38	0,26	0,08	0,30	0,60
Juni	1,35	0,70	0,36	0,53	0,23	0,30	0,15	0,82
Juli	1,52	0,38	0,28	1,65	0,31	0,56	0,24	0,89
Agustus	0,83	0,29	0,15	0,12	0,21	0,42	0,11	0,47
September	-0,40	0,26	0,26	0,25	0,26	0,25	0,17	-0,02
Oktober	-0,43	0,44	0,14	0,15	0,23	0,20	0,09	-0,04
November	0,62	0,47	0,28	0,18	0,21	0,18	0,13	0,43
Desember	2,22	0,61	0,26	0,21	0,22	0,13	0,14	1,14
Januari 2016	1,60	0,93	0,40	0,39	0,53	0,33	-1,28	0,83
Februari	-0,10	0,50	0,10	0,29	0,28	0,13	-0,16	0,09
Maret	1,88	0,48	0,18	0,25	0,29	0,09	0,03	0,95

4. Tingkat inflasi perdesaan tahun kalender 2016 (Maret 2016 terhadap Desember 2015) adalah sebesar 1,88 persen dan tingkat inflasi perdesaan *year-on-year* (Maret 2016 terhadap Maret 2015) adalah sebesar 6,54 persen.

Tabel 8.3
Tingkat Inflasi Perdesaan Maret 2016, Tahun Kalender dan *Year on Year* 2016
Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)

Kelompok Pengeluaran	Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)			Inflasi Perdesaan Maret 2016	Tingkat Inflasi Perdesaan 2016	
	Maret 2015	Desember 2015	Maret 2016		Tahun Kalender	<i>Year- on- Year</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	119,88	125,37	127,72	0,95	1,88	6,54
1. Bahan Makanan	126,18	133,89	138,44	1,88	3,40	9,72
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	115,35	120,28	122,59	0,48	1,92	6,28
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	115,90	118,91	119,73	0,18	0,69	3,30
4. Sandang	114,48	118,95	120,06	0,25	0,93	4,87
5. Kesehatan	112,52	115,22	116,48	0,29	1,10	3,52
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	110,29	112,86	113,48	0,09	0,55	2,90
7. Transportasi dan Komunikasi	119,98	124,29	122,56	0,03	-1,40	2,15

C. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

1. Pada Maret 2016 terjadi penurunan NTUP sebesar 0,33 persen. Hal ini karena terjadi It turun (0,22 persen), sebaliknya indeks BPPBM naik (0,12 persen). Penurunan NTUP disebabkan oleh turunnya tiga subsektor penyusun NTUP yaitu Tanaman Pangan (1,92 persen), Peternakan (0,01 persen) dan Perikanan (0,22 persen). Sebaliknya, NTUP Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat naik masing-masing sebesar 1,11 persen dan 0,45 persen.
2. Dari 33 provinsi yang dihitung NTUP-nya, 17 provinsi mengalami penurunan dan 16 provinsi mengalami kenaikan. Kenaikan NTUP tertinggi pada Maret 2016 terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 1,37 persen, sebaliknya penurunan NTUP terbesar terjadi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 1,26 persen.

Tabel 8.4
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya,
Maret 2016 (2012=100)

Subsektor	Februari 2016	Maret 2016	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan	109,45	107,35	-1,92
2. Tanaman Hortikultura	110,74	111,97	1,11
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	104,34	104,81	0,45
4. Peternakan	114,35	114,34	-0,01
5. Perikanan	110,85	110,60	0,22
a. Tangkap	114,39	114,00	-0,34
b. Budidaya	108,30	108,16	-0,13
Nasional	109,69	109,33	-0,33

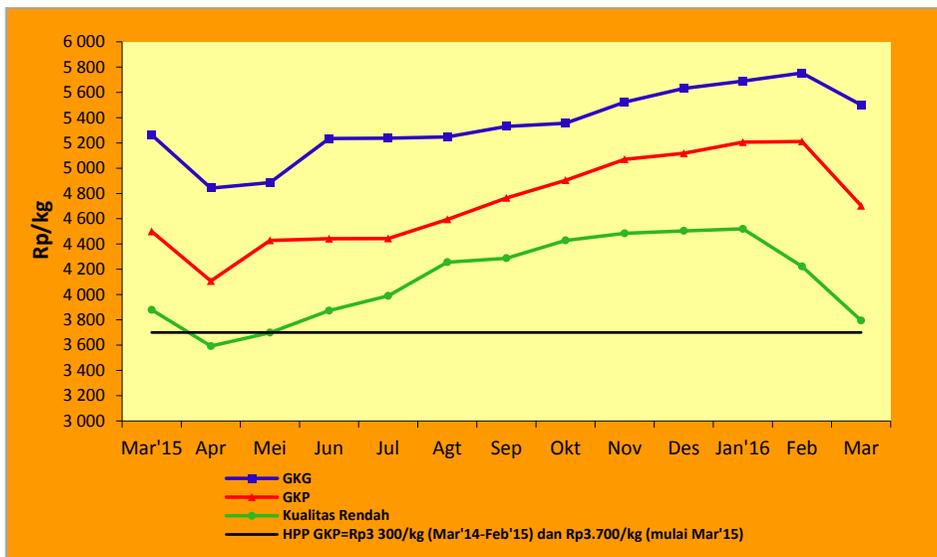
IX. HARGA PANGAN MARET 2016

A. Harga Gabah dan Beras di Penggilingan

- Selama Maret 2016, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di petani turun 9,76 persen menjadi Rp4.703,00 per kg dan di penggilingan turun 9,72 persen menjadi Rp4.783,00 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Rata-rata harga GKP di petani Maret 2016 sebesar Rp4.703,00 per kg turun 9,76 persen

Grafik 9.1
Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas Maret 2015–Maret 2016



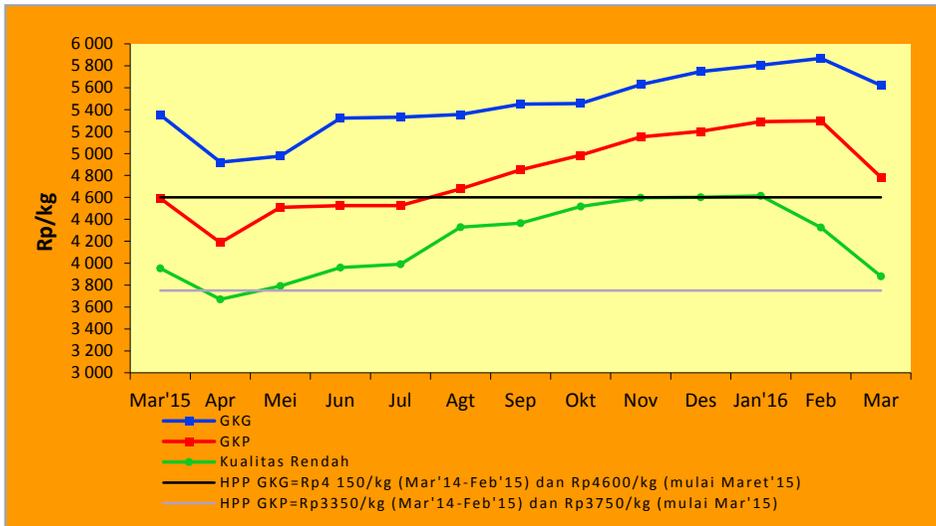
- Pada bulan yang sama, harga tertinggi di tingkat petani Rp8.800,00 per kg dan di tingkat penggilingan Rp8.850,00 per kg. Sedangkan harga terendah di tingkat petani dan penggilingan masing-masing Rp2.700,00 per kg dan Rp2.770,00 per kg. Harga tertinggi di tingkat petani dan penggilingan berasal dari GKP varietas Siam Mayang yang terjadi di Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah). Sementara itu, harga terendah di tingkat petani dan penggilingan berasal dari gabah kualitas rendah varietas Ciharang yang terjadi di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban (Jawa Timur).

Tabel 9.1
Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air
serta Perubahannya, Maret 2015–Maret 2016

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2015 Mar	19,66	4 500	-8,59	12,67	5 264	-1,74	26,07	3 879	-7,79
Apr	19,32	4 107	-8,74	12,61	4 843	-8,00	26,35	3 592	-7,39
Mei	18,03	4 428	7,83	12,63	4 886	0,89	25,56	3 699	2,96
Jun	18,18	4 442	0,30	12,69	5 235	7,14	25,09	3 873	4,71
Jul	18,53	4 444	0,05	12,70	5 238	0,06	25,23	3 902	0,76
Agt	18,54	4 595	3,40	12,20	5 248	0,19	24,91	4 256	9,06
Sep	18,47	4 765	3,70	12,56	5 330	1,57	25,22	4 287	0,74
Okt	18,22	4 905	2,93	12,54	5 356	0,48	25,13	4 428	3,29
Nov	18,36	5 070	3,38	12,33	5 524	3,13	28,57	4 485	1,28
Des	18,38	5 118	0,93	12,66	5 632	1,96	26,48	4 504	0,43
2016 Jan	17,81	5 206	1,72	12,23	5 689	1,02	26,09	4 520	0,35
Feb	18,01	5 211	0,10	12,64	5 753	1,13	25,78	4 223	-6,57
Mar	19,33	4 703	-9,76	12,72	5 501	-4,39	26,24	3 794	-10,15
Perubahan (%)									
Mar'16 thd Mar'15			4,51			4,50			-2,19

- Rata-rata harga GKG di petani selama Maret 2016 turun 4,39 persen menjadi Rp5.501,00 per kg, sedangkan di penggilingan turun 4,20 persen menjadi Rp5.622,00 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama bulan lalu. Demikian juga harga gabah kualitas rendah di petani dan penggilingan mengalami penurunan masing-masing 10,15 persen menjadi Rp3.794,00 per kg dan 10,28 persen menjadi Rp3.881,00 per kg.
- Selama periode Maret 2015–Maret 2016, rata-rata harga tertinggi di tingkat petani untuk GKP dan GKG, masing-masing Rp5.211,00 per kg dan Rp5.753,00 per kg terjadi pada Februari 2016, sedangkan gabah kualitas rendah Rp4.520,00 per kg terjadi pada Januari 2016. Sebaliknya, rata-rata harga terendah pada GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp4.107,00 per kg, Rp4.843,00 per kg, dan Rp3.592,00 per kg terjadi pada April 2015.

Grafik 9.2
Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas
Maret 2015–Maret 2016



5. Pada periode Maret 2015–Maret 2016, di tingkat penggilingan, rata-rata harga tertinggi untuk GKP dan GKG, masing-masing Rp5.298,00 per kg dan Rp5.869,00 per kg terjadi pada Februari 2016, sedangkan gabah kualitas rendah Rp4.614,00 per kg terjadi pada Januari 2016. Untuk rata-rata harga terendah pada GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp4.187,00 per kg, Rp4.920,00 per kg, dan Rp3.670,00 per kg terjadi pada April 2015.
6. Dibandingkan Maret 2015, rata-rata harga di tingkat petani pada Maret 2016 untuk kualitas GKP dan GKG mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,51 persen dan 4,50 persen, sebaliknya rata-rata harga gabah kualitas rendah mengalami penurunan 2,19 persen. Di tingkat penggilingan pada Maret 2016 untuk rata-rata harga kualitas GKP dan GKG mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,20 persen dan 5,04 persen, sebaliknya rata-rata harga gabah kualitas rendah mengalami penurunan 1,82 persen.
7. Berdasarkan 1.257 observasi pada transaksi penjualan gabah di 23 provinsi selama Maret 2016, masih didominasi transaksi penjualan GKP sebanyak 791 observasi (62,93 persen), gabah kualitas rendah sebanyak 354 observasi (28,16 persen), dan GKG sebanyak 112 observasi (8,91 persen). Dari sejumlah observasi tersebut, terdapat 11,00 persen kasus harga GKP di tingkat petani di bawah HPP. Sementara di tingkat penggilingan terdapat 10,63 persen kasus harga GKP dan GKG di bawah HPP.

Tabel 9.2
Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air
serta Perubahannya, Maret 2015–Maret 2016

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2015 Mar	19,66	4 590	-8,32	12,67	5 352	-1,95	26,07	3 953	-8,22
Apr	19,32	4 187	-8,78	12,61	4 920	-8,07	26,35	3 670	-7,17
Mei	18,03	4 509	7,69	12,63	4 976	1,13	25,56	3 791	3,31
Jun	18,18	4 525	0,35	12,69	5 322	6,97	25,09	3 960	4,43
Jul	18,53	4 525	0,01	12,70	5 331	0,17	25,23	3 990	0,77
Agt	18,54	4 677	3,35	12,20	5 356	0,46	24,91	4 329	8,49
Sep	18,47	4 852	3,73	12,56	5 450	1,76	25,22	4 365	0,84
Okt	18,22	4 984	2,73	12,54	5 457	0,12	25,13	4 518	3,49
Nov	18,36	5 151	3,36	12,33	5 629	3,15	28,57	4 597	1,75
Des	18,38	5 202	0,98	12,66	5 748	2,12	26,48	4 601	0,09
2016 Jan	17,81	5 291	1,71	12,23	5 805	1,00	26,09	4 614	0,29
Feb	18,01	5 298	0,14	12,64	5 869	1,09	25,78	4 325	-6,26
Mar	19,33	4 783	-9,72	12,72	5 622	-4,20	26,24	3 881	-10,28
Perubahan (%)									
Mar'16 thd Mar'15			4,20			5,04			-1,82

8. Pada bulan Maret 2016 rata-rata harga beras kualitas premium di tingkat penggilingan sebesar Rp9.572,00 per kg turun sebesar 2,18 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata harga beras kualitas medium di tingkat penggilingan sebesar Rp9.444,00 per kg turun sebesar 1,84 persen. Sedangkan rata-rata harga beras kualitas rendah di tingkat penggilingan sebesar Rp8.995,00 per kg turun sebesar 2,17 persen.
- Pada Maret 2016 rata-rata harga beras Medium di Penggilingan sebesar Rp9.444,00 per kg, turun 1,84 persen**
9. Dibandingkan dengan Maret 2015, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada bulan Maret 2016 untuk kualitas premium naik 1,19 persen, kualitas medium naik 1,57 persen dan kualitas rendah naik 1,58 persen.

Tabel 9.3
Rata-Rata Harga Beras di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah (*Broken*), Maret 2015–Maret 2016

Tahun/ Bulan	Premium			Medium			Rendah		
	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>) (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>) (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2015 Mar	9 459	1,08	7,12	9 298	0,50	15,55	8 855	0,20	23,65
Apr	8 794	-7,03	7,08	8 598	-7,53	15,57	8 251	-6,83	23,38
Mei	8 710	-0,96	7,22	8 520	-0,90	15,62	8 061	-2,29	23,25
Jun	8 915	2,36	7,55	8 606	1,00	15,48	8 121	0,73	24,03
Jul	8 945	0,33	7,28	8 648	0,49	16,00	8 308	2,30	23,34
Agt	9 127	2,03	7,51	8 741	1,07	15,56	8 725	5,02	23,55
Sep	9 444	3,48	7,48	8 940	2,27	15,32	8 906	2,08	23,37
Okt	9 455	0,12	7,34	8 961	0,24	15,56	8 917	0,12	22,91
Nov	9 564	1,16	7,46	9 272	3,47	15,29	9 032	1,29	22,85
Des	9 664	1,04	7,54	9 451	1,93	15,40	9 203	1,90	23,04
2016 Jan	9 723	0,62	7,17	9 548	1,03	15,29	9 280	0,84	23,52
Feb	9 785	0,63	7,17	9 622	0,77	15,41	9 195	-0,93	23,61
Mar	9 572	-2,18	7,33	9 444	-1,84	15,37	8 995	-2,17	23,39
Perubahan (%) Mar'16 thd Mar'15		1,19			1,57			1,58	

*Keterangan: Premium: Maksimum beras patah (*Broken*) s.d. 10%
Medium: Beras patah (*Broken*) 10,1% - 20%
Rendah: Beras patah (*Broken*) 20,1% - 25%*

B. Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok

1. Secara nasional, rata-rata harga beras pada Maret 2016 turun 0,56 persen dibanding Februari 2016. Dibandingkan Maret 2015, harga beras naik 1,62 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 4,45 persen. Artinya, pemilik beras (pedagang, petani, konsumen, BULOG, dan industri berbahan baku beras) mengalami penurunan nilai riil sebesar 2,83 persen. Penurunan tertinggi terjadi di Pare-Pare (7 persen) dan Sumenep (6 persen).

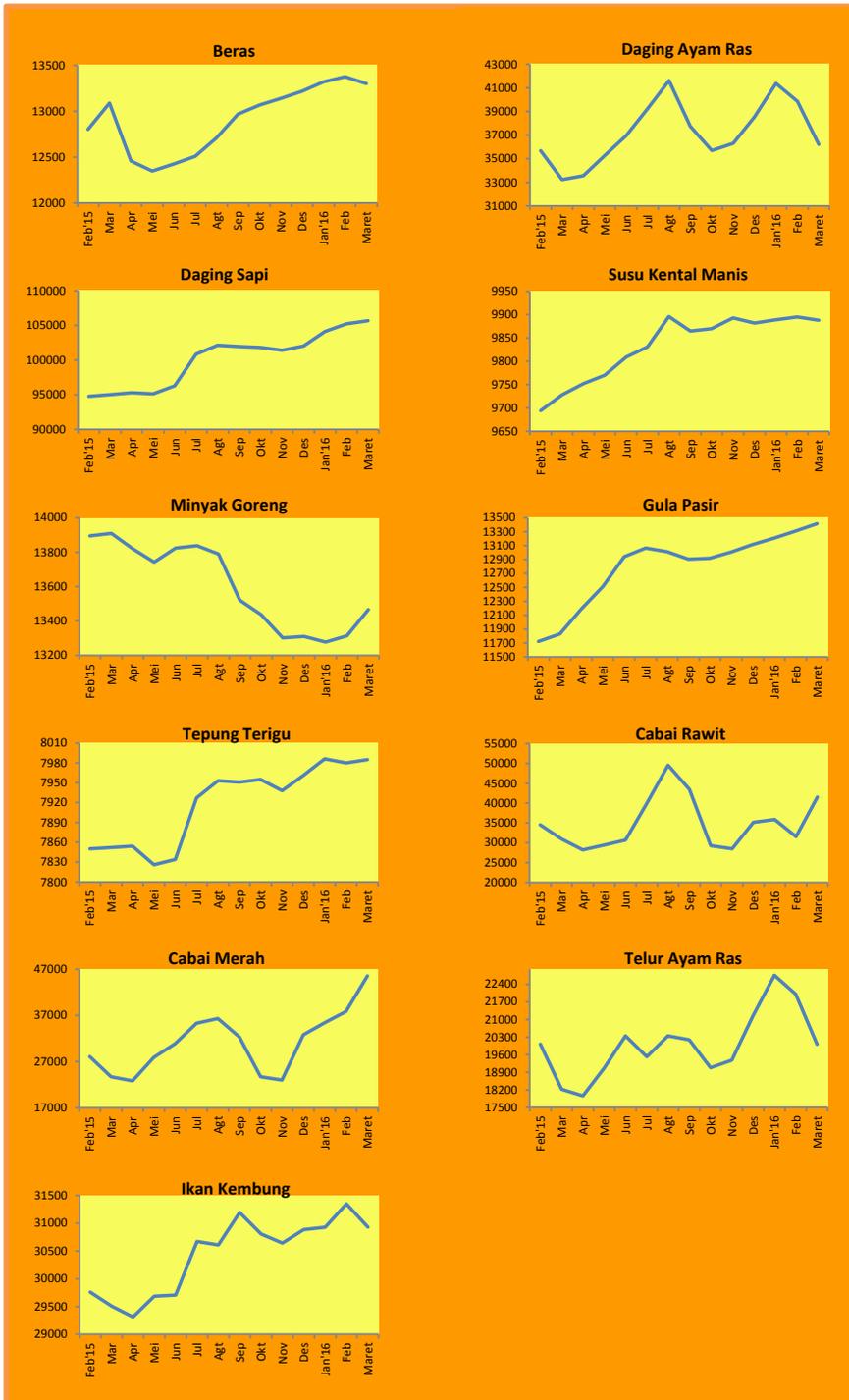
Rata-rata harga beras Maret 2016 sebesar Rp13.301 per kg, turun 0,56 persen

2. Harga cabai rawit naik 31,52 persen dibanding Februari 2016 atau naik 34,11 dibanding Maret 2015. Kenaikan tertinggi terjadi di Sumenep (145 persen) dan Kediri (134 persen). Harga cabai merah naik 20,37 persen dibanding Februari 2016 atau naik 91,90 persen dibanding Maret 2015. Kenaikan tertinggi terjadi di Tanjung (84 persen) dan Manokwari (78 persen). Harga minyak goreng naik sebesar 1,15 persen dibanding Februari 2016 atau turun 3,19 persen dibanding Maret 2015. Kenaikan tertinggi terjadi di Tanjung Pinang (6 persen) dan Surakarta, Purwokerto, dan Pontianak (masing-masing sebesar 4 persen). Harga daging ayam ras turun 9,18 persen dibanding Februari 2016 atau naik 8,94 persen dibanding Maret 2015. Penurunan tertinggi terjadi di Pare-Pare (29 persen) dan Banyuwangi (20 persen). Harga telur ayam ras turun 9,08 persen dibanding Februari 2016 atau naik 9,79 persen dibanding Maret 2015. Penurunan tertinggi terjadi di Kediri (19 persen) dan Banyuwangi (17 persen). Harga ikan kembung turun 1,33 persen dibanding Februari 2016 atau naik 4,82 persen dibanding Maret 2015. Penurunan tertinggi terjadi di Tanjung Pandan (25 persen) dan Meulaboh (11 persen).
3. Komoditas lain seperti gula pasir, daging sapi, tepung terigu, dan susu kental manis perubahannya relatif rendah.

Tabel 9.4
Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok
Maret 2015–Maret 2016 (rupiah)

Bulan	Beras (kg)	Daging Ayam Ras (kg)	Daging Sapi (kg)	Susu Kental Manis (385 gram)	Minyak Goreng (liter)	Gula Pasir (kg)	Tepung Terigu (kg)	Cabai Rawit (kg)	Cabai Merah (kg)	Telur Ayam Ras (kg)	Ikan Kembung (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Maret'15	13 089	33 231	95 033	9 728	13 910	11 831	7 852	30 947	23 738	18 225	29 510
April	12 458	33 570	95 299	9 752	13 820	12 188	7 854	28 202	22 850	17 964	29 312
Mei	12 348	35 279	95 137	9 770	13 743	12 509	7 826	29 432	27 927	19 065	29 687
Juni	12 425	36 944	96 279	9 809	13 824	12 941	7 834	30 698	30 884	20 350	29 708
Juli	12 509	39 231	100 862	9 831	13 838	13 065	7 927	39 957	35 319	19 512	30 671
Agustus	12 709	41 616	102 143	9 896	13 790	13 013	7 953	49 551	36 333	20 345	30 610
September	12 968	37 742	101 959	9 865	13 521	12 906	7 951	43 471	32 344	20 194	31 195
Oktober	13 067	35 693	101 826	9 870	13 436	12 918	7 955	29 282	23 740	19 079	30 805
November	13 139	36 296	101 409	9 893	13 302	13 008	7 938	28 465	23 028	19 379	30 642
Desember	13 217	38 550	102 038	9 882	13 310	13 116	7 961	35 157	32 831	21 156	30 884
Januari'16	13 319	41 372	104 120	9 889	13 277	13 208	7 986	35 881	35 412	22 760	30 927
Februari	13 376	39 862	105 224	9 895	13 313	13 310	7 980	31 557	37 845	22 007	31 348
Maret	13 301	36 203	105 676	9 888	13 466	13 415	7 985	41 504	45 554	20 009	30 931
Maret'16 thd Februari'16	-0,56	-9,18	0,43	-0,07	1,15	0,79	0,06	31,52	20,37	-9,08	-1,33
Maret'16 thd Maret'15	1,62	8,94	11,20	1,64	-3,19	13,39	1,69	34,11	91,90	9,79	4,82
(dalam persen)											

Grafik 9.3
Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok
Februari 2015–Maret 2016 (rupiah)



X. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN IV-2015 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR MARET 2016

A. INDEKS HARGA PRODUSEN

Indeks Harga Produsen (IHP) gabungan dari Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan pada triwulan IV-2015 sebesar 128,07. Pada triwulan IV-2015, IHP gabungan tersebut mengalami

Pada triwulan IV-2015 terjadi inflasi harga produsen sebesar 0,29 persen

kenaikan sebesar 0,29 persen dibandingkan IHP triwulan III-2015 sebesar 127,71 (*q-to-q*). IHP Sektor Pertanian dan IHP Sektor Industri Pengolahan naik masing-masing sebesar 2,06 persen dan 0,47 persen, sebaliknya IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar 5,10 persen. Adapun IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan IV-2015 sebesar 124,18 naik 0,16 persen dibandingkan IHP triwulan III-2015 sebesar 123,99 (*q-to-q*). Perubahan IHP triwulan IV-2015 terhadap triwulan IV-2014 (*y-on-y*) sebesar 1,82 persen, yaitu dari 125,79 pada triwulan IV-2014 menjadi 128,07 pada triwulan IV-2015. Kenaikan indeks tersebut disebabkan oleh naiknya indeks atau inflasi harga produsen pada Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan, masing-masing sebesar 4,45 persen dan 4,07 persen. Sebaliknya Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami deflasi (*y-on-y*) sebesar 17,75 persen. IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan IV-2015 terhadap triwulan IV-2014 (*y-on-y*) mengalami kenaikan sebesar 1,01 persen, yaitu dari 122,94 pada triwulan IV-2014 menjadi 124,18 pada triwulan IV-2015.

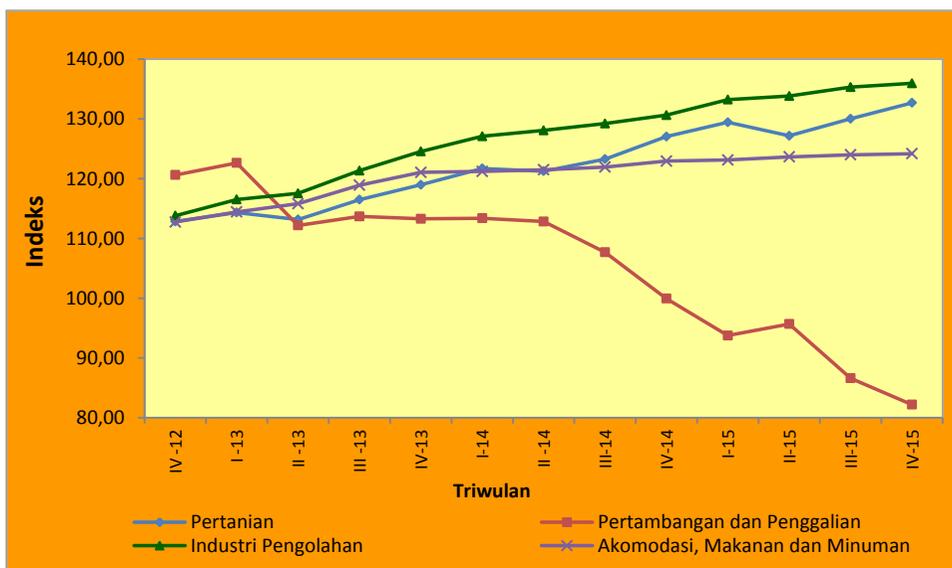
Tabel 10.1
Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor
Triwulan IV-2015

Sektor	IHP Triw IV- 2014	IHP Triw III- 2015	IHP Triw IV- 2015	Inflasi Harga Produsen (q-to-q) ¹⁾ (%)		Inflasi Harga Produsen (y-on-y) ²⁾ (%)	
				Triw III- 2015 (5)	Triw IV- 2015 (6)	Triw IV- 2014 (7)	Triw IV- 2015 (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gabungan (1+2+3)	125,79	127,71	128,07	0,28	0,29	3,18	1,82
1. Pertanian	127,04	130,02	132,69	2,24	2,06	6,78	4,45
2. Pertambangan dan Penggalian	99,94	86,62	82,20	-9,47	-5,10	-11,77	-17,75
3. Industri Pengolahan	130,64	135,32	135,95	1,12	0,47	4,89	4,07
4. Akomodasi, Makanan dan Minuman	122,94	123,99	124,18	0,27	0,16	1,56	1,01

Keterangan: ¹⁾ Inflasi Produsen (q-to-q) adalah persentase perubahan IHP triwulan t terhadap triwulan t-1

²⁾ Inflasi Produsen (y-on-y) adalah persentase perubahan IHP triwulan t-2015 terhadap triwulan t-2014

Grafik 10.1
Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor
Triwulan IV-2012 s.d. Triwulan IV-2015



1. Sektor Pertanian

IHP Sektor Pertanian pada triwulan IV-2015 naik 2,06 persen (*q-to-q*), yaitu dari 130,02 pada triwulan III-2015 menjadi 132,69 pada triwulan IV-2015. Tiga subsektor pada Sektor Pertanian mengalami inflasi tinggi, diantaranya adalah Subsektor Tanaman Bahan Makanan (5,53 persen), Subsektor Kehutanan (0,28 persen), dan Subsektor Perikanan (0,03 persen). Sedangkan Subsektor Perkebunan mengalami deflasi sebesar 2,50 persen. Apabila dibandingkan dengan triwulan IV-2014, Sektor Pertanian pada triwulan IV-2015 mengalami inflasi harga produsen (*y-on-y*) sebesar 4,45 persen, yaitu dari 127,04 pada triwulan IV-2014 menjadi 132,69 pada triwulan IV-2015. Subsektor Tanaman Bahan Makanan merupakan penyebab utama kenaikan IHP pada periode tersebut yaitu sebesar 7,31 persen, diikuti oleh Subsektor Kehutanan sebesar 7,27 persen dan Subsektor Peternakan sebesar 4,93 persen.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan IV-2015 sebesar 82,20 mengalami penurunan sebesar 5,10 persen dibandingkan IHP pada triwulan sebelumnya sebesar 86,62 (*q-to-q*). Deflasi harga produsen pada sektor ini dipengaruhi oleh turunnya IHP pada Subsektor Pertambangan sebesar 6,79 persen. Sedangkan Subsektor Penggalian naik sebesar 0,15 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian triwulan IV-2015 terhadap triwulan IV-2014 (*y-on-y*) mengalami penurunan sebesar 17,75 persen, yaitu dari 99,94 pada triwulan IV-2014 menjadi 82,20 pada triwulan IV-2015. Deflasi harga produsen (*y-on-y*) pada Sektor Pertambangan dan Penggalian dipengaruhi oleh turunnya IHP Subsektor Pertambangan sebesar 23,38 persen.

3. Sektor Industri Pengolahan

Pada triwulan IV-2015, IHP Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan sebesar 0,47 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 135,32 pada triwulan III-2015 menjadi 135,95 pada triwulan IV-2015 (*q-to-q*). Tiga subsektor pada Sektor Industri Pengolahan yang mengalami inflasi tinggi adalah Subsektor Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak (3,16 persen); Subsektor Industri Pemintalan dan Pertenunan Tekstil (1,13 persen); dan Subsektor Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan Cetakan (1,03 persen). Sedangkan untuk subsektor yang mengalami deflasi antara lain Subsektor Industri Karet, Plastik dan Hasil-hasilnya (1,72 persen); Subsektor Industri Pupuk (1,35 persen); dan Subsektor Pengilangan Minyak Bumi dan Gas (0,93 persen). Dibandingkan triwulan IV-2014,

IHP Sektor Industri Pengolahan pada triwulan IV-2015 (*y-on-y*) mengalami kenaikan (4,07 persen) dari 130,64 menjadi 135,95. Penyebab kenaikan IHP terutama terjadi pada Subsektor Industri Penggilingan Padi, Tepung, dan Pakan Ternak (10,34 persen); Subsektor Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak (6,65 persen); dan Subsektor Industri Pemintalan dan Pertenunan Tekstil (5,81 persen). Sedangkan untuk subsektor yang mengalami deflasi adalah Subsektor Pengilangan Minyak Bumi dan Gas mengalami penurunan sebesar 2,39 persen dan Subsektor Industri Logam Dasar sebesar 1,22 persen.

4. Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman

IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman pada triwulan IV-2015 sebesar 124,18 mengalami kenaikan 0,16 persen dibandingkan IHP pada triwulan sebelumnya yang sebesar 123,99 (*q-to-q*). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan IHP Subsektor Akomodasi dan Subsektor Makanan dan Minuman masing-masing sebesar 0,23 persen dan 0,14 persen. IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan IV-2015 terhadap triwulan IV-2014 (*y-on-y*) naik sebesar 1,01 persen, yaitu dari 122,94 menjadi 124,18. Hal ini diakibatkan oleh Inflasi Harga Produsen Subsektor Makanan dan Minuman dan Subsektor Akomodasi masing-masing sebesar 1,07 persen dan 0,67 persen.

Tabel 10.2
Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor
Triwulan IV-2015

Sektor/Subsektor	IHP Triw IV- 2014	IHP Triw III- 2015	IHP Triw IV- 2015	Inflasi Harga Produsen (q-to-q) ¹⁾ (%)		Inflasi Harga Produsen (y-on-y) ²⁾ (%)	
				Triw III- 2015	Triw IV- 2015	Triw IV- 2014	Triw IV- 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian	127,04	130,02	132,69	2,24	2,06	6,78	4,45
1. Tanaman Bahan Makanan	134,95	137,23	144,82	3,73	5,53	8,49	7,31
2. Perkebunan	119,47	118,14	115,18	-1,54	-2,50	4,47	-3,59
3. Peternakan	119,97	125,99	125,89	3,02	-0,08	4,95	4,93
4. Perikanan	121,64	126,50	126,54	1,90	0,03	6,85	4,02
5. Kehutanan	130,93	140,06	140,45	1,23	0,28	5,21	7,27
Pertambangan dan Penggalian	99,94	86,62	82,20	-9,47	-5,10	-11,77	-17,75
1. Pertambangan	94,51	77,69	72,41	-12,22	-6,79	-15,60	-23,38
2. Penggalian	128,96	134,29	134,49	0,24	0,15	7,27	4,29
Industri Pengolahan	130,64	135,32	135,95	1,12	0,47	4,89	4,07
1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-Buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak	132,48	140,15	141,29	1,71	0,81	2,93	6,65
2. Industri Susu dan Makanan Dari Susu	111,50	116,06	116,33	0,47	0,23	4,02	4,34
3. Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak	136,33	145,81	150,43	4,36	3,16	7,94	10,34
4. Industri Makanan Lainnya	124,80	129,46	130,34	0,88	0,67	5,83	4,43
5. Industri Minuman dan Rokok	129,98	136,31	137,21	1,12	0,66	6,52	5,56
6. Industri Pemintalan dan Pertenuunan Tekstil	123,87	129,61	131,07	1,87	1,13	2,21	5,81
7. Industri Pakaian Jadi dan Alas Kaki	146,28	152,34	152,88	1,31	0,36	5,00	4,51
8. Industri Kayu Gergajian dan Olahan	154,20	158,15	159,06	1,14	0,57	5,87	3,15
9. Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Cetakan	131,10	131,55	132,90	-1,27	1,03	12,83	1,37
10. Industri Pupuk	128,64	132,36	130,58	4,99	-1,35	2,97	1,51
11. Industri Kimia Dasar, Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	139,34	145,22	144,65	0,48	-0,39	11,15	3,81
12. Pengilangan Minyak Bumi dan Gas	130,20	128,28	127,09	-1,04	-0,93	-1,90	-2,39
13. Industri Karet, Plastik, dan Hasil-Hasilnya	113,17	116,16	114,16	0,87	-1,72	1,97	0,87
14. Industri Barang Mineral Bukan Logam	140,85	140,53	141,15	-0,47	0,44	8,49	0,22
15. Industri Logam Dasar	112,47	111,68	111,10	-2,33	-0,52	5,00	-1,22
16. Industri Barang-Barang dari Logam	116,46	119,20	119,00	-0,03	-0,16	4,29	2,19
17. Industri Mesin, Listrik, Elektronik, dan Perlengkapannya	131,27	137,49	137,63	1,53	0,10	4,67	4,85
18. Industri Alat Angkutan	126,55	129,82	130,86	0,96	0,80	3,46	3,40
19. Industri Perabot Rumah Tangga dan Barang Lainnya	140,73	146,69	147,71	0,92	0,69	4,07	4,96
Akomodasi, Makanan dan Minuman	122,94	123,99	124,18	0,27	0,16	1,56	1,01
1. Akomodasi	139,29	138,89	139,21	0,40	0,23	-0,28	0,67
2. Makanan dan Minuman	120,69	121,80	121,98	0,25	0,14	1,87	1,07

Keterangan: ¹⁾ Inflasi Produsen (q-to-q) adalah persentase perubahan IHP triwulan t terhadap triwulan t-1

²⁾ Inflasi Produsen (y-on-y) adalah persentase perubahan IHP triwulan t-2015 terhadap triwulan t-2014

B. INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR (IHPB)

1. Pada Maret 2016, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum tanpa impor migas dan ekspor migas naik sebesar 2,02 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada Sektor Pertanian, yaitu 11,16 persen dan terendah pada Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,33 persen.

Pada Maret 2016 IHPB tanpa impor migas dan ekspor migas naik sebesar 2,02 persen

Pada Februari 2016 IHPB Umum turun sebesar 0,69 persen dibandingkan IHPB Umum bulan sebelumnya. Penurunan IHPB terbesar terjadi pada Kelompok Barang Impor sebesar 2,49 persen dan yang terkecil adalah Sektor Industri sebesar 0,36 persen. Kelompok Barang Ekspor turun 1,89 persen, Sektor Pertambangan dan Penggalian turun 0,67 persen, sedangkan sektor Pertanian naik 1,43 persen.

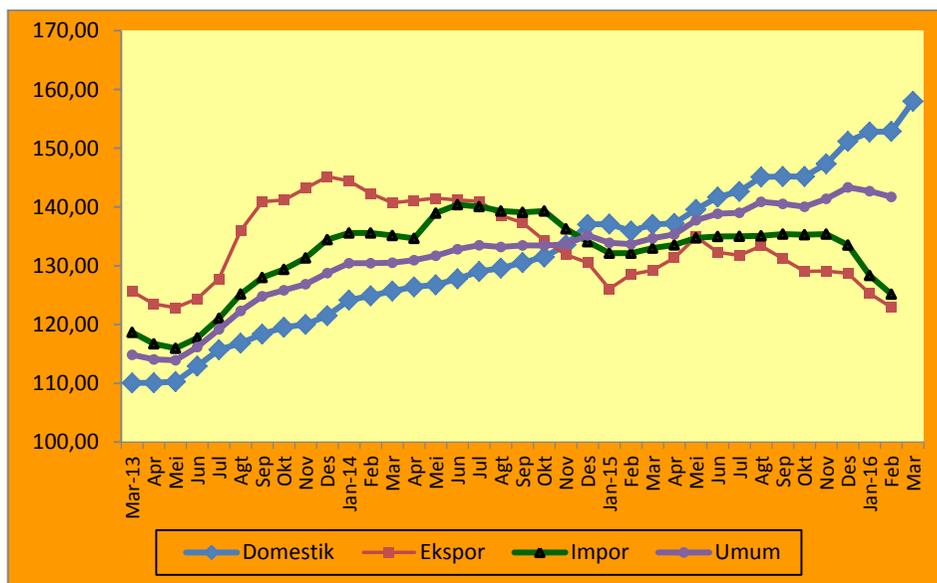
Tabel 10.3
Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia
Januari 2016–Maret 2016, (2010=100)

Sektor/Kelompok	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	Perubahan	
				Februari 2016 terhadap Januari 2016 (%)	Maret 2016 terhadap Februari 2016 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	311,56	316,03	351,30	1,43	11,16
2. Pertambangan dan Penggalian	119,30	118,50	118,89	-0,67	0,33
3. Industri	131,31	130,85	131,74	-0,36	0,68
Domestik	152,76	152,88	157,97	0,08	3,33
4. Impor Nonmigas	133,23	133,21	132,83	-0,02	-0,29
Impor	128,36	125,17		-2,49	
5. Ekspor Nonmigas	140,44	139,37	137,12	-0,76	-1,61
Ekspor	125,29	122,93		-1,89	
Umum Nonmigas	147,63	147,52	150,50	-0,07	2,02
Umum	142,70	141,71		-0,69	

Tabel 10.4
Tingkat Inflasi Perdagangan Besar Maret 2016 (2010=100)

Sektor/Kelompok	IHPB				Perubahan Maret terhadap Februari 2016	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar	
	Maret 2015	Desember 2015	Februari 2016	Maret 2016		Tahun Kalender 2016	Year- on- Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	204,45	303,63	316,03	351,30	11,16	15,70	71,82
2. Pertambangan dan Penggalian	120,26	119,17	118,50	118,89	0,33	-0,24	-1,15
3. Industri	128,13	130,55	130,85	131,74	0,68	0,91	2,82
4. Impor Nonmigas	128,54	132,86	133,21	132,83	-0,29	-0,03	3,33
5. Ekspor Nonmigas	135,42	138,38	139,37	137,12	-1,61	-0,91	1,26
Umum Nonmigas	135,46	146,14	147,52	150,50	2,02	2,99	11,10

Grafik 10.2
Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia
Maret 2013–Maret 2016



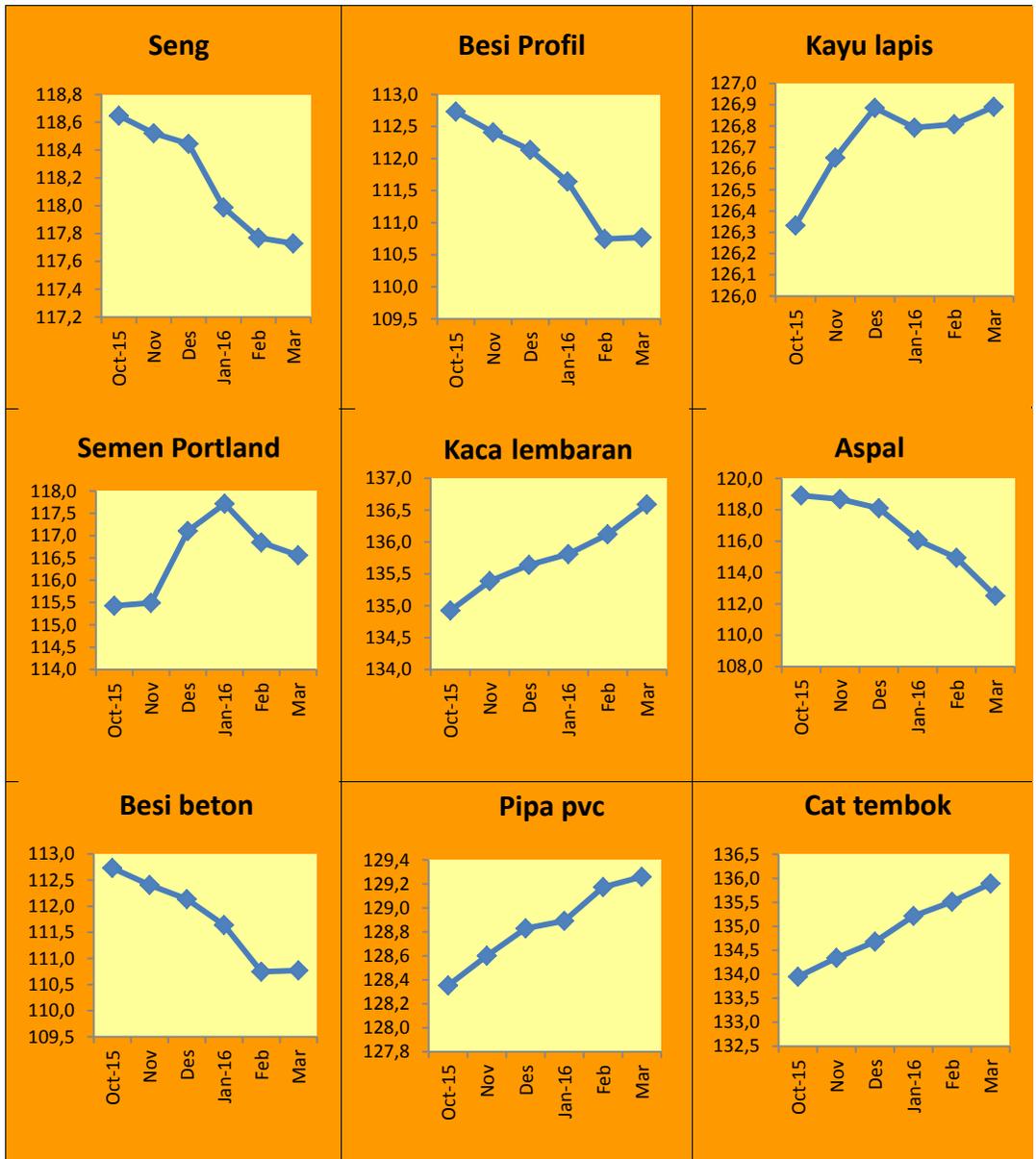
2. IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi yang terdiri dari lima jenis bangunan/konstruksi pada Maret 2016 turun sebesar 0,02 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan indeks terbesar terjadi pada jenis Bangunan Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan sebesar 0,11 persen.

Tabel 10.5
Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia Maret 2016
Menurut Jenis Bangunan (2010=100)

Jenis Bangunan	Maret 2015	Desember 2015	Februari 2016	Maret 2016	Perubahan Maret terhadap Februari 2016	Tingkat Inflasi	
						Tahun Kalender 2016	Year-on-Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal	129,48	131,08	131,60	131,62	0,02	0,41	1,66
Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian	126,65	128,24	128,36	128,33	-0,03	0,07	1,33
Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan	124,33	125,19	124,87	124,73	-0,11	-0,37	0,33
Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi	127,39	129,55	129,83	129,81	-0,02	0,20	1,90
Bangunan Lainnya	126,17	127,50	127,69	127,57	-0,10	0,05	1,11
Konstruksi Indonesia	127,58	129,10	129,34	129,31	-0,02	0,16	1,35

3. IHPB beberapa bahan bangunan/konstruksi (aspal, semen portland, dan seng) pada Maret 2016 turun dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada aspal sebesar 2,12 persen dan terkecil terjadi pada seng sebesar 0,03 persen. Semen portland turun sebesar 0,25 persen sedangkan kayu lapis naik 0,06 persen, cat tembok naik 0,28 persen, pipa pvc naik 0,06 persen, kaca lembaran naik 0,35 persen, besi beton naik 0,02 persen, dan besi profil naik 0,54 persen.

Grafik 10.3
Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan Oktober 2015–Maret 2016



XI. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULANAN IV-2015

A. INDEKS TENDENSI BISNIS (ITB)

A.1. ITB TRIWULAN IV-2015

1. Kondisi bisnis triwulan IV-2015 meningkat dibandingkan kondisi pada triwulan sebelumnya. Optimisme pelaku bisnis pada triwulan IV-2015 lebih rendah dibandingkan triwulan III-2015. Nilai ITB triwulan IV-2015 sebesar 105,22 sedangkan triwulan III-2015 sebesar 106,04.

Kondisi bisnis triwulan IV-2015 meningkat dengan nilai Indeks Tendensi Bisnis (ITB) sebesar 105,22

2. Peningkatan kondisi bisnis pada triwulan IV-2015 terjadi pada semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (nilai ITB sebesar 90,18) serta Pertambangan dan Penggalian (nilai ITB sebesar 94,74). Peningkatan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (nilai ITB sebesar 117,84), sedangkan peningkatan kondisi bisnis terendah terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan (nilai ITB sebesar 101,03).
3. Kondisi bisnis pada triwulan IV-2015 meningkat karena adanya peningkatan pada semua komponen indeks, yaitu pendapatan usaha (nilai indeks sebesar 107,49), penggunaan kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 103,95), dan rata-rata jumlah jam kerja (nilai indeks sebesar 103,86).

Tabel 11.1
Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan IV-2015
Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk ITB Triwulan IV-2015			ITB Triwulan IV-2015
	Pendapatan Usaha	Penggunaan Kapasitas Produksi/ Usaha	Rata-Rata Jumlah Jam Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	90,18	-	90,18
2. Pertambangan dan Penggalan	96,21	92,42	94,50	94,74
3. Industri Pengolahan	102,54	102,78	99,04	101,03
4. Pengadaan Listrik dan Gas	111,20	113,54	110,17	111,18
5. Pengadaan Air	111,30	109,57	108,70	109,82
6. Konstruksi	113,46	108,87	103,05	107,98
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	106,76	104,59	103,79	105,03
8. Transportasi dan Pergudangan	111,24	106,98	108,18	109,08
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	111,86	109,78	106,71	109,19
10. Informasi dan Komunikasi	111,05	108,46	107,69	109,07
11. Jasa Keuangan	111,25	113,51	112,06	112,03
12. Real Estat	104,41	95,59	101,47	101,45
13. Jasa Perusahaan	113,25	108,64	110,65	111,23
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	117,39	119,78	117,39	117,84
15. Jasa Pendidikan	109,06	111,83	105,48	107,99
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,86	109,29	106,97	108,10
17. Jasa Lainnya	113,06	108,97	107,92	110,02
Indeks Tendensi Bisnis (ITB)	107,49	103,95	103,86	105,22

A.2. PERKIRAAN ITB TRIWULAN I-2016

1. Kondisi bisnis triwulan I-2016 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme pelaku bisnis pada triwulan I-2016 diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan IV-2015. Perkiraan nilai ITB triwulan I-2016 sebesar 104,28 sedangkan triwulan IV-2015 sebesar 105,22. Peningkatan kondisi bisnis pada triwulan I-2016 diperkirakan terjadi di semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (nilai ITB sebesar 92,03). Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan mengalami peningkatan bisnis tertinggi dengan nilai indeks sebesar 110,00.

Kondisi bisnis pada triwulan I-2016 diprediksi meningkat (ITB 104,28)

Tabel 11.2
Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2016
Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk Perkiraan ITB Triwulan I-2016				Perkiraan ITB Triwulan I-2016
	Order dari Dalam Negeri	Order dari Luar Negeri	Harga Jual Produk	Order Barang Input	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	115,29	95,99	113,40	-	110,00
2. Pertambangan dan Penggalian	96,66	86,32	90,91	91,35	92,03
3. Industri Pengolahan	107,26	96,52	106,75	100,41	103,01
4. Pengadaan Listrik dan Gas	109,91	-	104,66	108,00	107,91
5. Pengadaan Air	103,30	-	103,48	109,04	105,80
6. Konstruksi	110,37	-	108,76	106,07	108,16
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	107,25	99,55	106,42	105,10	105,11
8. Transportasi dan Pergudangan	-	-	103,33	-	103,33
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	102,04	-	102,04
10. Informasi dan Komunikasi	-	-	108,20	-	108,20
11. Jasa Keuangan	-	-	106,88	-	106,88
12. Real Estat	-	-	103,97	-	103,97
13. Jasa Perusahaan	-	-	107,17	-	107,17
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	105,43	-	105,43
15. Jasa Pendidikan	-	-	104,19	-	104,19
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	109,13	-	109,13
17. Jasa Lainnya	-	-	103,12	-	103,12
Indeks Tendensi Bisnis (ITB)	108,77	96,66	106,53	102,76	104,28

Grafik 11.1
Indeks Tendensi Bisnis¹⁾ Triwulan IV-2010–Triwulan IV-2015 dan
Perkiraan Triwulan I-2016²⁾



Keterangan:

- ¹⁾ ITB berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:
- a. Nilai ITB < 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
 - b. Nilai ITB = 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
 - c. Nilai ITB > 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan lebih baik (meningkat) dibanding triwulan sebelumnya.
- ²⁾ Angka perkiraan ITB triwulan I-2016.

B. INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK)

B.1. ITK TRIWULAN IV-2015

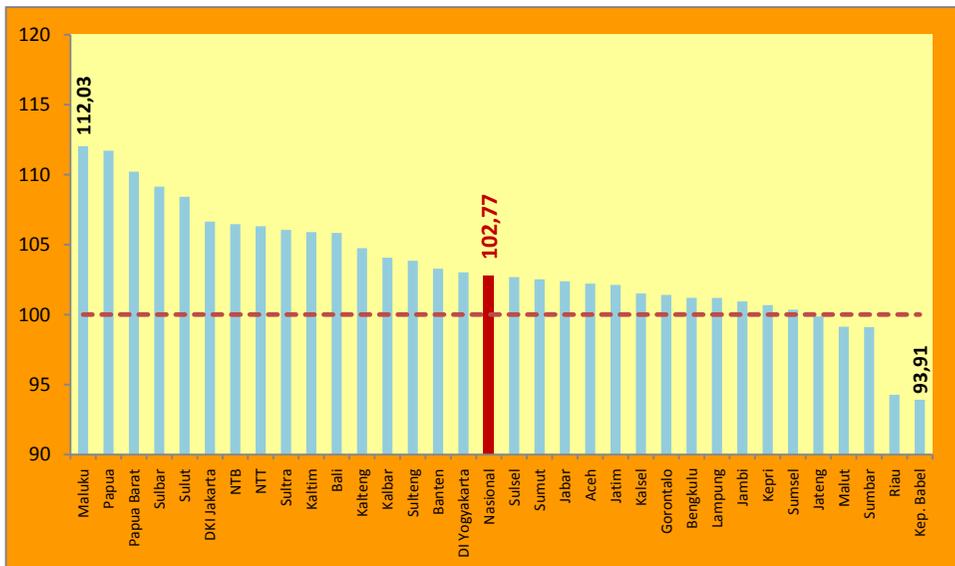
1. Kondisi ekonomi konsumen triwulan IV-2015 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan IV-2015 lebih rendah dibandingkan triwulan III-2015. Nilai ITK triwulan IV-2015 sebesar 102,77 sedangkan triwulan III-2015 sebesar 109,00. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga, relatif rendahnya pengaruh kenaikan harga (inflasi) terhadap tingkat konsumsi, dan tingkat konsumsi yang meningkat.
2. Meningkatnya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional terjadi karena adanya peningkatan kondisi ekonomi konsumen di 28 dari 33 provinsi di Indonesia. Provinsi yang memiliki nilai ITK tertinggi adalah Maluku (nilai ITK sebesar 112,03). Sementara provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat memiliki nilai ITK terendah, yaitu sebesar 93,91.

Kondisi ekonomi konsumen triwulan IV-2015 meningkat (ITK 102,77)

Tabel 11.3
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2015 dan Triwulan IV-2015
Menurut Variabel Pembentuk

Variabel Pembentuk	ITK Triw III-2015	ITK Triw IV-2015
(1)	(2)	(3)
Pendapatan rumah tangga	108,44	103,14
Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi	108,05	101,89
Tingkat konsumsi bahan makanan, makanan jadi di restoran/rumah makan, dan bukan makanan (pakaian, perumahan, pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, dan rekreasi)	111,56	102,99
Indeks Tendensi Konsumen	109,00	102,77

Grafik 11.2
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2015
Tingkat Nasional dan Provinsi



B.2. PERKIRAAN ITK TRIWULAN I-2016

1. Kondisi ekonomi konsumen Triwulan I-2016 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan I-2016 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan Triwulan IV-2015. Perkiraan nilai ITK triwulan I-2016 sebesar 105,38 sedangkan triwulan IV-2015 sebesar 102,77).

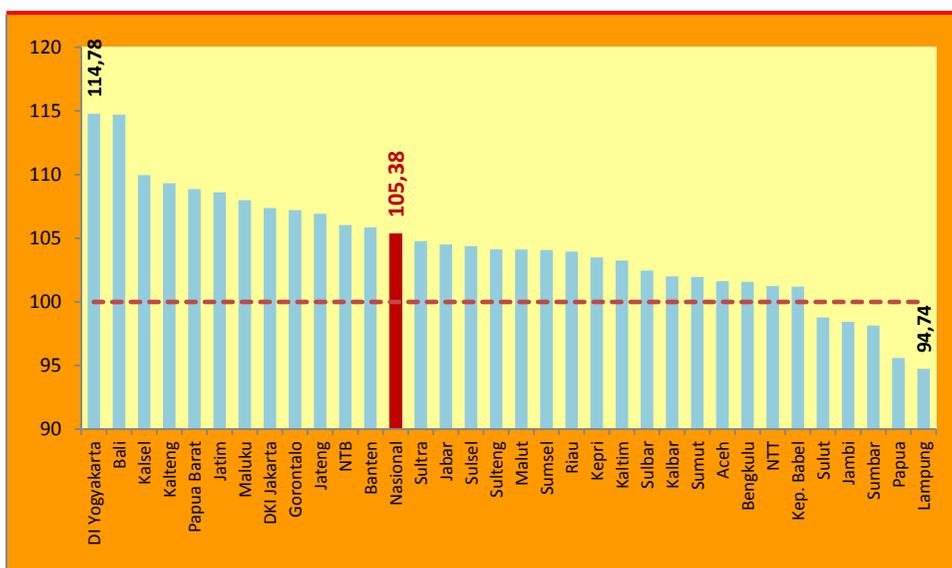
Kondisi ekonomi konsumen triwulan I-2016 diprediksi meningkat (ITK 105,38)

2. Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen terjadi di 28 provinsi di Indonesia, dimana 12 provinsi diantaranya (36,36 persen) diperkirakan memiliki nilai indeks diatas nasional. Provinsi yang memiliki nilai ITK tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta (nilai ITK sebesar 114,78), sementara Provinsi Lampung memiliki nilai ITK terendah (nilai ITK sebesar 94,74).

Tabel 11.4
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2016
Menurut Variabel Pembentuk

Variabel Pembentuk	Perkiraan ITK Triw I-2016
(1)	(2)
Perkiraan pendapatan rumah tangga	108,13
Rencana pembelian barang-barang tahan lama (elektronik, perhiasan, perangkat komunikasi, meubelair, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, tanah, rumah), rekreasi, dan pesta/hajatan	100,51
Indeks Tendensi Konsumen	105,38

Grafik 11.3
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2016
Tingkat Nasional dan Provinsi



Tabel 11.5
Indeks Tendensi Konsumen¹⁾ Triwulan IV-2014–Triwulan IV-2015 dan
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen²⁾ Triwulan I-2016 Tingkat Nasional dan Provinsi

No,	Provinsi	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan
		IV-2014	I-2015	II-2015	III-2015	IV-2015	I-2016 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aceh	105,77	100,33	107,92	110,29	102,21	101,63
2.	Sumatera Utara	105,69	100,48	101,60	102,17	102,52	101,97
3.	Sumatera Barat	106,14	94,58	101,07	100,61	99,10	98,14
4.	R i a u	101,96	90,72	104,74	105,65	94,27	103,95
5.	J a m b i	104,81	91,66	99,57	101,02	100,94	98,44
6.	Sumatera Selatan	102,78	99,97	101,97	107,31	100,35	104,07
7.	Bengkulu	106,26	96,54	105,55	107,07	101,20	101,57
8.	Lampung	106,41	93,38	102,57	101,51	101,19	94,74
9.	Kep. Bangka Belitung	105,15	92,19	97,90	105,54	93,91	101,19
10.	Kep. R i a u	107,29	101,80	108,82	101,92	100,68	103,50
11.	DKI Jakarta	109,93	103,97	109,71	111,88	106,64	107,37
12.	Jawa Barat	107,09	104,43	105,67	109,69	102,38	104,51
13.	Jawa Tengah	106,02	99,71	103,60	109,81	99,87	106,92
14.	D.I. Yogyakarta	108,03	97,18	111,73	110,33	103,02	114,78
15.	Jawa Timur	110,23	100,75	103,88	115,98	102,12	108,61
16.	Banten	107,83	104,07	108,19	111,21	103,29	105,84
17.	B a l i	113,13	102,36	105,42	111,66	105,84	114,70
18.	Nusa Tenggara Barat	108,11	97,50	101,43	109,07	106,47	106,03
19.	Nusa Tenggara Timur	106,20	93,45	100,30	102,42	106,32	101,23
20.	Kalimantan Barat	107,29	100,44	105,05	106,86	104,07	102,00
21.	Kalimantan Tengah	105,54	94,98	106,37	104,46	104,74	109,32
22.	Kalimantan Selatan	103,32	94,25	107,21	103,25	101,51	109,96
23.	Kalimantan Timur	111,73	101,03	107,40	110,92	105,90	103,25
24.	Sulawesi Utara	108,91	93,15	103,46	100,28	108,42	98,78
25.	Sulawesi Tengah	108,16	91,78	105,03	111,42	103,85	104,13
26.	Sulawesi Selatan	108,19	96,29	106,24	103,38	102,68	104,37
27.	Sulawesi Tenggara	108,69	92,52	102,70	110,64	106,06	104,78
28.	Gorontalo	105,50	95,18	109,08	108,02	101,40	107,21
29.	Sulawesi Barat	104,57	100,69	111,64	107,24	109,15	102,46
30.	Maluku	102,23	102,18	107,38	108,48	112,03	107,98
31.	Maluku Utara	103,28	103,19	103,81	108,94	99,14	104,10
32.	Papua Barat	108,71	99,77	109,12	109,31	110,22	108,86
33.	Papua	111,62	93,88	107,57	109,13	111,72	95,58
Indonesia		107,62	100,87	105,22	109,00	102,77	105,38

Keterangan:

- ¹⁾ *ITK berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:*
- a. *Nilai ITK < 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.*
 - b. *Nilai ITK = 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.*
 - c. *Nilai ITK > 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan meningkat dibanding triwulan sebelumnya.*
- ²⁾ *Angka perkiraan ITK triwulan I-2016.*

XII. PRODUKSI TANAMAN PANGAN ANGKA SEMENTARA (ASEM) 2015

A. PADI

1. Produksi padi tahun 2015 sebanyak 75,36 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami peningkatan sebanyak 4,51 juta ton (6,37 persen) dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi padi tahun 2015 terjadi di Pulau Jawa sebanyak 2,31 juta ton, dan di luar Pulau Jawa sebanyak 2,21 juta ton. Peningkatan produksi terjadi karena peningkatan luas panen seluas 0,32 juta hektar (2,31 persen) dan produktivitas sebesar 2,04 kuintal/hektar (3,97 persen).

Produksi padi tahun 2015 sebanyak 75,36 juta ton GKG atau naik 6,37 persen dibandingkan tahun 2014

Tabel 12.1
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Wilayah, 2013–2015

URAIAN	2013	2014	2015 (ASEM)	Perkembangan			
				2013–2014		2014–2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Jawa	6 467 073	6 400 038	6 429 140	-67 035	-1,04	29 102	0,45
- Luar Jawa	7 368 179	7 397 269	7 686 335	29 090	0,39	289 066	3,91
- Indonesia	13 835 252	13 797 307	14 115 475	-37 945	-0,27	318 168	2,31
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Jawa	57,98	57,29	60,61	-0,69	-1,19	3,32	5,80
- Luar Jawa	45,85	46,21	47,35	0,36	0,79	1,14	2,47
- Indonesia	51,52	51,35	53,39	-0,17	-0,33	2,04	3,97
c. Produksi (ton)							
- Jawa	37 493 020	36 663 049	38 970 116	-829 971	-2,21	2 307 067	6,29
- Luar Jawa	33 786 689	34 183 416	36 391 132	396 727	1,17	2 207 716	6,46
- Indonesia	71 279 709	70 846 465	75 361 248	-433 244	-0,61	4 514 783	6,37

Keterangan: Kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

Tabel 12.2
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Subround, 2013–2015

URAIAN	2013	2014	2015 (ASEM)	Perkembangan			
				2013–2014		2014–2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Januari–April	6 272 323	6 204 910	6 157 837	-67 413	-1,07	- 47 073	-0,76
- Mei–Agustus	4 510 189	4 452 135	4 945 473	-58 054	-1,29	493 338	11,08
- September–Desember	3 052 740	3 140 262	3 012 165	87 522	2,87	- 128 097	-4,08
- Januari–Desember	13 835 252	13 797 307	14 115 475	-37 945	-0,27	318 168	2,31
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Januari–April	51,65	50,87	53,68	-0,78	-1,51	2,81	5,52
- Mei–Agustus	50,92	51,12	52,12	0,20	0,39	1,00	1,96
- September–Desember	52,13	52,63	54,87	0,50	0,96	2,24	4,26
- Januari–Desember	51,52	51,35	53,39	-0,17	-0,33	2,04	3,97
c. Produksi (ton)							
- Januari–April	32 398 677	31 562 789	33 057 118	-835 888	-2,58	1 494 329	4,73
- Mei–Agustus	22 967 655	22 757 916	25 776 575	-209 739	-0,91	3 018 659	13,26
- September–Desember	15 913 377	16 525 760	16 527 555	612 383	3,85	1 795	0,01
- Januari–Desember	71 279 709	70 846 465	75 361 248	-433 244	-0,61	4 514 783	6,37

Keterangan: Kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

2. Pola panen padi pada periode Januari–Desember tahun 2015 relatif sama dengan pola panen tahun 2014 dan tahun 2013. Puncak panen padi pada periode Januari–Desember tahun 2015, 2014, dan 2013 terjadi pada bulan Maret. Namun, pada tahun 2015 ada indikasi mundur tanam sehingga panen April 2015 jauh lebih tinggi dari 2013 dan 2014.

Grafik 12.1
Pola Panen Padi, 2013–2015



B. JAGUNG

1. Produksi jagung tahun 2015 sebanyak 19,61 juta ton pipilan kering, mengalami kenaikan sebanyak 0,60 juta ton (3,17 persen) dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi jagung tersebut terjadi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing sebanyak 0,46 juta ton dan 0,15 juta ton. Kenaikan produksi terjadi karena kenaikan produktivitas sebesar 2,25 kuintal/hektar (4,54 persen). Meskipun, terjadi penurunan luas panen seluas 50,20 ribu hektar (1,31 persen).

Produksi jagung tahun 2015 sebanyak 19,61 juta ton pipilan kering, naik 3,17 persen dibandingkan tahun 2014

Tabel 12.3
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Menurut Wilayah, 2013–2015

URAIAN	2013	2014	2015 (ASEM)	Perkembangan			
				2013-2014		2014-2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Jawa	1 958 883	1 954 175	1 952 289	- 4 708	-0,24	- 1 886	-0,10
- Luar Jawa	1 862 621	1 882 844	1 834 526	20 223	1,09	- 48 318	-2,57
- Indonesia	3 821 504	3 837 019	3 786 815	15 515	0,41	- 50 204	-1,31
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Jawa	51,54	51,98	54,37	0,44	0,85	2,39	4,60
- Luar Jawa	45,19	47,00	49,04	1,81	4,01	2,04	4,34
- Indonesia	48,44	49,54	51,79	1,10	2,27	2,25	4,54
c. Produksi (ton)							
- Jawa	10 095 486	10 158 725	10 614 441	63 239	0,63	455 716	4,49
- Luar Jawa	8 416 367	8 849 701	8 997 263	433 334	5,15	147 562	1,67
- Indonesia	18 511 853	19 008 426	19 611 704	496 573	2,68	603 278	3,17

Keterangan: kualitas produksi jagung adalah pipilan kering

C. KEDELAI

1. Produksi kedelai tahun 2015 sebanyak 963,10 ribu ton biji kering, meningkat sebanyak 8,10 ribu ton (0,85 persen) dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi kedelai tersebut terjadi di Luar Pulau Jawa sebanyak 30,41 ribu ton sedangkan di Pulau Jawa terjadi penurunan produksi kedelai sebanyak 22,31 ribu ton. Peningkatan produksi kedelai terjadi karena kenaikan produktivitas sebesar 0,18 kuintal/hektar (1,16 persen). Meskipun, terjadi penurunan luas panen seluas 1,80 ribu hektar (0,29 persen).

Produksi kedelai tahun 2015 diperkirakan sebanyak 963,10 ribu ton biji kering atau naik 0,85 persen dibandingkan tahun 2014

Tabel 12.4
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Menurut Wilayah, 2013–2015

URAIAN	2013	2014	2015 (ASEM)	Perkembangan			
				2013-2014		2014-2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Jawa	342 796	378 986	358 070	36 190	10,56	- 20 916	-5,52
- Luar Jawa	207 997	236 699	255 815	28 702	13,80	19 116	8,08
- Indonesia	550 793	615 685	613 885	64 892	11,78	- 1 800	-0,29
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Jawa	15,23	16,42	16,75	1,19	7,81	0,33	2,01
- Luar Jawa	12,41	14,06	14,20	1,65	13,30	0,14	1,00
- Indonesia	14,16	15,51	15,69	1,35	9,53	0,18	1,16
c. Produksi (ton)							
- Jawa	521 954	622 155	599 843	100 201	19,20	- 22 312	-3,59
- Luar Jawa	258 038	332 842	363 256	74 804	28,99	30 414	9,14
- Indonesia	779 992	954 997	963 099	175 005	22,44	8 102	0,85

Keterangan: kualitas produksi kedelai adalah biji kering

Tabel 12.5
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Palawija Lainnya, 2013–2015

Uraian	Satuan	2013	2014	2015 (ASEM)	Perkembangan				
					2013–2014		2014–2015		
					Absolut	%	Absolut	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1 Kacang Tanah									
-Luas Panen	ha	519 056	499 338	454 063	-19 718	-3,80	-45 275	-9,07	
-Produktivitas	ku/ha	13,52	12,79	13,33	-0,73	-5,40	0,54	4,22	
-Produksi (biji kering)	ton	701 680	638 896	605 127	-62 784	-8,95	-33 769	-5,29	
2 Kacang Hijau									
-Luas Panen	ha	182 075	208 016	229 408	25 941	14,25	21 392	10,28	
-Produktivitas	ku/ha	11,24	11,76	11,83	0,52	4,63	0,07	0,60	
-Produksi (biji kering)	ton	204 670	244 589	271 420	39 919	19,50	26 831	10,97	
3 Ubi Kayu									
-Luas Panen	ha	1 065 752	1 003 494	949 253	-62 258	-5,84	-54 241	-5,41	
-Produktivitas	ku/ha	224,60	233,55	229,56	8,95	3,98	-3,99	-1,71	
-Produksi (umbi basah)	ton	23 936 921	23 436 384	21 790 956	-500 537	-2,09	-1 645 428	-7,02	
4 Ubi Jalar									
-Luas Panen	ha	161 850	156 758	140 218	-5 092	-3,15	-16 540	-10,55	
-Produktivitas	ku/ha	147,47	152,00	161,26	4,53	3,07	9,26	6,09	
-Produksi (umbi basah)	ton	2 386 729	2 382 658	2 261 124	-4 071	-0,17	-121 534	-5,10	

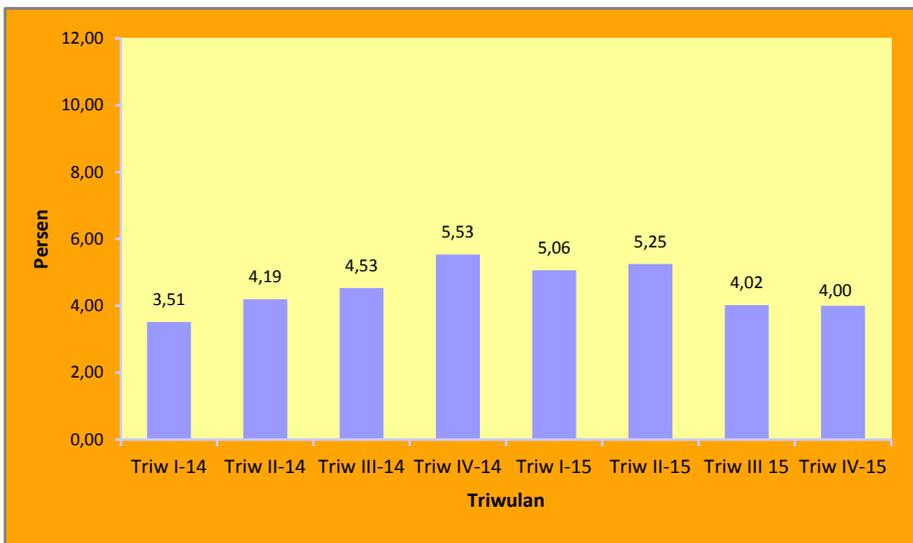
XIII. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN IV-2015

A. Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBS)

- Pertumbuhan IBS triwulan IV-2015 naik sebesar 4,02 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2014, triwulan III-2015 naik sebesar 4,00 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2014, triwulan II-2015 naik sebesar 5,25 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2014, triwulan I-2015 naik sebesar 5,06 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2014, triwulan IV-2014 naik sebesar 5,53 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2013, triwulan III-2014 naik sebesar 4,53 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2013, triwulan II-2014 naik 4,19 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2013, dan triwulan I-2014 naik sebesar 3,51 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2013.

Pertumbuhan produksi IBS triwulan IV-2015 naik sebesar 4,02 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2014

Grafik 13.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (*y-on-y*)
Triwulan I-2014–Triwulan IV-2015



- Pertumbuhan produksi IBS triwulan IV-2015 naik sebesar 1,69 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2015, triwulan III-2015 naik sebesar 0,83 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2015, triwulan II-2015 naik sebesar 2,16 persen (*q-to-q*) dari triwulan I-2015, triwulan I-2015 turun sebesar 0,70 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2014, triwulan

IV-2014 naik sebesar 1,68 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2014, dan triwulan III-2014 naik sebesar 2,04 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2014.

- Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan IV-2015 (*y-on-y*) adalah industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional yang naik 15,27 persen, industri komputer, barang elektronik, dan optik yang naik sebesar 11,36 persen, serta industri pengolahan tembakau naik 6,84 persen.
- Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan IV-2015 (*q-to-q*) adalah industri kulit, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya naik 7,66 persen, industri barang galian bukan logam naik 5,81 persen, dan industri barang logam, bukan mesin, dan peralatannya naik 5,62 persen.
- Pertumbuhan produksi IBS *m-to-m* Oktober 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,60 persen. Sementara pada November 2015 mengalami penurunan sebesar 1,87 persen dan pada Desember 2015 juga mengalami penurunan sebesar 1,89 persen.

Tabel 13.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan 2013–2015 (persen) 2010=100

Tahun	<i>q-to-q</i>				<i>y-on-y</i>				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2013	-2,20	1,31	0,51	1,91	8,99	6,77	7,21	1,50	6,01
2014	-0,25	1,97	2,04	1,68	3,51	4,19	4,53	5,53	4,76
2015	-0,70	2,16	0,83	1,69	5,06	5,25	4,00	4,02	4,57

Tabel 13.2
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2013–2015 (persen) 2010=100

Bulan	<i>y-on-y</i>			<i>m-to-m</i>		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	10,86	2,99	5,12	-0,18	-0,03	-1,29
Februari	6,32	3,82	2,63	-1,41	-0,61	-2,97
Maret	9,88	3,74	7,42	0,24	0,17	4,84
April	6,89	2,74	8,41	1,37	0,39	1,31
Mei	3,23	3,79	2,39	1,45	2,48	-3,21
Juni	6,77	6,07	5,02	-2,10	0,05	2,62
Juli	12,49	1,54	4,41	1,71	-2,64	-3,20
Agustus	6,16	5,96	5,73	-1,65	2,63	3,93
September	7,21	9,77	2,01	2,64	6,34	2,60
Oktober	-0,10	5,35	5,41*)	1,45	-2,64	0,60*)
November	1,82	4,76	5,68**)	-1,57	-2,12	-1,87**)
Desember	2,83	6,47	1,02***)	0,99	2,64	-1,89***)

Catatan: *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

***) Angka Sangat Sangat Sementara

Tabel 13.3
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan IV-2015
Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)

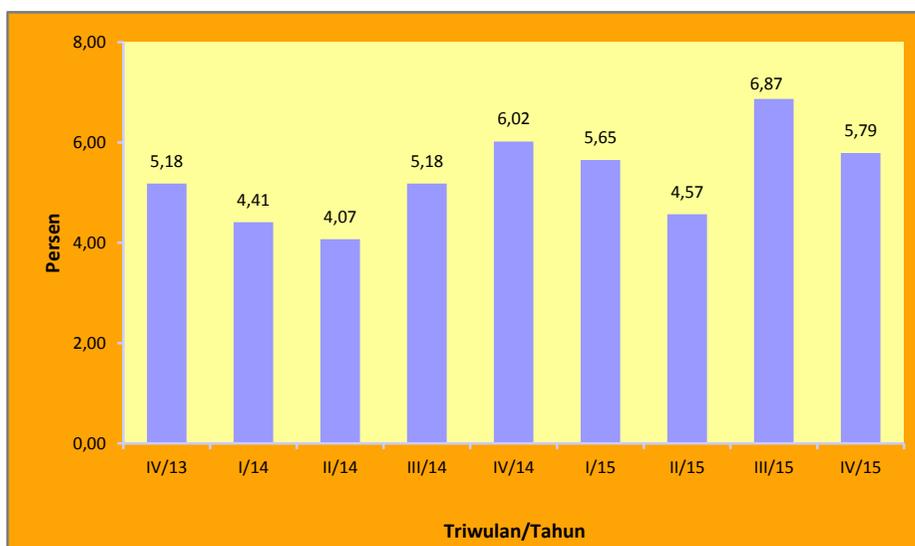
KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan		
		<i>q-to-q</i>	<i>y-on-y</i>	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Makanan	-2,89	5,71	7,37
11	Minuman	1,13	-2,95	-0,40
12	Pengolahan Tembakau	4,96	6,84	5,20
13	Tekstil	1,55	0,17	-2,01
14	Pakaian Jadi	-4,61	-14,63	-10,86
15	Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	7,66	3,53	3,60
16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	1,02	-1,98	0,39
17	Kertas dan Barang dari Kertas	-3,85	-0,51	-3,54
18	Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-0,70	1,84	4,60
20	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	-7,21	-8,93	0,12
21	Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	4,21	15,27	12,53
22	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-2,37	8,15	4,61
23	Barang Galian Bukan Logam	5,81	5,13	7,37
24	Logam Dasar	2,74	4,75	6,42
25	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	5,62	6,20	9,47
26	Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	4,38	11,36	3,03
27	Peralatan Listrik	-4,89	-10,93	-0,67
28	Mesin dan Perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya	0,09	5,35	2,19
29	Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	1,33	-1,54	4,29
30	Alat Angkutan Lainnya	-0,43	-6,16	-6,42
31	Furnitur	-2,50	3,70	4,06
32	Pengolahan Lainnya	-3,66	2,10	5,86
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,13	-0,14	4,47
Industri Manufaktur Besar dan Sedang		1,69	4,02	4,57

B. Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)

1. Pertumbuhan produksi IMK triwulan IV-2015 naik sebesar 5,79 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2014, triwulan III-2015 naik sebesar 6,87 persen dari triwulan III-2014, triwulan II-2015 naik sebesar 4,57 persen dari triwulan II-2014, dan triwulan I-2015 naik sebesar 5,65 persen dari triwulan I-2014.

**Pertumbuhan produksi
IMK triwulan IV-2015 naik 5,79
persen dari triwulan IV-2014**

Grafik 13.2
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (*y-on-y*)
Triwulan IV-2013–Triwulan IV-2015



2. Pertumbuhan Produksi IMK triwulan IV-2015 naik 1,35 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2015, triwulan III-2015 turun 1,31 persen dari triwulan II-2015, triwulan II-2015 naik 5,09 persen dari triwulan I-2015, dan triwulan I-2015 naik 0,64 persen dari triwulan IV-2014.
3. Pertumbuhan Produksi IMK tahun 2015 naik 5,71 persen dari tahun 2014, tahun 2014 naik 4,91 persen dari tahun 2013, dan tahun 2013 naik 7,51 persen dari tahun 2012.
4. Pertumbuhan Produksi IMK tertinggi pada triwulan IV-2015 (*y-on-y*) adalah industri bahan kimia dan barang dari kimia naik 18,87 persen, industri percetakan dan reproduksi media rekaman naik 13,19 persen, serta industri mesin dan perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk dalam lainnya) naik 12,57 persen.

Tabel 13.4
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan
Triwulan I-2013–Triwulan IV-2015 (persen)

Tahun	q-to-q				y-on-y				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2013	1,74	6,52	-4,45	1,58	4,84	15,55	4,86	5,18	7,51
2014	0,99	6,17	-3,43	2,39	4,41	4,07	5,18	6,02	4,91
2015	0,64	5,09	-1,31	1,35	5,65	4,57	6,87	5,79	5,71

Tabel 13.5
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan IV-2015
Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)

KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan			
		Triwulan IV		Tahun 2015	
		q-to-q	y-on-y		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
10	Makanan		2,49	6,83	6,83
11	Minuman		1,00	8,90	11,52
12	Pengolahan tembakau		-10,10	6,39	7,66
13	Tekstil		2,28	4,44	7,62
14	Pakaian jadi		1,23	4,06	6,68
15	Kulit, barang dari kulit dan alas kaki		2,16	7,42	3,91
16	Kayu, barang-barang dari kayu dan gabus (kecuali furnitur) dan barang anyaman dari bamboo, rotan, dan sejenisnya		3,70	-2,02	-3,73
17	Kertas dan barang dari kertas		0,68	6,51	16,36
18	Percetakan & reproduksi media rekaman		3,68	13,19	8,24
20	Bahan kimia dan barang dari bahan kimia		3,95	18,87	14,31
21	Farmasi, obat kimia dan obat tradisional		1,88	7,21	4,52
22	Karet, barang dari karet dan plastik		0,47	-5,57	-3,72
23	Barang galian bukan logam		-0,58	0,71	-1,55
24	Logam dasar		4,99	2,81	-0,59
25	Brg logam bukan mesin & peralatannya		-0,15	-4,85	-3,58
26	Komputer, barang elektronik dan optik		5,97	5,76	1,02
27	Peralatan listrik		4,18	8,13	10,14
28	Mesin dan perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk dalam lainnya)		4,94	12,57	12,60
29	Kendaraan bermotor, trailer & semi trailer		1,94	-2,47	1,69
30	Alat angkut lainnya		5,71	-0,35	-2,76
31	Furnitur		-2,21	-0,63	6,54
32	Pengolahan lainnya		-2,30	3,61	2,52
33	Jasa reparasi & pemasangan mesin		0,20	-5,05	3,26
	Industri Manufaktur Mikro dan Kecil		1,35	5,79	5,71

XIV. PARIWISATA FEBRUARI 2016

A. Kunjungan Wisman

1. Jumlah kunjungan penduduk mancanegara (wisman dalam arti luas) ke Indonesia selama Januari–Februari 2016 mencapai 1,70 juta kunjungan atau naik 4,46 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2015, yang tercatat sebanyak 1,63 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisman bulan Februari 2016 mencapai 888,3 ribu kunjungan, yang terdiri atas 780,9 ribu kunjungan wisman melalui 19 pintu utama; 82,2 ribu kunjungan selain dari 19 pintu utama; dan 25,13 ribu kunjungan WNA dengan maksud kunjungan bekerja Indonesia kurang dari setahun.

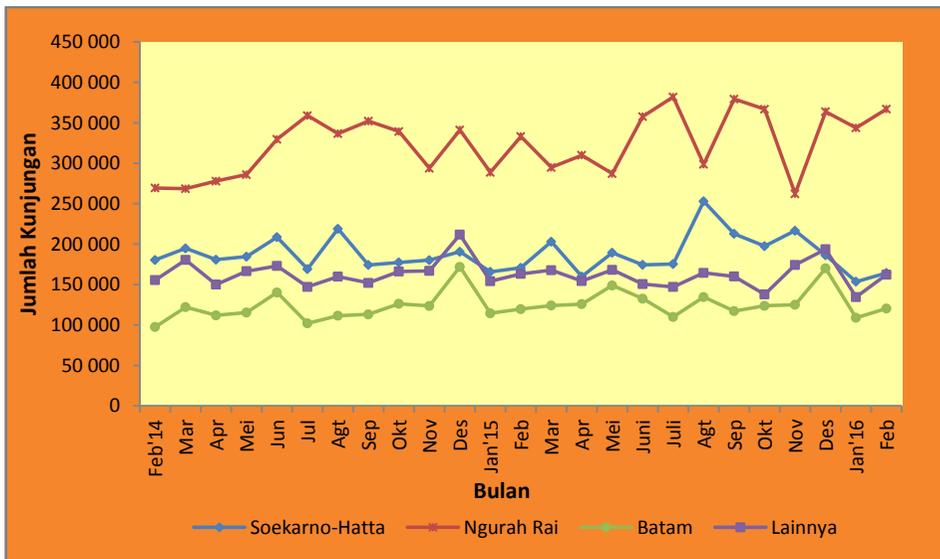
Jumlah kunjungan penduduk mancanegara selama Januari–Februari 2016 mencapai 1,70 juta kunjungan atau naik 4,46 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2015

Tabel 14.1
Jumlah Kunjungan Penduduk Mancanegara ke Indonesia, Februari 2016

Jenis Pengunjung	Jumlah (Kunjungan)	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)
1. Wisman melalui 19 pintu utama	780 945	87,91
a. Wisman Reguler	768 118	86,47
b. Wisman khusus (wisman lansia, rohaniawan, diklat, riset, dll)	12 827	1,44
2. Wisman non 19 pintu utama	82 235	9,26
a. Pos Lintas Batas	36 433	4,10
b. Pintu lainnya	45 802	5,16
Sub Jumlah (1 + 2)	863 180	97,17
3. WNA dengan maksud kunjungan untuk bekerja (<1 tahun)	25 129	2,83
Jumlah (1+2+3)	888 309	100,00

2. Jumlah kunjungan wisman reguler dan yang masuk melalui pintu lainnya selama Februari 2016 mencapai 813,9 ribu kunjungan atau naik 2,47 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan selama Februari 2015, yang tercatat sebanyak 794,3 ribu kunjungan. Demikian pula jika dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman reguler bulan Februari 2016 meningkat sebesar 9,90 persen.

Grafik 14.1
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Menurut Pintu Masuk
Februari 2014– Februari 2016



- Jumlah kunjungan wisman reguler melalui Bandara Ngurah Rai, Bali pada Februari 2016 mengalami kenaikan sebesar 10,19 persen dibandingkan Februari 2015, yaitu dari 333,1 ribu kunjungan menjadi 367,0 ribu kunjungan. Demikian pula jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman reguler ke Bali mengalami kenaikan sebesar 6,80 persen.
- Dari sekitar 813,9 ribu kunjungan wisman reguler dan pintu lainnya yang datang ke Indonesia pada Februari 2016, sebanyak 19,88 persen diantaranya dilakukan oleh wisman berkebangsaan Tionghoa, diikuti oleh wisman Singapura (13,55 persen), Malaysia (12,08 persen), Australia (9,26 persen), dan Jepang (5,18 persen).

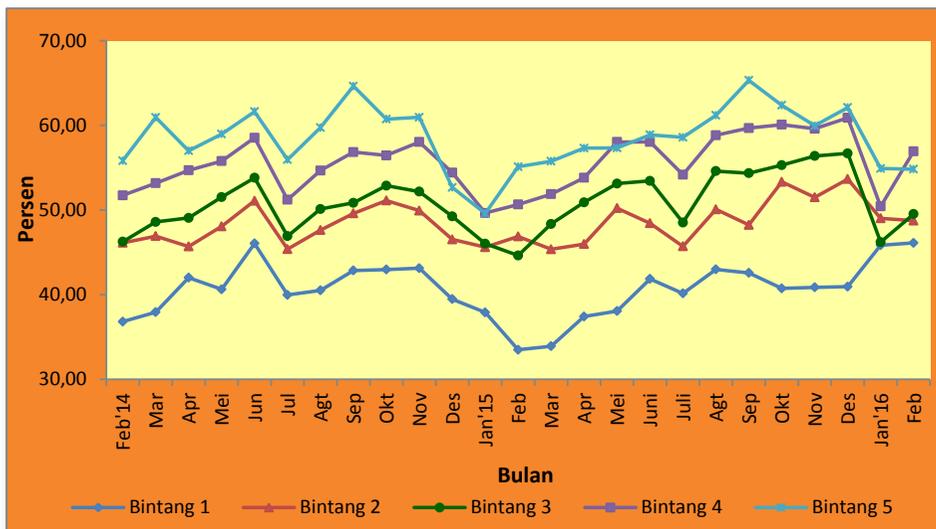
B. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Lama Menginap Tamu Hotel Berbintang

1. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi selama Februari 2016 mencapai 52,15 persen, yang berarti terjadi kenaikan 4,56 poin dibandingkan rata-rata TPK hotel berbintang pada periode yang sama tahun 2015. Demikian pula jika dibandingkan bulan sebelumnya, TPK Februari 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,82 poin.

**TPK Hotel Berbintang
Februari 2016 mencapai
52,15 persen atau naik 4,56
poin dibanding TPK Februari
2015**

2. Naik turunnya angka TPK tidak selalu mencerminkan kinerja di sektor perhotelan. Angka TPK hanya menggambarkan rata-rata tingkat hunian di masing-masing hotel tanpa memperhatikan adanya perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel. Kinerja sektor perhotelan tidak hanya diukur dari besaran TPK tetapi juga harus memperhatikan perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel yang siap dijual atau dipasarkan.

Grafik 14.2
Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang
Rata-rata 27 Provinsi di Indonesia, Februari 2014–Februari 2016



3. TPK Hotel Berbintang di Bali pada Februari 2016 sebesar 62,46 persen, atau naik sebesar 2,43 poin dibandingkan TPK Februari 2015. Demikian pula jika dibandingkan dengan Januari 2016, TPK Februari 2016 di Bali mengalami kenaikan sebesar 8,08 poin.
4. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang selama Februari 2016 mencapai 1,83 hari, atau mengalami penurunan 0,15 hari dibandingkan rata-rata lama menginap selama Februari 2015. Namun, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada Februari 2016 tidak mengalami perubahan.

Tabel 14.2
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Reguler dan Pintu Lainnya,
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu
Februari 2015–Februari 2016

Bulan/ Tahun	Wisman Reguler dan Pintu lainnya		Wisman Bali (Ngurah Rai)		TPK 27 Prov.		TPK Bali		Lama Menginap Tamu (hari)	
	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata	Peru- Bahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2015	9 729 350	3,12	3 923 970	5,15	53,04	1,20	60,55	0,21	1,98	-0,01
Jan-Feb	1 519 000	4,34	621 827	13,46	47,32	-0,57	56,59	-1,89	2,05	0,01
Februari	794 302	8,80	333 072	15,35	47,59	0,51	60,03	6,58	1,98	-0,04
Maret	789 596	0,37	294 758	-11,50	49,13	1,54	54,50	-5,53	1,96	-0,02
April	749 882	-5,03	309 888	5,13	51,28	2,15	54,70	0,20	2,19	0,23
Mei	793 499	5,82	287 141	-7,34	53,72	2,44	57,51	2,81	2,12	-0,07
Juni	815 148	2,73	357 712	24,58	54,14	0,42	61,76	4,25	2,20	0,08
Juli	814 233	-0,11	381 890	6,76	51,25	-2,89	64,29	2,53	1,90	-0,30
Agustus	850 542	4,46	298 638	-21,80	55,61	4,36	67,49	3,20	1,93	0,03
September	869 179	2,19	379 397	27,04	56,26	0,65	67,65	0,16	1,96	0,03
Oktober	825 818	-4,99	366 759	-7,15	56,60	0,34	65,01	-2,64	1,92	-0,04
November	777 976	-5,79	262 180	-28,51	56,08	-0,52	59,09	-5,92	1,75	-0,17
Desember	913 828	17,54	363 780	38,75	57,25	1,17	60,32	1,23	1,83	0,08
2016	1 554 490	2,19	343 663	19,02	50,74	3,42	58,26	1,67	1,83	-0,22
Januari	740 570	-18,96	343 663	-5,53	49,33	-7,92	54,38	-5,94	1,83	0,00
Februari	813 920	9,90	367 024	6,80	52,15	2,82	62,46	8,08	1,83	0,00

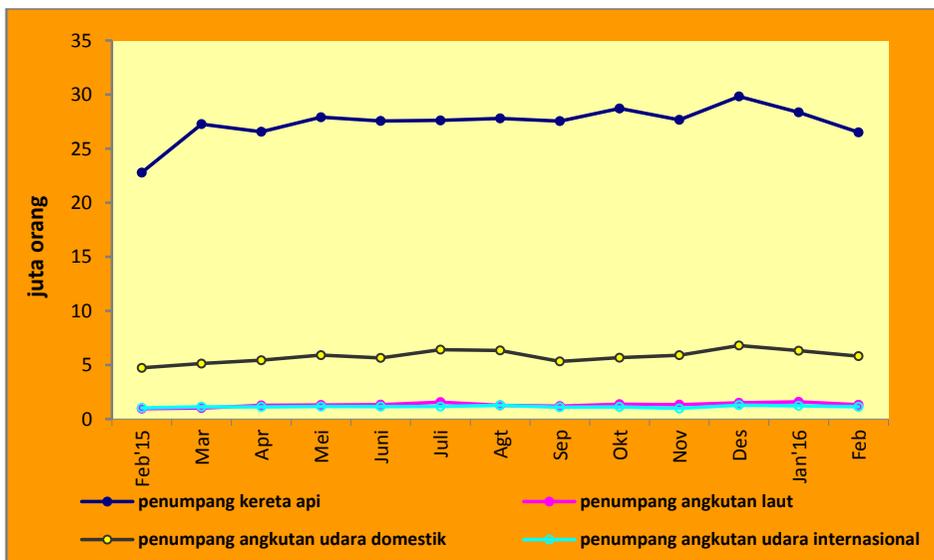
XV. TRANSPORTASI NASIONAL FEBRUARI 2015

A. Angkutan Udara

1. Jumlah penumpang angkutan udara tujuan dalam negeri (domestik) Februari 2016 mencapai 5,8 juta orang atau turun 8,01 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun naik 22,79 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.

Jumlah penumpang angkutan udara domestik Februari 2016 mencapai 5,8 juta orang, turun 8,01 persen

Grafik 15.1
Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi
Februari 2015–Februari 2016



2. Jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional) Februari 2016 mencapai 1,1 juta orang atau turun 7,80 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun naik 9,78 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.

B. Angkutan Laut Dalam Negeri

1. Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Februari 2016 mencapai 1,3 juta orang atau turun 16,87 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 37,90 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.
2. Jumlah barang yang diangkut pelayaran dalam negeri Februari 2016 mencapai 19,6 juta ton atau turun 2,72 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun naik 17,41 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.

Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Februari 2016 mencapai 1,3 juta orang, turun 16,87 persen

C. Angkutan Kereta Api

1. Jumlah penumpang kereta api Februari 2016 mencapai 26,5 juta orang atau turun 6,51 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun naik 16,33 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.
2. Jumlah barang yang diangkut kereta api Februari 2016 mencapai 2,7 juta ton atau turun 8,81 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun naik 18,88 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2015.

Jumlah penumpang kereta api Februari 2016 mencapai 26,5 juta orang, turun 6,51 persen

Tabel 15.1
Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi
Februari 2015–Februari 2016

Tahun/ Bulan	Angkutan Udara				Angkutan Laut				Angkutan Kereta Api			
	Domestik		Internasional		Penumpang		Barang		Penumpang		Barang	
	(000 org)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 ton)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 ton)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2015	68 780,7	-	13 658,2	-	15 130,2	-	238 308,8	-	325 945	-	32 035	-
Februari	4 736,5	-12,77	1 032,7	-9,05	960,3	-4,47	16 689,3	-15,55	22 790	-7,64	2 256	-16,72
Maret	5 132,2	8,35	1 136,1	10,01	1 021,9	6,41	18 136	8,67	27 267	19,64	2 520	11,70
April	5 439,0	5,98	1 122,1	-1,23	1 264,1	23,70	17 896,6	-1,32	26 565	-2,57	2 336	-7,30
Mei	5 911,3	8,68	1 157,6	3,16	1 301,0	2,92	20 134,4	12,50	27 910	5,06	2 641	13,06
Juni	5 656,6	-4,31	1 152,2	-0,47	1 329,2	2,17	19 870,0	-1,31	27 562	-1,25	2 805	6,21
Juli	6 421,0	13,51	1 162,8	0,92	1 565,8	17,80	17 947,8	-9,67	27 612	0,18	2 678	-4,53
Agustus	6 343,9	26,82	1 268,5	1,97	1 271,9	12,76	20 065,6	-4,28	27 796	3,11	2 881	9,36
September	5 330,6	-15,97	1 092,9	-13,84	1 195,8	-5,98	21 474,2	7,02	27 549	-0,89	2 801	-2,78
Oktober	5 676,5	6,49	1 125,1	2,95	1 375,2	15,00	21 906,2	2,01	28 718	4,24	2 844	1,54
November	5 903,8	4,00	985,6	-12,40	1 330,1	-3,28	22 081,7	0,80	27 669	-3,65	2 677	-5,87
Desember	6 799,1	15,16	1 287,2	30,60	1 509,7	13,50	22 345,7	1,20	29 831	7,81	2 887	7,84
2016	12 138,3	-	2 362,3	-	2 917,4	-	39 736,0	-	54 869	-	5 623	-
Januari	6 322,5	-7,01	1 229,6	-4,47	1 593,1	5,52	20 141,5	-9,86	28 358	-4,94	2 941	1,87
Februari	5 815,8	-8,01	1 133,7	-7,80	1 324,3	-16,87	19 594,5	-2,72	26 511	-6,51	2 682	-8,81

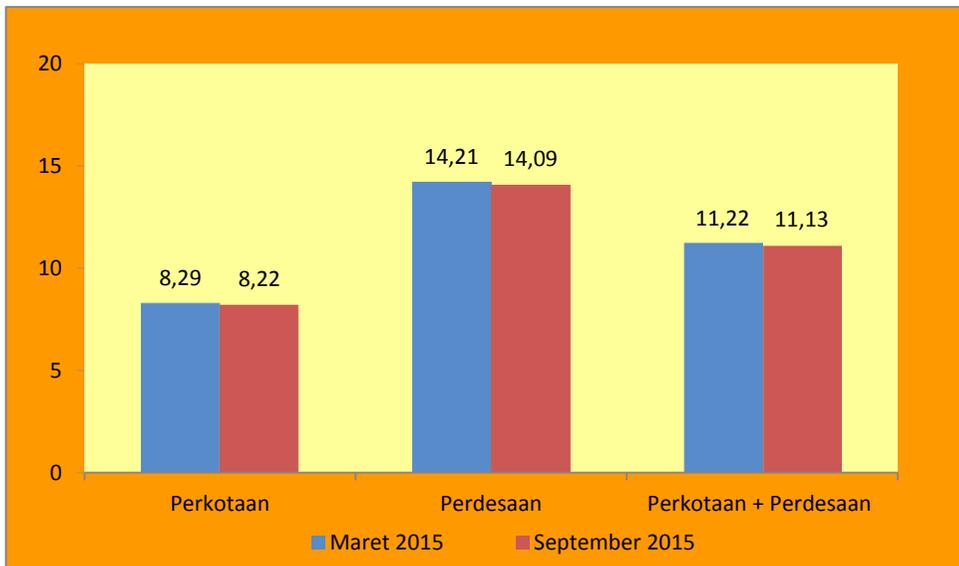
XVI. KEMISKINAN SEPTEMBER 2015

A. Perkembangan Kemiskinan Maret 2015–September 2015

1. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2015 mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen), menurun 0,08 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2015 yang sebanyak 28,59 juta orang (11,22 persen). Perkembangan penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal dapat dilihat pada Grafik 16.1. dan Tabel 16.1.

Jumlah penduduk miskin pada September 2015 sebanyak 28,51 juta orang

Grafik 16.1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Maret 2015- September 2015



2. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan menurun lebih banyak dibanding penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan. Selama periode Maret 2015-September 2015, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sekitar 0,03 juta orang, sementara di daerah perdesaan menurun sekitar 0,05 juta orang.

3. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Pada September 2015, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebesar 62,76 persen dari seluruh penduduk miskin, sementara pada Maret 2015 sebesar 62,74 persen.

Tabel 16.1
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2015–September 2015

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan (GKM)	Bukan Makanan (GKBM)	Total (GK)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Maret 2015	238.278	104.263	342.541	10,65	8,29
September 2015	247.840	108.538	356.378	10,62	8,22
Perdesaan					
Maret 2015	245.357	72.524	317.881	17,94	14,21
September 2015	256.120	76.914	333.034	17,89	14,09
Perkotaan+Perdesaan					
Maret 2015	242.241	88.535	330.776	28,59	11,22
September 2015	251.943	92.866	344.809	28,51	11,13

Beberapa faktor terkait penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2015–September 2015 adalah:

- Selama periode Maret 2015–September 2015 terjadi inflasi umum relatif rendah, yaitu tercatat sebesar 2,69 persen.
- Secara nasional, rata-rata harga beras mengalami penurunan sebesar 0,92 persen yaitu dari Rp13.089,- per kg pada Maret 2015 menjadi Rp12.968,- per kg pada September 2015. Selain beras, harga eceran komoditas bahan pokok lain yang mengalami penurunan adalah minyak goreng yaitu mengalami penurunan 2,80 persen.
- Perekonomian Indonesia Triwulan III-2015 tumbuh sebesar 7,12 persen terhadap Triwulan I-2015
- Perbaikan penghasilan petani yang ditunjukkan oleh kenaikan NTP (Nilai Tukar Petani) sebesar 0,79 persen dari 101,53 pada Maret 2015 menjadi 102,33 pada September 2015.

B. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2015–September 2015

1. Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode Maret 2015 – September 2015, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,24 persen, yaitu dari Rp330.776,- per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp344.809,- per kapita per bulan pada September 2015. Garis Kemiskinan (GK), terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Peranan GKM terhadap GK sangat dominan, yaitu mencapai 73,07 persen pada bulan September 2015.

Tabel 16.2
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap
Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), September 2015

Komoditi (1)	Perkotaan (2)	Komoditi (3)	Perdesaan (4)
Makanan			
Beras	22,10	Beras	28,74
Rokok kretek filter	8,08	Rokok kretek filter	7,68
Telur ayam ras	3,57	Gula Pasir	3,11
Daging ayam ras	3,20	Telur ayam ras	3,09
Mie instan	2,61	Mie instan	2,46
Tempe	2,18	Tempe	2,08
Gula pasir	2,15	Tahu	1,81
Tahu	2,07	Daging ayam ras	1,79
Kue Basah	1,73	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,72
Roti	1,67	Bawang merah	1,71
Bukan Makanan			
Perumahan	9,07	Perumahan	7,37
Bensin	3,07	Bensin	2,44
Listrik	2,87	Listrik	1,58
Pendidikan	2,74	Pendidikan	1,45
Angkutan	1,70	Perlengkapan mandi	1,07
Perlengkapan mandi	1,36	Kayu bakar	1,04

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2015

2. Pada September 2015, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, tempe, gula pasir, dan tahu. Sementara itu, terdapat komoditi lain yang memberi sumbangan berbeda terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan, seperti roti dan kue basah yang hanya memberi sumbangan terhadap GK di perkotaan. Demikian juga untuk komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan hampir sama antara daerah perkotaan dan perdesaan, seperti perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Sementara itu, terdapat komoditi lain yang memberi sumbangan berbeda terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan, seperti angkutan yang hanya memberi sumbangan terhadap GK di perkotaan. Nama komoditi makanan dan bukan makanan beserta nilai kontribusinya terhadap Garis Kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 16.2.

C. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

1. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
2. Pada periode Maret 2015 – September 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2015 sebesar 1,97 dan mengalami penurunan menjadi 1,84 pada September 2015. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,54 menjadi 0,51 pada periode yang sama (Tabel 16.3).
3. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2015, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,29 sedangkan di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,40. Pada periode yang sama nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,35 sedangkan di daerah perdesaan mencapai sebesar 0,67.

Tabel 16.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2015–September 2015

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)</u>			
Maret 2015	1,40	2,55	1,97
September 2015	1,29	2,40	1,84
<u>Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)</u>			
Maret 2015	0,36	0,71	0,54
September 2015	0,35	0,67	0,51

Tabel 16.4
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, September 2015

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita / bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	P ₀	Garis Kemiskinan (Rp/kapita / bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	P ₀	Garis Kemiskinan (Rp/kapita / bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	P ₀
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	420.324	155,81	10,92	394.419	703,60	19,56	401.773	859,41	17,11
Sumatera Utara	379.898	727,76	10,51	352.637	780,38	11,06	366.137	1.508,14	10,79
Sumatera Barat	423.339	118,48	5,73	391.178	231,05	7,35	403.947	349,53	6,71
Riau	417.768	174,79	7,05	416.780	388,13	9,95	417.164	562,92	8,82
Jambi	423.855	125,60	12,11	329.895	185,97	7,82	358.426	311,57	9,12
Sumatera Selatan	378.739	360,73	12,51	319.994	751,80	14,47	340.958	1.112,53	13,77
Bengkulu	425.642	106,00	18,15	404.179	216,83	16,71	410.840	322,83	17,16
Lampung	386.728	197,94	9,25	346.088	902,74	15,05	356.771	1.100,68	13,53
Bangka Belitung	516.835	18,83	2,77	542.732	47,79	6,83	529.979	66,62	4,83
Kepulauan Riau	485.496	83,09	5,00	456.933	31,75	9,75	480.812	114,84	5,78
DKI Jakarta	503.038	368,67	3,61				503.038	368,67	3,61
Jawa Barat	318.297	2.706,52	8,58	319.228	1.779,14	11,61	318.602	4.485,66	9,57
Jawa Tengah	308.163	1.789,57	11,50	310.295	2.716,21	14,86	309.314	4.505,78	13,32
DI Yogyakarta	359.470	292,64	11,93	324.386	192,92	15,62	347.721	485,56	13,16
Jawa Timur	314.320	1.571,15	8,41	318.443	3.204,82	15,84	316.464	4.775,97	12,28
Banten	365.672	418,95	5,11	336.592	271,71	7,12	356.436	690,66	5,75
Bali	341.554	115,80	4,52	314.218	102,99	6,42	331.028	218,79	5,25
Nusa Tenggara Barat	335.284	377,28	18,40	313.466	425,01	15,18	322.689	802,29	16,54
Nusa Tenggara Timur	374.355	97,06	9,41	290.363	1.063,47	25,89	307.224	1.160,53	22,58
Kalimantan Barat	347.516	88,15	6,00	337.288	317,36	9,51	340.413	405,51	8,44
Kalimantan Tengah	339.239	48,72	5,68	374.938	99,41	6,02	362.729	148,13	5,91
Kalimantan selatan	371.793	72,48	4,27	352.972	116,68	5,06	360.949	189,16	4,72
Kalimantan Timur	504.551	80,82	3,73	476.614	129,16	10,13	494.207	209,98	6,10
Kalimantan Utara	505.262	13,32	3,68	477.645	27,61	9,67	493.086	40,93	6,32
Sulawesi Utara	302.378	58,00	5,26	311.068	159,14	12,10	307.104	217,14	8,98
Sulawesi Tengah	376.496	79,25	11,06	353.080	327,09	15,07	358.892	406,34	14,07
Sulawesi Selatan	274.140	157,18	4,93	254.524	707,34	13,22	261.854	864,52	10,12
Sulawesi Tenggara	282.230	56,77	7,84	264.371	288,25	16,12	269.516	345,02	13,74
Gorontalo	274.581	27,01	6,84	275.163	179,51	24,17	274.961	206,52	18,16
Sulawesi Barat	269.080	22,51	8,69	279.594	130,70	12,70	277.479	153,21	11,90
Maluku	404.929	51,60	7,83	405.502	276,17	26,70	405.279	327,77	19,36
Maluku Utara	378.538	8,29	2,61	356.325	64,35	7,57	362.370	72,64	6,22
Papua Barat	478.699	18,82	5,68	457.222	206,72	37,94	465.348	225,54	25,73
Papua	445.057	30,28	3,61	392.446	867,93	37,34	406.385	898,21	28,40
INDONESIA	356.378	10.619,87	8,22	333.034	17.893,73	14,09	344.809	28.513,60	11,13

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2015

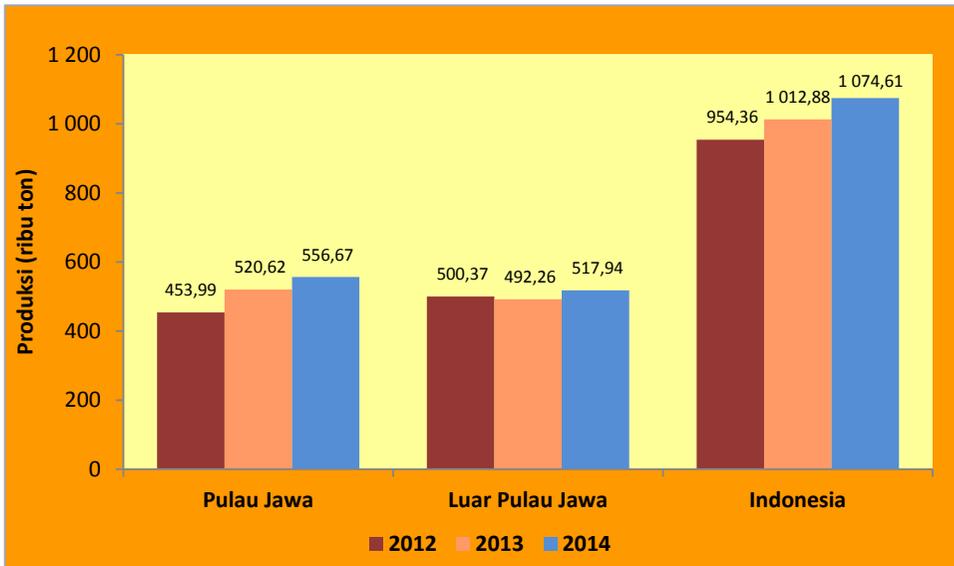
XVII.PRODUKSI HORTIKULTURA 2014

A. CABAI BESAR

1. Produksi cabai besar Indonesia tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton, mengalami peningkatan sebesar 61,73 ribu ton (6,09 persen) dibandingkan tahun 2013. Peningkatan produksi cabai besar tahun 2014 tersebut terjadi di Pulau Jawa sebesar 36,05 ribu ton dan di luar Pulau Jawa sebesar 25,68 ribu ton.

Produksi cabai besar tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton

Grafik 17.1
Perkembangan Produksi Cabai Besar Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014



2. Tahun 2014, persentase produksi cabai besar menurut wilayah di Pulau Jawa sebesar 51,80 persen dan di luar Pulau Jawa sebesar 48,20 persen. Dalam periode 2012–2014, produksi tertinggi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terjadi pada tahun 2014, yaitu masing-masing sebesar 556,67 ribu ton dan 517,94 ribu ton.
3. Pada periode tahun 2013–2014, peningkatan produksi cabai besar terjadi pada setiap triwulan, yaitu triwulan I sebesar 17,97 ribu ton (6,77 persen), pada triwulan II sebesar 5,33 ribu ton (1,86 persen), triwulan III sebesar 23,11 ribu ton (9,02 persen), dan triwulan IV sebesar 15,33 ribu ton (7,51 persen).

Tabel 17.1
Perkembangan Produksi Cabai Besar (ton)
Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014

Uraian	2012	2013	2014	Perkembangan			
				2012–2013		2013–2014	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Wilayah							
Pulau Jawa	453 990	520 616	556 671	66 626	14,68	36 055	6,93
Luar Pulau Jawa	500 373	492 263	517 940	-8 110	-1,62	25 677	5,22
Indonesia	954 363	1 012 879	1 074 611	58 516	6,13	61 732	6,09
Triwulan							
Triwulan I	264 887	265 446	283 411	559	0,21	17 965	6,77
Triwulan II	255 277	287 063	292 390	31 786	12,45	5 327	1,86
Triwulan III	235 559	256 319	279 433	20 760	8,81	23 114	9,02
Triwulan IV	198 640	204 051	219 377	5 411	2,72	15 326	7,51

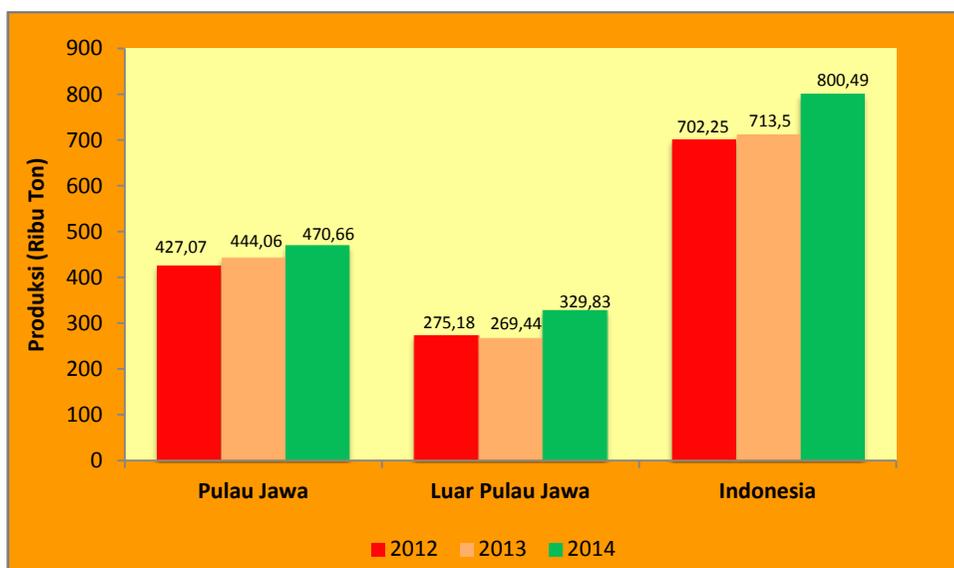
*Keterangan: Bentuk hasil produksi cabai besar adalah buah segar dengan tangkai
Cabai besar terdiri dari cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau keriting*

B. CABAI RAWIT

1. Produksi cabai rawit tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 86,98 ribu ton (12,19 persen) dibandingkan tahun 2013. Kenaikan produksi cabai rawit dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi di Pulau Jawa sebesar 26,59 ribu ton (5,99 persen) dan di luar Pulau Jawa sebesar 60,39 ribu ton (22,41 persen).
2. Persentase produksi cabai rawit tahun 2014 sebesar 58,80 persen di Pulau Jawa dan 41,20 persen di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2012–2014, Pulau Jawa masih menjadi sentra produksi cabai rawit Indonesia. Produksi cabai rawit tertinggi terjadi pada tahun 2014 dibanding dua tahun sebelumnya, di Pulau Jawa sebesar 470,66 ribu ton dan di luar Pulau Jawa sebesar 329,83 ribu ton.
3. Dari tahun 2013 ke tahun 2014, peningkatan produksi terjadi pada triwulan I sebesar 11,89 ribu ton (7,93 persen), triwulan II sebesar 36,28 ribu ton (18,77 persen), triwulan III sebesar 38,73 ribu ton (20,50 persen), dan triwulan IV sebesar 81 ton (0,04 persen).

**Produksi cabai rawit tahun
2014 sebesar 0,800 juta ton**

Grafik 17.2
Perkembangan Produksi Cabai Rawit Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014



Tabel 17.2
Perkembangan Produksi Cabai Rawit (ton)
Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014

Uraian	2012	2013	2014	Perkembangan			
				2012–2013		2012–2013	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Wilayah							
Pulau Jawa	427 068	444 062	470 655	16 994	3,98	26 593	5,99
Luar Pulau Jawa	275 184	269 440	329 829	-5 744	-2,09	60 389	22,41
Indonesia	702 252	713 502	800 484	11 250	1,60	86 982	12,19
Triwulan							
Triwulan I	151 785	149 858	161 749	-1 927	-1,27	11 891	7,93
Triwulan II	215 936	193 289	229 573	-22 647	-10,49	36 284	18,77
Triwulan III	186 691	188 898	227 624	2 207	1,18	38 726	20,50
Triwulan IV	147 840	181 457	181 538	33 617	22,74	81	0,04

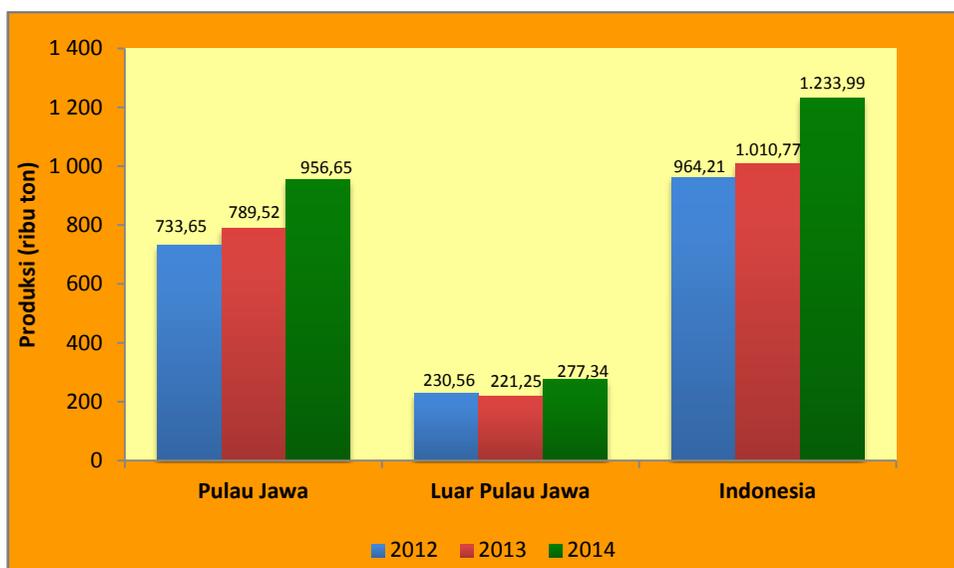
*Keterangan: Bentuk hasil produksi cabai rawit adalah buah segar dengan tangkai
 Cabai rawit terdiri dari cabai rawit merah dan cabai rawit hijau*

C. BAWANG MERAH

1. Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak 223,22 ribu ton (22,08 persen) dibandingkan pada tahun 2013. Peningkatan produksi tersebut disebabkan meningkatnya produksi di Pulau Jawa sebesar 167,13 ribu ton atau sebesar 21,17 persen dan di luar Pulau Jawa sebesar 56,08 ribu ton atau sebesar 25,35 persen.
2. Persentase produksi bawang merah Indonesia tahun 2014 menurut wilayah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing sebesar 77,53 persen dan 22,47 persen. Produksi tertinggi di Pulau Jawa dicapai pada tahun 2014, dimana produksi mencapai 956,65 ribu ton. Produksi tertinggi di luar Pulau Jawa juga dicapai pada tahun 2014, dimana produksi mencapai 277,34 ribu ton.
3. Dari tahun 2013 ke tahun 2014, peningkatan produksi terjadi pada triwulan I sebesar 30,82 ribu ton (12,69 persen), triwulan II sebesar 85,14 ribu ton (35,81 persen), triwulan III sebesar 38,02 ribu ton (12,70 persen), dan triwulan IV sebesar 69,23 ribu ton (30,00 persen).

Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton

Grafik 17.3
Perkembangan Produksi Bawang Merah Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014



Tabel 17.3
Perkembangan Produksi Bawang Merah (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014

Uraian	2012	2013	2014	Perkembangan			
				2012–2013		2013–2014	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Wilayah							
Pulau Jawa	733 657	789 520	956 653	55 863	7,61	167 133	21,17
Luar Pulau Jawa	230 564	221 253	277 336	- 9 311	-4,04	56 083	25,35
Indonesia	964 221	1 010 773	1 233 989	46 552	4,83	223 216	22,08
Triwulan							
Triwulan I	227 560	242 929	273 753	15 369	6,75	30 824	12,69
Triwulan II	231 068	237 753	322 892	6 685	2,89	85 139	35,81
Triwulan III	300 968	299 299	337 319	-1 669	-0,55	38 020	12,70
Triwulan IV	204 625	230 792	300 025	26 167	12,79	69 233	30,00

Keterangan: Bentuk hasil produksi bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun

XVIII. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERTANIAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN, 2014

A. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI TAHUN 2014

A.1 PADI

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah sebesar Rp12,7 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman padi sawah yang terbesar adalah upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencapai 48,23 persen dari total biaya atau sebesar Rp 6,1 juta (Tabel 18.1). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp17,2 juta.

**Total biaya per musim tanam
untuk satu hektar luas panen
padi sawah sebesar Rp12,7 juta**

Tabel 18.1
Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha
Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang (ribu rupiah), 2014

Uraian	Padi Sawah		Padi Ladang	
	Nilai	% biaya	Nilai	% biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	17 174,66	-	10 249,76	-
B. Biaya Produksi	12 677,27	100,00	7 821,90	100,00
1. Bibit/Benih	406,97	3,21	282,23	3,61
2. Pupuk	1 318,60	10,40	607,27	7,76
3. Pestisida	233,96	1,85	135,33	1,73
4. Upah Pekerja dan Jasa Pertanian	6 114,71	48,23	4 877,45	62,36
5. Sewa Lahan	3 785,42	29,86	1 387,50	17,74
6. Sewa Alat/Sarana Usaha	328,92	2,59	175,30	2,24
7. Bahan Bakar	86,48	0,68	70,99	0,91
8. Lainnya	402,22	3,17	285,82	3,65

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi ladang sebesar Rp7,8 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman padi ladang yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencakup 62,36 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,9 juta. (Tabel 18.1). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp 10,2 juta.

**Total biaya per musim tanam
untuk satu hektar luas panen
padi ladang sebesar Rp 7,8 juta**

A.2 JAGUNG

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen jagung sebesar Rp9,1 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman jagung yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencapai 44,93 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,1 juta. (Tabel 18.2). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp12,0 juta.

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen jagung sebesar Rp9,1 juta

Tabel 18.2
Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha
Tanaman Jagung dan Kedelai (ribu rupiah), 2014

Uraian	Jagung		Kedelai	
	Nilai	% biaya	Nilai	% biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	12 045,23	–	9 020,14	–
B. Biaya Produksi	9 140,12	100,00	9 136,50	100,00
1. Bibit/Benih	728,59	7,97	628,06	6,87
2. Pupuk	1 096,30	11,99	433,62	4,75
3. Pestisida	110,88	1,21	200,87	2,20
4. Upah Pekerja dan Jasa Pertanian	4 106,99	44,93	4 095,18	44,82
5. Sewa Lahan	2 532,35	27,71	3 255,84	35,64
6. Sewa Alat/Sarana Usaha	172,50	1,89	164,69	1,80
7. Bahan Bakar	79,83	0,87	72,62	0,79
8. Lainnya	312,68	3,42	285,62	3,13

A.3 KEDELAI

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen kedelai sebesar Rp9,1 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman kedelai yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencakup 44,82 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,1 juta (Tabel 18.2). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp9,0 juta.

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen kedelai sebesar Rp9,1 juta

B. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN CABAI MERAH, CABAI RAWIT, BAWANG MERAH, DAN JERUK TAHUN 2014

B.1 CABAI MERAH

1. Total biaya produksi usaha tanaman cabai merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp52,1 juta. Biaya produksi terbesar adalah upah pekerja sebesar 47,74 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp77,1 juta.
2. Biaya produksi tanaman cabai merah yang ditanam pada Musim Kemarau (MK) lebih tinggi dibandingkan dengan pada Musim Hujan (MH).

Tabel 18.3
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah per Hektar per Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	83 935,48	–	63 692,23	–
B. Biaya Produksi	54 135,84	100,00	48 051,34	100,00
1. Benih	2 048,61	3,78	2 030,19	4,23
2. Pupuk	9 274,20	17,14	8 264,54	17,19
3. Pestisida	2 928,23	5,41	2 949,24	6,14
4. Bahan bakar	705,01	1,30	206,31	0,43
5. Jaring pelindung	51,47	0,10	22,59	0,05
6. Mulsa	3 174,66	5,86	3 426,54	7,13
7. Upah pekerja	26 257,40	48,50	22 125,04	46,05
8. Sewa lahan	5 126,78	9,47	4 837,84	10,06
9. Pengeluaran lainnya	4 569,48	8,44	4 189,05	8,72

B.2 CABAI RAWIT

1. Total biaya produksi usaha tanaman cabai rawit per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp34,0 juta. Biaya produksi terbesar adalah upah pekerja sebesar 54,85 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp55,2 juta.
2. Biaya produksi tanaman cabai rawit yang ditanam pada MK sebesar Rp37,2 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan pada MH sebesar Rp28,3 juta.

Tabel 18.4
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Rawit per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	63 352,41	–	40 660,34	–
B. Biaya Produksi	37 247,92	100,00	28 288,78	100,00
1. Benih	1 744,94	4,68	1 522,83	5,38
2. Pupuk	4 887,27	13,11	4 288,91	15,16
3. Pestisida	958,42	2,57	660,67	2,34
4. Bahan bakar	298,10	0,80	106,89	0,38
5. Jaring pelindung	13,90	0,04	26,34	0,09
6. Mulsa	915,26	2,46	587,71	2,08
7. Upah pekerja	20 689,82	55,54	15 061,49	53,23
8. Sewa lahan	5 263,37	14,14	4 091,63	14,47
9. Pengeluaran lainnya	2 476,84	6,66	1 942,31	6,87

B.3 BAWANG MERAH

1. Total biaya produksi usaha tanaman bawang merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp67,2 juta. Biaya produksi terbesar adalah biaya untuk benih sebesar 38,58 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp77,2 juta.
2. Pada tahun 2014, biaya produksi tanaman bawang merah yang ditanam pada MK (Rp64,6 juta) lebih rendah dibandingkan pada MH (Rp72,2 juta).

Tabel 18.5
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Bawang Merah per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	86 575,83	–	59 833,57	–
B. Biaya Produksi	64 565,21	100,00	72 189,79	100,00
1. Benih	22 851,62	35,39	31 684,00	43,89
2. Pupuk	5 509,96	8,53	5 206,93	7,22
3. Pestisida	4 915,77	7,61	5 590,41	7,74
4. Bahan bakar	588,77	0,91	858,46	1,19
5. Jaring pelindung	27,93	0,04	23,01	0,03
6. Mulsa	571,09	0,89	599,50	0,83
7. Upah pekerja	20 185,58	31,27	20 697,02	28,68
8. Sewa lahan	6 830,34	10,58	5 180,37	7,18
9. Pengeluaran lainnya	3 084,15	4,78	2 350,09	3,24

B.4 JERUK

Total biaya produksi tanaman jeruk per 100 pohon selama setahun yang dipanen sendiri mencapai Rp5,4 juta dan yang ditebaskan mencapai Rp5,7 juta. Persentase biaya produksi terbesar tanaman jeruk yang dipanen sendiri adalah upah pekerja sebesar 32,07 persen (Rp1,7 juta) dan yang ditebaskan adalah biaya untuk pupuk sebesar 28,41 persen (Rp1,6 juta). Nilai produksi usaha tanaman jeruk per 100 pohon yang dipanen sendiri dan ditebaskan masing-masing sebesar Rp10,1 juta dan Rp13,0 juta.

Tabel 18.6
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jeruk per 100 Pohon yang Dipanen Sendiri dan Ditebaskan 2014

Uraian	Dipanen Sendiri		Ditebaskan	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	10 087,43	–	12 967,35	–
B. Biaya Produksi	5 441,21	100,00	5 666,30	100,00
1. Benih	195,35	3,59	119,65	2,11
2. Pupuk	1 078,92	19,82	1 609,97	28,41
3. Pestisida	402,93	7,41	558,95	9,86
4. Bahan bakar	52,91	0,97	117,02	2,07
5. Jaring pelindung	2,63	0,05	4,90	0,09
6. Mulsa	3,56	0,07	0,30	0,01
7. Upah pekerja	1 744,85	32,07	1 033,32	18,24
8. Sewa lahan	1 533,95	28,20	1 536,18	27,11
9. Pengeluaran lainnya	426,11	7,82	686,01	12,10

C. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN KELAPA SAWIT, KARET, DAN TEBU TAHUN 2014

1. Rata-rata biaya produksi usaha perkebunan tebu per hektar Setahun mencapai 77,98 persen (Rp24,2 juta) dari nilai produksi. Sementara untuk komoditas karet mencapai 71,54 persen (Rp9,2 juta) dan kelapa sawit sebesar 57,05 persen (Rp9,7 juta). Secara relatif kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit lebih menguntungkan dibandingkan usaha perkebunan karet atau tebu.

Secara relatif kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit lebih menguntungkan dibandingkan usaha perkebunan karet atau tebu

2. Pada usaha perkebunan kelapa sawit sebagian besar biaya digunakan untuk membayar upah tenaga kerja sebesar 31,71 persen. Demikian pula untuk

usaha perkebunan karet, pengeluaran terbesar untuk tenaga kerja sebesar 57,09 persen.

3. Pada usaha perkebunan tebu pengeluaran terbesar adalah untuk sewa lahan sebesar 32,37 persen dari seluruh total biaya. Pada komoditas tebu, rata-rata biaya untuk jasa pertanian relatif cukup besar yaitu mencapai 4,74 persen.

Tabel 18.7
Nilai Produksi Dan Biaya Per Hektar Usaha Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014

Subsektor	Komoditas					
	Kelapa Sawit		Karet		Tebu	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. A. Nilai Produksi	17 026,01	-	12 877,97	-	31 044,66	-
B. B. Biaya Produksi	9 712,16	100,00	9 211,69	100,00	24 214,17	100,00
1. Benih/Penyisipan/Tanaman Pelindung	106,95	1,10	83,68	0,91	3 055,32	12,62
2. Pupuk	1 791,14	18,44	300,64	3,27	2 913,26	12,04
3. Stimulan	4,97	0,05	5,56	0,06	20,03	0,08
4. Pestisida	225,95	2,33	104,99	1,14	83,70	0,34
5. Tenaga Kerja	3 079,94	31,71	5 259,37	57,09	6 346,06	26,21
6. Sewa Lahan	3 008,30	30,97	2 244,74	24,37	7 838,92	32,37
7. Sewa Alat dan Sarana	231,72	2,38	183,12	1,99	259,86	1,07
8. Jasa Pertanian	156,35	1,61	48,31	0,52	1 147,87	4,74
9. Pengeluaran Lainnya	1 106,84	11,41	981,28	10,65	2 549,15	10,53

D. STRUKTUR ONGKOS USAHA SAPI POTONG, SAPI PERAH, AYAM RAS PETELUR, DAN AYAM RAS PEDAGING TAHUN 2014

D.1 SAPI POTONG

1. Total biaya produksi usaha sapi potong di rumah tangga untuk setiap ekor dalam setahun sebesar Rp3,6 juta. Sebagian besar biaya digunakan untuk pakan Rp2,1 juta per ekor per tahun (57,78 persen) dan biaya pekerja Rp1,2 juta per ekor per tahun (33,53 persen). Biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp.71 ribu per ekor per tahun dan Rp123 ribu per ekor per tahun, sedangkan sisa biaya lainnya adalah untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan air.

Total biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen)

2. Dengan nilai produksi sebesar Rp4,1 juta per ekor per tahun maka usaha peternakan sapi potong mendapat keuntungan Rp523 ribu per ekor per tahun. Pada umumnya sebagian kegiatan pengusahaan sapi potong dilakukan sendiri oleh peternak dan pakan ternak tidak membeli.

Tabel 18.8
Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun Usaha Sapi Potong dan Sapi Perah 2014

Uraian	Sapi Potong		Sapi Perah	
	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	4 115	–	7 753	–
B. Biaya Produksi	3 592	100,00	5 596	100,00
1. Upah Pekerja	1 204	33,53	1 373	24,53
2. Pakan	2 075	57,78	3 723	66,52
Hijauan Pakan Ternak	1 662	46,27	2 007	35,86
Pakan Buatan Pabrik	45	1,24	904	16,16
Pakan Lainnya	369	10,27	812	14,50
3. Bahan Bakar Minyak	69	1,91	126	2,25
4. Listrik	18	0,50	22	0,39
5. Air	32	0,88	28	0,51
6. Pemeliharaan Kesehatan	71	1,97	77	1,37
7. Pengeluaran Lain-lain	123	3,43	248	4,43

D.2 SAPI PERAH

1. Total biaya produksi usaha sapi perah di rumah tangga untuk setiap ekor dalam setahun sebesar Rp5,6 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu sebesar Rp3,7 juta per ekor per tahun (66,52 persen) dan biaya pekerja yaitu sebesar Rp1,4 juta per ekor per tahun (24,53 persen). Biaya untuk pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp77 ribu per ekor per tahun (1,37 persen) dan Rp248 ribu per ekor per tahun (4,43 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.

Total biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen)

2. Dengan nilai produksi mencapai Rp7,8 juta per ekor per tahun, maka peternak sapi perah mendapat keuntungan Rp2,2 juta per ekor per tahun.

D.3 AYAM RAS PETELUR

1. Total biaya produksi usaha ayam ras petelur untuk 1.000 ekor dalam setahun membutuhkan Rp123,6 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu Rp103,3 juta per 1.000 ekor per tahun (83,58 persen) dan biaya pekerja yaitu sebesar Rp12,5 juta per 1.000 ekor per tahun (10,14 persen). Biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp3,1 juta per 1.000 ekor per tahun (2,47 persen) dan Rp2,7 juta per 1.000 ekor per tahun (2,15 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.
2. Dengan nilai produksi mencapai Rp146 juta per 1.000 ekor per tahun, maka peternak ayam ras petelur mendapat keuntungan Rp22,3 juta per 1.000 ekor per tahun. Produktivitas ayam ras petelur mencapai 703 butir per 1.000 ekor per hari. Dalam setahun, rata-rata periode produksi telur selama 261 hari, sedangkan rata-rata rontok bulu selama 43 hari.

Total biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen)

D.4 AYAM RAS PEDAGING

1. Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging untuk 5.000 ekor membutuhkan Rp113,2 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu sebesar Rp73,2 juta per 5.000 ekor (64,69 persen) dan pembelian *Day Old Chick* (DOC) sebesar Rp21,9 juta per 5.000 ekor (19,36 persen). Selain itu, biaya untuk pekerja sebesar Rp10,8 juta per 5.000 ekor (9,57 persen), pemeliharaan kesehatan sebesar Rp2 juta per 5.000 ekor (1,81 persen), dan

Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen)

biaya lain-lain Rp3,7 juta per 5.000 ekor (3,30 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.

2. Dengan nilai produksi mencapai Rp158 juta per 5.000 ekor, peternak ayam ras pedaging mendapat keuntungan Rp44,8 juta per 5.000 ekor. Rumah tangga usaha ayam ras pedaging rata-rata memelihara 5,11 siklus setahun, dengan rata-rata lama siklus 40 hari, dan rata-rata bobot ayam per ekor 1,69 kg.

Tabel 18.9
Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Tahun Usaha Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging, 2014

Uraian	Ayam Ras Petelur		Ayam Ras Pedaging	
	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per 1.000 Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per 5.000 Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	145 970	–	158 001	–
B. Biaya Produksi	123 640	100,00	113 239	100,00
1 Upah Pekerja	12 534	10,14	10 838	9,57
2 Pakan	103 336	83,58	73 248	64,69
- Biji-bijian	18 484	14,95	620	0,55
- Pakan Buatan Pabrik	53 027	42,89	69 079	61,00
- Pakan Lainnya	31 825	25,74	3 549	3,14
3 Bahan Bakar Minyak (BBM)	885	0,72	593	0,52
4 Listrik	727	0,59	488	0,43
5 Air	438	0,35	366	0,32
6 Pemeliharaan Kesehatan	3 055	2,47	2 050	1,81
7 Pengeluaran Lain-lain	2 665	2,15	3 735	3,30
8 Pembelian <i>Day Old Chick</i> (DOC)	–	–	21 921	19,36

E. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERIKANAN TAHUN 2014

E.1 BUDIDAYA IKAN

1. Jumlah biaya per hektar dalam satu siklus usaha budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta (48,36 persen), Rp4,2 juta (71,91 persen), dan Rp3,2 juta (44,16 persen) terhadap nilai produksi. Keuntungan yang diperoleh sebesar masing-masing sebesar Rp7,8 juta (51,64 persen), Rp1,6 juta (28,09 persen), dan Rp4,1 juta (55,84 persen).
2. Biaya terbesar untuk budidaya rumput laut adalah benih/bibit yang mencapai Rp3 juta (41,33 persen), diikuti upah pekerja sebesar Rp2,5 juta (33,60 persen). Biaya terbesar usaha bandeng adalah untuk upah pekerja yang mencapai Rp965 ribu (23,21 persen) diikuti sewa lahan sebesar Rp960 ribu (23,08 persen). Sedangkan biaya terbesar usaha udang windu adalah upah pekerja yang mencapai Rp796 ribu (24,73 persen) diikuti oleh biaya sewa lahan sebesar Rp758 ribu (23,56 persen).

Tabel 18.10
Nilai Produksi dan Biaya per Hektar per Siklus
Usaha Budidaya Rumput Laut, Bandeng, dan Udang Windu, 2014

Uraian	Rumput Laut		Bandeng		Udang Windu	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Nilai Produksi	15 182,9	–	5 784,24	–	7 290,35	–
B. Biaya Produksi	7 342,8	100,00	4 159,74	100,00	3 219,76	100,00
- Benih/Bibit	3 034,7	41,30	480,28	11,54	553,68	17,20
- Pupuk dan Obat-obatan	2,9	0,04	482,71	11,61	286,01	8,89
- Pakan	0,1	0,00	716,37	17,22	331,86	10,31
- Upah Pekerja	2 467,4	33,60	965,31	23,21	795,98	24,73
- Sewa Lahan	361,5	4,92	960,23	23,08	758,43	23,56
- Alat/Sarana Usaha	304,4	4,15	83,85	2,02	78,95	2,45
- Lainnya	1 171,8	15,96	470,99	11,32	414,70	12,88

E.2 PENANGKAPAN IKAN

Jumlah biaya per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor sebesar Rp4,1 juta dan menggunakan perahu motor tempel sebesar Rp436 ribu. Biaya terbesar yang dikeluarkan adalah upah/gaji pekerja masing-masing

mencapai Rp1,7 juta (40,94 persen) dan Rp177 ribu (40,47 persen) diikuti oleh biaya BBM masing-masing sebesar Rp876 ribu (21,21 persen) dan Rp96 ribu (21,93 persen).

Tabel 18.11
Nilai Produksi dan Biaya per Trip Usaha Penangkapan Ikan di Laut
Menggunakan Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel, 2014

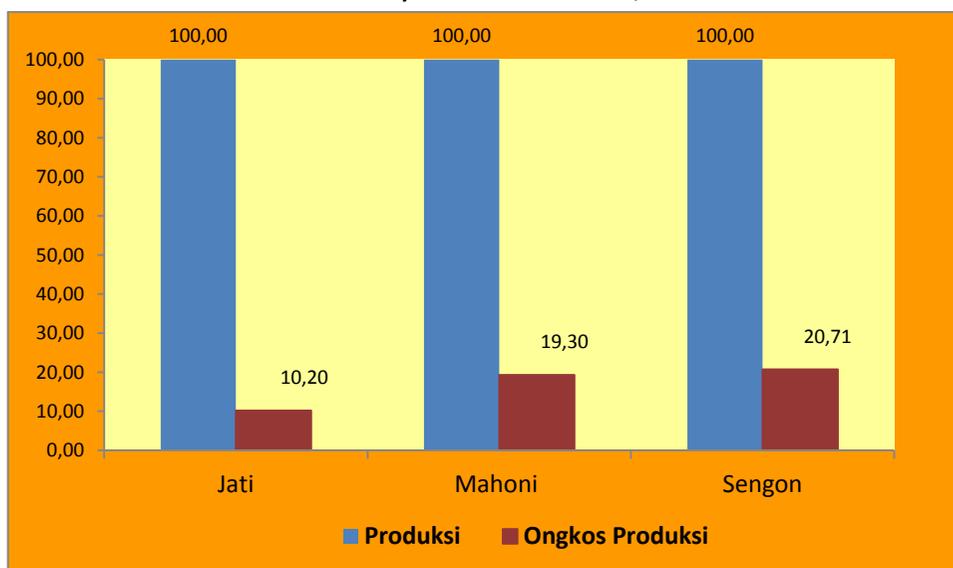
Uraian	Kapal Motor		Perahu Motor Tempel	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Produksi Hasil Penangkapan	6 211	-	813	-
B. Biaya Penangkapan	4 133	100,00	436	100,00
-Upah/gaji pekerja	1 692	40,94	177	40,47
-BBM	876	21,21	96	21,93
-Oli/Pelumas	72	1,73	13	2,93
-Garam/Es	181	4,37	15	3,55
-Perbekalan	661	15,99	64	14,58
-Sewa sarana/alat	213	5,16	19	4,28
-Pemeliharaan sarana/alat	140	3,40	14	3,15
-Penyusutan barang modal	151	3,66	16	3,74
-Biaya lainnya	146	3,53	23	5,37

F. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN JATI, MAHONI, DAN SENGON TAHUN 2014

1. Persentase ongkos produksi terhadap nilai produksi per 100 pohon untuk masing-masing tanaman jati, mahoni, dan sengon sebesar 10,20 persen, 19,30 persen, dan 20,71 persen (Gambar 18.1).
2. Pengeluaran terbesar untuk usaha tanaman kehutanan adalah untuk upah pekerja. Upah pekerja untuk usaha tanaman jati, mahoni dan sengon masing-masing sebesar 63,99 persen, 63,00 persen, dan 59,00 persen dari total pengeluaran/ongkos produksi (Tabel 18.12).

Total pengeluaran/ ongkos produksi per 100 pohon untuk tanaman jati, mahoni, sengon lebih dari Rp 0,5 juta

Grafik 18.1
Persentase Ongkos Produksi Terhadap Nilai Produksi per 100 Pohon
Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014



Tabel 18.12
Nilai Produksi dan Ongkos Produksi per 100 Pohon
Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014

Uraian	Komoditas					
	Jati		Mahoni		Sengon	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Produksi	8 791,18	-	6 069,90	-	3 963,07	-
B. Ongkos Produksi	896,42	100,00	1 171,57	100,00	820,60	100,00
1. Pupuk	61,31	6,84	66,50	5,68	129,67	15,80
2. Pestisida	10,78	1,20	22,60	1,93	23,37	2,85
3. Upah Pekerja	573,63	63,99	738,13	63,00	484,17	59,00
a. Pemeliharaan/penyiangan	459,01	51,21	608,67	51,95	347,84	42,39
b. Pemupukan	35,55	3,97	50,53	4,31	76,41	9,31
c. Pengendalian OPT	7,22	0,81	21,40	1,83	15,30	1,86
d. Pemanenan/penebangan	71,84	8,01	57,53	4,91	44,61	5,44
4. Jasa Pertanian	55,58	6,20	83,09	7,09	35,33	4,31
5. Penyusutan Barang Modal	31,18	3,48	31,58	2,70	22,03	2,68
6. Sewa Alat Tanpa Operator	18,22	2,03	9,20	0,79	2,74	0,33
7. Sewa Lahan dan Bunga Modal	9,83	1,10	35,44	3,02	23,14	2,82
8. Pengeluaran Lainnya	135,90	15,16	185,04	15,79	100,15	12,20

G. KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2014

1. Jumlah rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan hutan pada tahun 2014 sebanyak 8.643.228 rumah tangga; 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan. Dari yang menguasai lahan kawasan hutan tersebut, 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah.

Persentase rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang menguasai lahan kawasan hutan sebesar 20,39 persen

2. Masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mengetahui keberadaan kawasan hutan sebesar 64,80 persen dan tidak mengetahui sebesar 35,20 persen. Terjadi penurunan dari tahun 2004, hal ini dapat disebabkan karena kawasan hutan tidak semuanya berupa hutan tegakan/tumbuhan yang ada kayunya namun ada yang berupa padang savana (padang rumput) (Grafik 18.2).

Tabel 18.13
Jumlah dan Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah, 2004 dan 2014

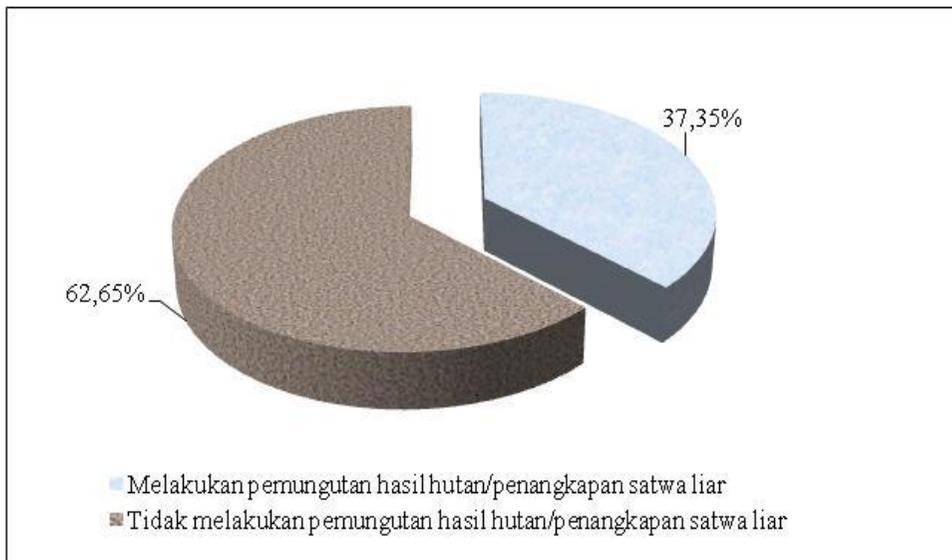
Uraian	Tahun	
	2004	2014
(1)	(2)	(3)
Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan	7 804 970	8 643 228
Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan berpindah	259 959	242 866
Persentase	3,33%	2,81%

Grafik 18.2
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan, 2004 dan 2014



- Hutan merupakan sumber daya alam yang juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Dari hasil Survei Kehutanan 2014 (SKH 2014) rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang melakukan pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar sebanyak 37,35 persen.

Grafik 18.3
Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Pemungutan Hasil Hutan/Penangkapan Satwa Liar, 2014

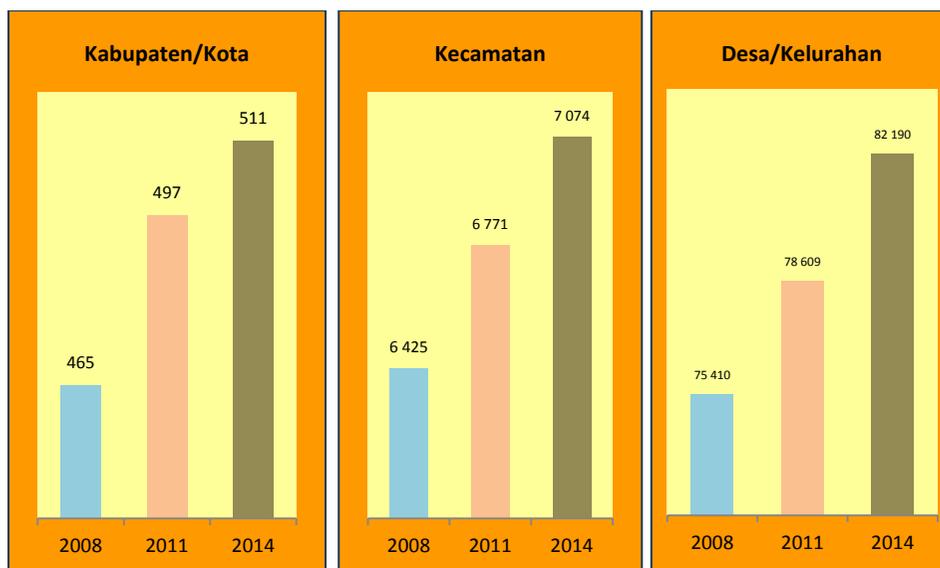


XIX. TIPOLOGI WILAYAH HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2014

A. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pendataan Podes dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang didata harus memenuhi 3 syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah, 2) mempunyai penduduk, dan 3) mempunyai pemerintahan desa. Menurut Podes 2014, tercatat sebanyak 82.190 wilayah setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa⁵, 8.412 kelurahan, dan 69 UPT. Selain itu, juga tercatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota. Lihat Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Grafik 19.1
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes, 2008–2014



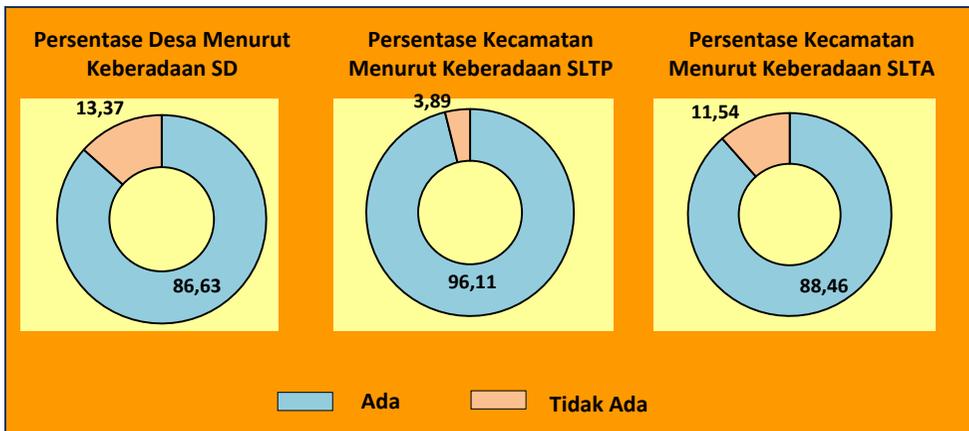
⁵ Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat

B. Infrastruktur

B.1 Pendidikan

1. Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa 86,63 persen desa/kelurahan mempunyai sarana SD (termasuk Madrasah Ibtidaiyah). Hanya 10.985 desa/kelurahan (13,37 persen) yang tidak mempunyai SD. Untuk desa/kelurahan tanpa SD, 2.438 desa/kelurahan (22,19 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SD terdekat lebih dari 3 km.
2. Sarana pendidikan SLTP telah ada di 6.799 kecamatan (96,11 persen). Sehingga, masih terdapat 275 kecamatan (3,89 persen) yang tidak ada SLTP. Untuk kecamatan tanpa SLTP, sebanyak 184 kecamatan (66,91 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SLTP terdekat lebih dari 6 km.
3. Sarana pendidikan SLTA telah ada di 88,46 persen kecamatan. Sehingga, masih terdapat 816 kecamatan (11,54 persen) yang tidak ada SLTA. Untuk kecamatan tanpa SLTA, sebanyak 508 kecamatan (62,33 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SLTA terdekat lebih dari 6 km.

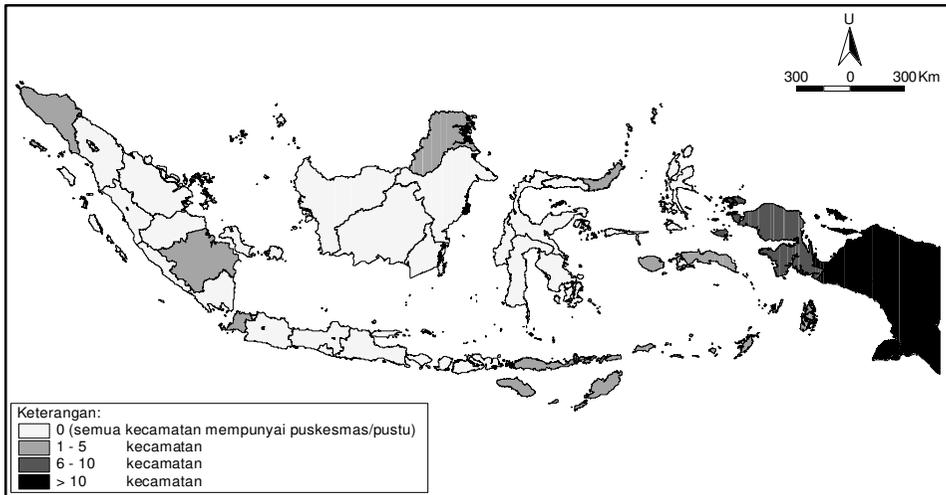
Grafik 19.2
Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2014



B.2 Kesehatan

Tersedianya pelayanan kesehatan dasar merupakan hak masyarakat yang menjadi pelayanan publik pemerintah. Podes 2014 menunjukkan bahwa 6.957 kecamatan (98,35 persen) telah mempunyai Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu). Sebanyak 117 kecamatan yang belum mempunyai Puskesmas/Pustu tersebar di 9 provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Lihat Lampiran 5.

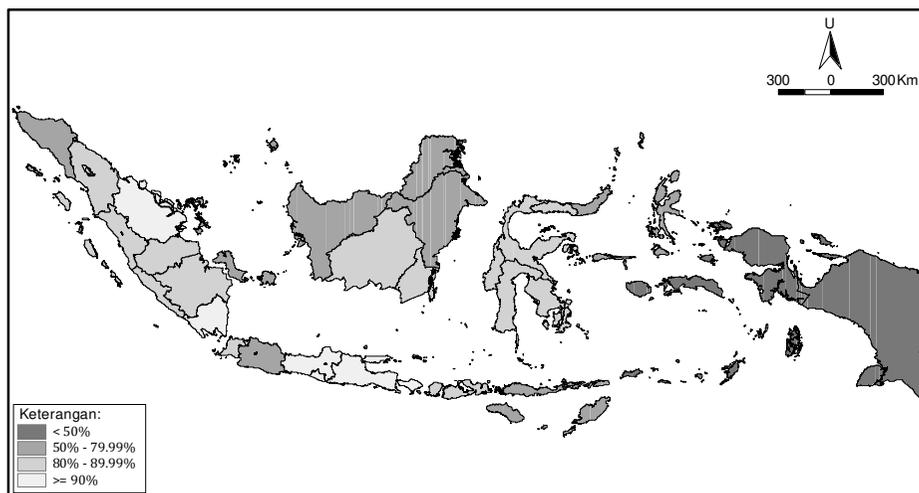
Grafik 19.3
Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014



B.3 Pasar dengan Bangunan

Tersedianya pasar di suatu wilayah menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian wilayah tersebut. Podes 2014 mencatat sebanyak 15.340 desa/kelurahan (18,66 persen) di 5.579 kecamatan, ternyata sudah ada pasar dengan bangunan (permanen atau semi permanen). Masih terdapat 1.495 kecamatan (21,13 persen) yang tidak ada pasar dengan bangunan. Lihat Lampiran 7.

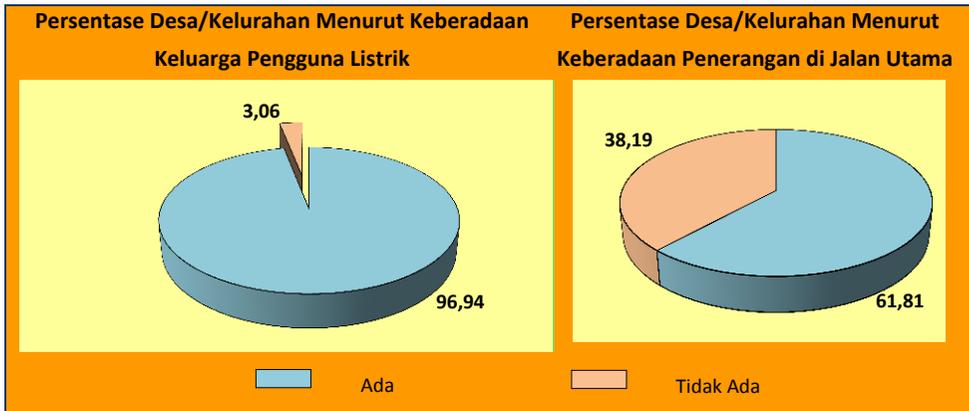
Grafik 19.4
Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014



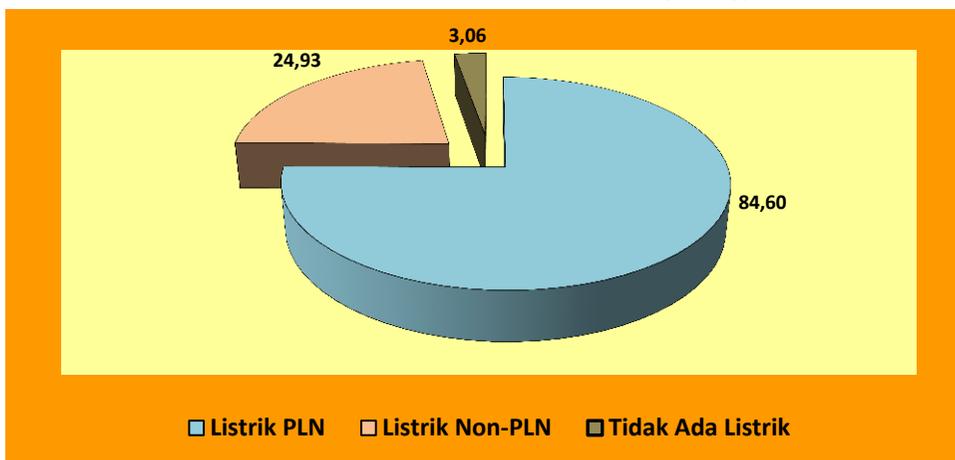
B.4 Listrik

1. Ketersediaan energi listrik sangat penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah. Tercatat sebanyak 69.531 desa/kelurahan (84,60 persen) telah ada keluarga pengguna listrik PLN. Selain itu, ada 4 provinsi yang seluruh desa/kelurahannya yang sudah ada keluarga pengguna listrik PLN. Keempat provinsi tersebut, yaitu: DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali. Lihat Lampiran 6.
2. Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19 persen) belum tersedia penerangan di jalan utama desa/kelurahan. Papua dan Nusa Tenggara Timur adalah dua provinsi dengan persentase tertinggi desa/kelurahan yang tidak ada penerangan di jalan utama (diatas 90 persen).

Grafik 19.5
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama



Grafik 19.6
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik

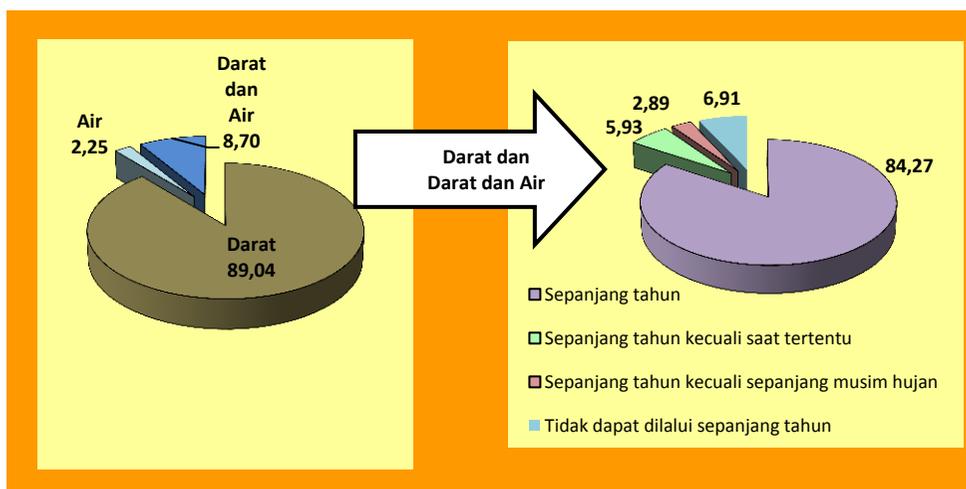


B.5 Jalan

Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ketersediaan jalan akan meningkatkan efisiensi proses produksi dan distribusi. Hasil Podes 2014 menunjukkan sebanyak 80.337 desa/kelurahan yang menggunakan sarana transportasi darat, dimana 67.701 desa/kelurahan (84,27 persen) diantaranya sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Sebaliknya, masih ada 12.636 desa/kelurahan (15,73 persen) yang lalu-lintasnya bergantung pada kondisi jalan dan musim. Lihat Lampiran 8.

Grafik 19.7

Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih



C. Desa/Kelurahan Terdepan

Desa/kelurahan terdepan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain. Menurut Podes 2014, sebanyak 258 desa/kelurahan yang letaknya terdepan, berbatasan darat secara langsung dengan wilayah negara lain. Jumlah penduduk yang menghuni desa/kelurahan terdepan sebanyak 191.043 jiwa. Ke-256 desa/kelurahan tersebut berada di 67 kecamatan, 17 kabupaten, dan 5 provinsi, yaitu: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua.

Tabel 19.1
Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan Menurut Provinsi, 2014

No	Provinsi	Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan			
		Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	
				Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nusa Tenggara Timur	4	17	62	78 443
2	Kalimantan Barat	5	14	65	68 606
3	Kalimantan Timur	1	1	1	513
4	Kalimantan Utara	2	13	81	26 504
5	Papua	5	22	49	16 977
Indonesia		17	67	258	191 043

D. Desa/Kelurahan Terluar

Desa/kelurahan terluar adalah desa/kelurahan yang sebagian atau seluruh wilayahnya berada di pulau kecil terluar. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 mencantumkan sebanyak 92 pulau kecil terluar. Podes 2014 mencatat ada sebanyak 313 desa/kelurahan yang wilayahnya berada di dalam 77 pulau dari 92 pulau kecil terluar. Jumlah penduduk yang menghuni desa/kelurahan terluar sebanyak 375.883 jiwa. Sementara itu, ada 15 pulau kecil terluar yang bukan bagian dari wilayah suatu desa/kelurahan atau tanpa penduduk. Ke-15 pulau tersebut adalah Pulau Mega (Bengkulu); Pulau Barung, Pulau Sekel, dan Pulau Panehan (Jawa Timur); Pulau Manuk (Jawa Barat); Pulau Batek (Nusa Tenggara Timur); Pulau Gosong Makasar (Kalimantan Utara); Pulau Sambit (Kalimantan Timur); Pulau Batarkusu dan Pulau Meitimjarang (Maluku); Pulau Jiew (Maluku Utara); Pulau Budd, Pulau Fani, dan Pulau Miossu (Papua Barat); dan Pulau Laag (Papua). Secara lengkap, berikut disajikan jumlah wilayah administrasi pemerintahan terluar menurut provinsi.

Tabel 19.2
Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2014

No	Provinsi	Jumlah Pulau Kecil Terluar		Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar			
		Menurut PP No 78 Tahun 2005	Ada Wilayah Desa/Kelurahan (Podes 2014)	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	6	6	4	6	6	2 925
2	Sumatera Utara	3	3	3	3	8	4 077
3	Sumatera Barat	2	2	1	2	2	5 714
4	Riau	1	1	1	1	1	5 994
5	Bengkulu	2	1	1	1	6	3 001
6	Lampung	1	1	1	1	1	1 761
7	Kepulauan Riau	19	19	5	11	17	19 194
8	Jawa Barat	1	-	-	-	-	-
9	Jawa Tengah	1	1	1	2	2	21 831
10	Jawa Timur	3	-	-	-	-	-
11	Banten	1	1	1	1	1	6 194
12	Nusa Tenggara Barat	1	1	1	1	1	12 357
13	Nusa Tenggara Timur	5	4	4	14	123	150 027
14	Kalimantan Timur	2	1	1	1	4	3 677
15	Kalimantan Utara	2	1	1	5	19	37 734
16	Sulawesi Utara	11	11	5	7	18	8 484
17	Sulawesi Tengah	3	3	1	3	3	5 392
18	Maluku	18	16	3	15	72	71 134
19	Maluku Utara	1	-	-	-	-	-
20	Papua Barat	3	-	-	-	-	-
21	Papua	6	5	3	6	29	16 387
Indonesia		92	77	37	80	313	375 883

E. Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG)

1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, salah satu komponen yang digunakan untuk pengalokasian dana desa adalah IKG. BPS telah menyusun IKG untuk seluruh desa. IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala 0–100 yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.
2. Tabel 19.3. menyajikan IKG setiap provinsi. IKG terendah sebesar 6,83 di desa Sudagaran (Jawa Tengah) dan IKG tertinggi sebesar 97,89 di desa Dorera (Papua). Nilai tengah IKG desa secara nasional adalah sebesar 40,91.

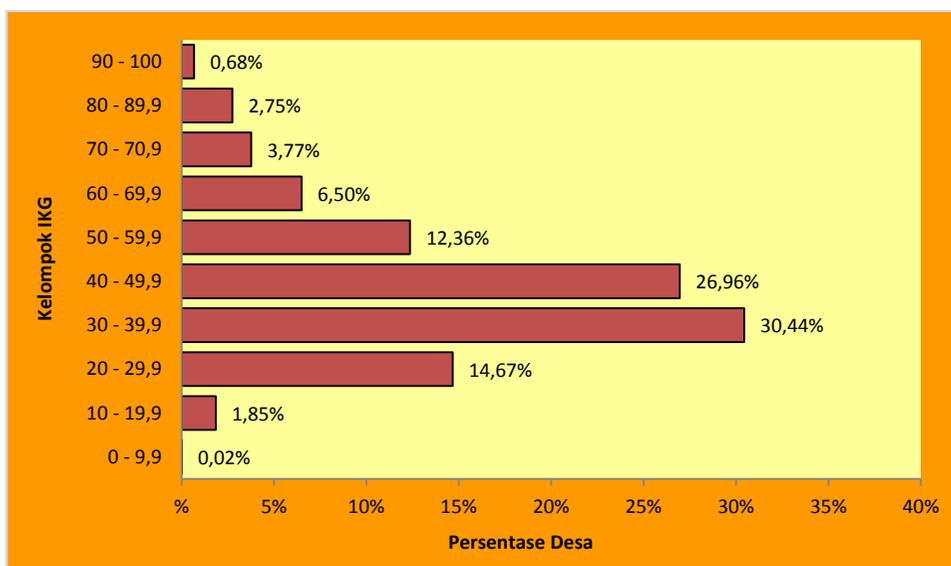
Tabel 19.3
IKG Desa Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,10	44,65	79,90
Sumatera Utara	10,17	42,31	86,58
Sumatera Barat	12,51	33,19	87,49
Riau	14,38	40,24	77,64
Jambi	14,83	39,96	77,84
Sumatera Selatan	12,05	42,38	78,24
Bengkulu	16,66	42,65	80,55
Lampung	11,71	40,51	77,95
Kep. Bangka Belitung	15,95	34,17	70,04
Kepulauan Riau	18,28	45,60	77,64
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	9,42	32,58	82,37
Jawa Tengah	6,83	34,27	64,10
DI Yogyakarta	9,96	27,73	48,17
Jawa Timur	9,03	35,23	67,36
Banten	13,99	39,79	70,72
Bali	8,79	30,20	58,60
Nusa Tenggara Barat	16,41	35,69	67,96
Nusa Tenggara Timur	20,21	49,87	80,77
Kalimantan Barat	10,47	51,10	84,83
Kalimantan Tengah	16,42	46,94	90,52

Provinsi	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalimantan Selatan	16,75	40,98	85,77
Kalimantan Timur	14,78	42,61	90,20
Kalimantan Utara	19,82	59,47	87,98
Sulawesi Utara	9,54	40,21	75,81
Sulawesi Tengah	16,93	42,70	84,79
Sulawesi Selatan	14,44	36,95	80,11
Sulawesi Tenggara	19,09	48,52	79,59
Gorontalo	12,57	39,05	67,98
Sulawesi Barat	17,74	46,18	84,58
Maluku	15,11	51,91	88,24
Maluku Utara	14,33	51,69	85,20
Papua Barat	18,42	65,43	96,02
Papua	17,05	76,33	97,89

3. Jika dibandingkan berdasarkan 10 kelompok, maka lebih dari 50 persen (57,40 persen) desa termasuk dalam kelompok IKG antara 30 sampai dengan 50. Sementara itu, kurang dari 10 persen (7,20 persen) desa termasuk dalam kelompok IKG di atas 70.

Grafik 19.8
Persentase Desa Menurut Kelompok IKG, 2014



Lampiran 1. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	23	289	6 512
Sumatera Utara	33	440	6 104
Sumatera Barat	19	179	1 145
Riau	12	164	1 835
Jambi	11	138	1 551
Sumatera Selatan	17	231	3 237
Bengkulu	10	127	1 532
Lampung	15	225	2 632
Kep Bangka Belitung	7	47	381
Kepulauan Riau	7	66	415
DKI Jakarta	6	44	267
Jawa Barat	27	626	5 962
Jawa Tengah	35	573	8 578
DI Yogyakarta	5	78	438
Jawa Timur	38	664	8 502
Banten	8	155	1 551
Bali	9	57	716
Nusa Tenggara Barat	10	116	1 141
Nusa Tenggara Timur	22	306	3 270
Kalimantan Barat	14	176	2 109
Kalimantan Tengah	14	136	1 569
Kalimantan Selatan	13	152	2 008
Kalimantan Timur	10	103	1 026
Kalimantan Utara	5	50	479
Sulawesi Utara	15	167	1 836
Sulawesi Tengah	13	172	1 986
Sulawesi Selatan	24	306	3 030
Sulawesi Tenggara	14	209	2 272
Gorontalo	6	77	736
Sulawesi Barat	6	69	648
Maluku	11	113	1 088
Maluku Utara	10	115	1 196
Papua Barat	13	175	1 567
Papua	29	529	4 871
INDONESIA	511	7 074	82 190

Lampiran 2. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Desa	Kelurahan	UPT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	6 510	-	2	6 512
Sumatera Utara	5 406	695	3	6 104
Sumatera Barat	886	259	-	1 145
Riau	1 603	232	-	1 835
Jambi	1 389	162	-	1 551
Sumatera Selatan	2 851	385	1	3 237
Bengkulu	1 356	172	4	1 532
Lampung	2 423	206	3	2 632
Kep.Bangka Belitung	309	72	-	381
Kepulauan Riau	272	143	-	415
DKI Jakarta	-	267	-	267
Jawa Barat	5 321	641	-	5 962
Jawa Tengah	7 809	769	-	8 578
DI Yogyakarta	392	46	-	438
Jawa Timur	7 721	781	-	8 502
Banten	1 237	314	-	1 551
Bali	636	80	-	716
Nusa Tenggara Barat	995	142	4	1 141
Nusa Tenggara Timur	2 951	319	-	3 270
Kalimantan Barat	2 009	99	1	2 109
Kalimantan Tengah	1 427	138	4	1 569
Kalimantan Selatan	1 864	144	-	2 008
Kalimantan Timur	836	190	-	1 026
Kalimantan Utara	444	35	-	479
Sulawesi Utara	1 505	331	-	1 836
Sulawesi Tengah	1 809	174	3	1 986
Sulawesi Selatan	2 240	783	7	3 030
Sulawesi Tenggara	1 891	371	10	2 272
Gorontalo	657	72	7	736
Sulawesi Barat	575	71	2	648
Maluku	1 050	33	5	1 088
Maluku Utara	1 066	117	13	1 196
Papua Barat	1 492	75	-	1 567
Papua	4 777	94	-	4 871
INDONESIA	73 709	8 412	69	82 190

Lampiran 3. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada SD dan Kecamatan yang Ada SLTP dan SLTA Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Desa/Kelurahan yang Ada SD	Kecamatan yang Ada SLTP	Kecamatan yang Ada SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3 358	289	281
Sumatera Utara	4 957	439	414
Sumatera Barat	1 100	179	170
Riau	1 779	164	164
Jambi	1 457	137	133
Sumatera Selatan	2 938	231	225
Bengkulu	1 180	126	108
Lampung	2 499	225	218
Kep.Bangka Belitung	375	47	45
Kepulauan Riau	390	66	61
DKI Jakarta	264	44	44
Jawa Barat	5 949	626	606
Jawa Tengah	8 461	573	552
DI Yogyakarta	438	78	76
Jawa Timur	8 450	664	648
Banten	1 543	155	154
Bali	709	57	56
Nusa Tenggara Barat	1 130	116	114
Nusa Tenggara Timur	3 129	306	257
Kalimantan Barat	2 028	176	164
Kalimantan Tengah	1 540	136	131
Kalimantan Selatan	1 869	152	141
Kalimantan Timur	970	103	103
Kalimantan Utara	299	50	43
Sulawesi Utara	1 537	167	147
Sulawesi Tengah	1 882	171	153
Sulawesi Selatan	2 929	306	282
Sulawesi Tenggara	1 837	208	199
Gorontalo	658	76	67
Sulawesi Barat	627	69	68
Maluku	1 017	113	108
Maluku Utara	1 092	115	114
Papua Barat	835	144	72
Papua	1 979	291	140
INDONESIA	71 205	6 799	6 258

Lampiran 4. Jumlah Wilayah yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut Jarak ke Sarana Pendidikan Terdekat dan Provinsi, 2014

Provinsi	Jumlah Desa/ Kelurahan Tidak Ada SD	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Jarak ke SD > 3 km	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada SLTP	Jumlah Kecamatan yang Jarak ke SLTP > 6 km	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada SLTA	Jumlah Kecamatan yang Jarak ke SLTA > 6 km
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3 154	162	-	-	8	-
Sumatera Utara	1 147	132	1	-	26	9
Sumatera Barat	45	-	-	-	9	5
Riau	56	4	-	-	-	-
Jambi	94	5	1	-	5	3
Sumatera Selatan	299	19	-	-	6	-
Bengkulu	352	18	1	-	19	3
Lampung	133	9	-	-	7	2
Kep.Bangka Belitung	6	1	-	-	2	2
Kepulauan Riau	25	2	-	-	5	2
DKI Jakarta	3	-	-	-	-	-
Jawa Barat	13	3	-	-	20	2
Jawa Tengah	117	2	-	-	21	2
DI Yogyakarta	-	-	-	-	2	-
Jawa Timur	52	-	-	-	16	5
Banten	8	-	-	-	1	1
Bali	7	-	-	-	1	-
Nusa Tenggara Barat	11	-	-	-	2	2
Nusa Tenggara Timur	141	12	-	-	49	23
Kalimantan Barat	81	24	-	-	12	10
Kalimantan Tengah	29	13	-	-	5	4
Kalimantan Selatan	139	5	-	-	11	3
Kalimantan Timur	56	14	-	-	-	-
Kalimantan Utara	180	28	-	-	7	6
Sulawesi Utara	299	9	-	-	20	6
Sulawesi Tengah	104	11	1	-	19	9
Sulawesi Selatan	101	3	-	-	24	7
Sulawesi Tenggara	435	31	1	-	10	5
Gorontalo	78	3	1	-	10	3
Sulawesi Barat	21	2	-	-	1	1
Maluku	71	9	-	-	5	5
Maluku Utara	104	5	-	-	1	1
Papua Barat	732	233	31	20	103	81
Papua	2 892	1 679	238	164	389	306
INDONESIA	10 985	2 438	275	184	816	508

Lampiran 5. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Kecamatan yang Ada Puskesmas/Pustu	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Aceh	288	99,65
Sumatera Utara	440	100,00
Sumatera Barat	179	100,00
Riau	164	100,00
Jambi	138	100,00
Sumatera Selatan	230	99,57
Bengkulu	127	100,00
Lampung	225	100,00
Kep.Bangka Belitung	47	100,00
Kepulauan Riau	66	100,00
DKI Jakarta	44	100,00
Jawa Barat	626	100,00
Jawa Tengah	573	100,00
DI Yogyakarta	78	100,00
Jawa Timur	664	100,00
Banten	154	99,35
Bali	57	100,00
Nusa Tenggara Barat	116	100,00
Nusa Tenggara Timur	303	99,02
Kalimantan Barat	176	100,00
Kalimantan Tengah	136	100,00
Kalimantan Selatan	152	100,00
Kalimantan Timur	103	100,00
Kalimantan Utara	49	98,00
Sulawesi Utara	163	97,60
Sulawesi Tengah	172	100,00
Sulawesi Selatan	306	100,00
Sulawesi Tenggara	209	100,00
Gorontalo	77	100,00
Sulawesi Barat	69	100,00
Maluku	112	99,12
Maluku Utara	115	100,00
Papua Barat	166	94,86
Papua	433	81,85
INDONESIA	6 957	98,35

Lampiran 6. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik		Ada Penerangan Di Jalan Utama
	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6 427	296	3 663
Sumatera Utara	5 543	1 475	3 662
Sumatera Barat	1 099	350	862
Riau	1 301	1 194	1 036
Jambi	1 339	613	784
Sumatera Selatan	2 886	1 123	2 086
Bengkulu	1 470	244	693
Lampung	2 402	779	1 701
Kep. Bangka Belitung	377	153	307
Kepulauan Riau	294	293	257
DKI Jakarta	267	2	264
Jawa Barat	5 960	257	5 064
Jawa Tengah	8 566	115	8 330
DI Yogyakarta	438	9	428
Jawa Timur	8 457	291	8 055
Banten	1 551	34	950
Bali	716	20	700
Nusa Tenggara Barat	1 114	122	840
Nusa Tenggara Timur	2 624	1 694	298
Kalimantan Barat	1 380	1 239	521
Kalimantan Tengah	838	1 079	421
Kalimantan Selatan	1 903	401	1 634
Kalimantan Timur	647	662	462
Kalimantan Utara	180	380	133
Sulawesi Utara	1 789	258	1 132
Sulawesi Tengah	1 601	897	1 257
Sulawesi Selatan	2 777	734	2 165
Sulawesi Tenggara	1 786	896	785
Gorontalo	690	298	534
Sulawesi Barat	403	440	184
Maluku	654	540	366
Maluku Utara	785	598	453
Papua Barat	443	914	364
Papua	824	2 093	412
INDONESIA	69 531	20 493	50 803

Lampiran 7. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Kecamatan yang Ada Pasar Dengan Bangunan	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Aceh	227	78,55
Sumatera Utara	367	83,41
Sumatera Barat	161	89,94
Riau	157	95,73
Jambi	117	84,78
Sumatera Selatan	203	87,88
Bengkulu	109	85,83
Lampung	208	92,44
Kep. Bangka Belitung	37	78,72
Kepulauan Riau	37	56,06
DKI Jakarta	41	93,18
Jawa Barat	469	74,92
Jawa Tengah	560	97,73
DI Yogyakarta	78	100,00
Jawa Timur	639	96,23
Banten	124	80,00
Bali	57	100,00
Nusa Tenggara Barat	93	80,17
Nusa Tenggara Timur	244	79,74
Kalimantan Barat	104	59,09
Kalimantan Tengah	109	80,15
Kalimantan Selatan	133	87,50
Kalimantan Timur	78	75,73
Kalimantan Utara	25	50,00
Sulawesi Utara	109	65,27
Sulawesi Tengah	151	87,79
Sulawesi Selatan	271	88,56
Sulawesi Tenggara	188	89,95
Gorontalo	68	88,31
Sulawesi Barat	61	88,41
Maluku	54	47,79
Maluku Utara	58	50,43
Papua Barat	58	33,14
Papua	184	34,78
INDONESIA	5 579	78,87

Lampiran 8. Jumlah Desa/Kelurahan yang Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan Melalui Darat atau Darat dan Air Menurut Kondisi Jalan dan Provinsi, 2014

Provinsi	Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih				Total
	Sepanjang Tahun	Sepanjang Tahun Kecuali Saat Tertentu	Sepanjang Tahun Kecuali Sepanjang Musim Hujan	Tidak Dapat Dilalui Sepanjang Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5 742	445	241	71	6 499
Sumatera Utara	5 004	344	307	422	6 077
Sumatera Barat	1 068	34	15	22	1 139
Riau	1 279	170	107	237	1 793
Jambi	1 311	114	49	73	1 547
Sumatera Selatan	2 652	288	168	98	3 206
Bengkulu	1 381	85	56	5	1 527
Lampung	2 261	239	89	40	2 629
Kep. Bangka Belitung	370	2	4	2	378
Kepulauan Riau	295	12	5	29	341
DKI Jakarta	259	2	-	2	263
Jawa Barat	5 761	118	77	6	5 962
Jawa Tengah	8 448	78	46	4	8 576
DI Yogyakarta	436	2	-	-	438
Jawa Timur	8 356	87	45	13	8 501
Banten	1 472	42	28	4	1 546
Bali	709	3	4	-	716
Nusa Tenggara Barat	1 073	47	13	6	1 139
Nusa Tenggara Timur	2 608	383	189	63	3 243
Kalimantan Barat	1 123	448	161	270	2 002
Kalimantan Tengah	804	314	123	158	1 399
Kalimantan Selatan	1 698	118	22	146	1 984
Kalimantan Timur	741	158	44	44	987
Kalimantan Utara	238	98	32	49	417
Sulawesi Utara	1 717	37	5	51	1 810
Sulawesi Tengah	1 674	86	30	144	1 934
Sulawesi Selatan	2 686	143	79	75	2 983
Sulawesi Tenggara	1 937	150	67	83	2 237
Gorontalo	669	37	12	17	735
Sulawesi Barat	468	67	45	65	645
Maluku	556	97	39	256	948
Maluku Utara	736	108	46	154	1 044
Papua Barat	867	98	49	285	1 299
Papua	1 302	309	124	2658	4 393
INDONESIA	67 701	4 763	2 321	5 552	80 337

XX. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH FEBRUARI 2016

A. Dolar Amerika (USD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap dolar Amerika pada Februari 2016 cenderung terapresiasi dibanding minggu terakhir Januari 2016. Level tertinggi nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah pada minggu terakhir Januari 2016 tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp13.761,67 per dolar AS, sementara pada minggu terakhir Februari 2016 terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Rp13.311,25 per dolar AS. Sedangkan untuk level terendah, nilai tukar pada minggu terakhir Januari 2016 terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp13.930,94 per dolar AS dan pada minggu terakhir Februari 2016 terjadi di Provinsi Gorontalo dengan nilai tengah Rp13.620,00 per dolar AS.

Rupiah terapresiasi 424,46 poin atau 3,06 persen terhadap dolar Amerika pada Februari 2016. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah
2. Pada minggu pertama Februari 2016, jika dibanding minggu terakhir Januari 2016, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika secara rata-rata nasional menguat 137,88 poin atau 1,00 persen. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Banten sebesar 269,17 poin atau 1,94 persen. Sebaliknya, apresiasi terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 27,59 poin atau 0,20 persen.
3. Pada minggu terakhir Februari 2016, rata-rata nasional nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menguat 424,46 poin atau 3,06 persen, dibanding kurs pada minggu terakhir Januari 2016. Apresiasi rupiah terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang terapresiasi sebesar 497,25 poin atau 3,57 persen. Sebaliknya, apresiasi terkecil terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 242,50 poin atau 1,75 persen.

B. Dolar Australia (AUD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap dolar Australia pada Februari 2016 cenderung terapresiasi dibanding minggu terakhir Januari 2016. Rata-rata nasional kurs eceran rupiah terapresiasi sebesar 55,99 poin pada minggu pertama Februari 2016 atau menguat sebesar 0,58 persen. Pada minggu terakhir Februari 2016 juga terjadi apresiasi, yaitu sebesar 73,30 poin atau 0,75 persen dibanding minggu terakhir Januari 2016.

Rupiah terapresiasi 73,30 poin atau 0,75 persen terhadap dolar Australia pada Februari 2016. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia pada minggu terakhir Januari 2016 terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp9.572,50 per dolar Australia, sementara pada minggu terakhir Februari 2016 terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp9.515,00 per dolar Australia. Di sisi lain, level terendah nilai tukar terhadap dolar Australia pada minggu terakhir Januari 2016 tercatat di Provinsi Jawa Tengah, sebesar Rp9.832,56 per dolar Australia, dan pada minggu terakhir Februari 2016 tercatat di Provinsi Papua, yaitu sebesar Rp9.723,83 per dolar Australia.
3. Pada minggu pertama Februari 2016, penguatan rupiah yang terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 200,00 poin atau terapresiasi sebesar 2,05 persen dibanding minggu terakhir Januari 2016. Pada minggu terakhir Februari 2016, penguatan rupiah yang terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu terapresiasi sebesar 189,50 poin atau menguat sebesar 1,95 persen dibanding minggu terakhir Januari 2016.

C. Yen Jepang (JPY)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap yen Jepang pada minggu pertama Februari 2016 secara rata-rata nasional menguat 2,21 poin atau 1,90 persen dibanding minggu terakhir Januari 2016. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu 4,00 poin atau 3,44 persen.
2. Nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang pada minggu terakhir Februari 2016 secara rata-rata nasional tercatat melemah 2,09 poin atau 1,79 persen dibanding minggu terakhir Januari 2016. Depresiasi terbesar tercatat di Provinsi Riau, yaitu 3,75 poin atau melemah 3,23 persen.
3. Level terendah nilai tukar rupiah terhadap mata uang yen Jepang pada minggu terakhir Januari 2016 tercatat di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp118,88 per yen Jepang, sedangkan level tertingginya terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp110,50 per yen Jepang. Sementara itu, pada minggu terakhir Februari 2016, level terendah tercatat di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp120,69 per yen Jepang, sedangkan level tertingginya terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp113,50 per yen Jepang.

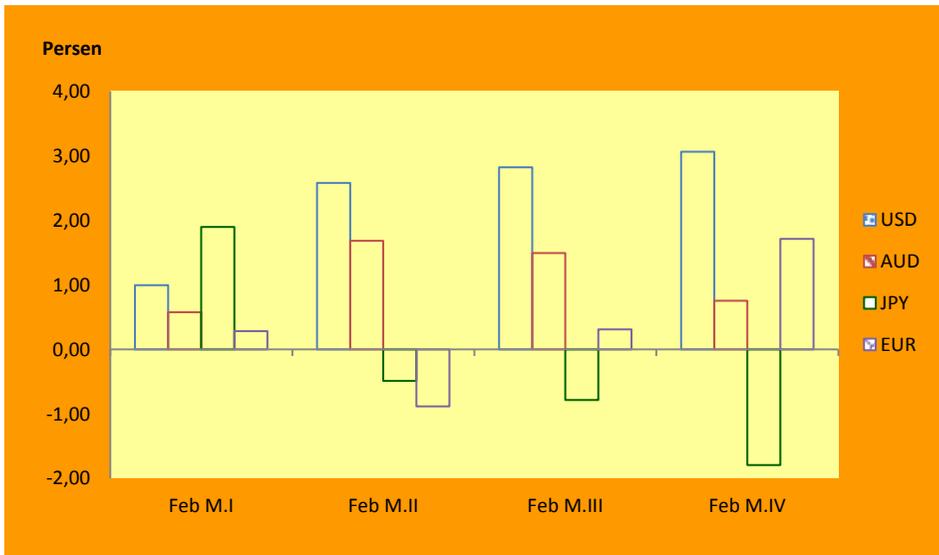
Rupiah terdepresiasi 2,09 poin atau 1,79 persen terhadap yen Jepang pada Februari 2016. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Riau

D. Euro (EUR)

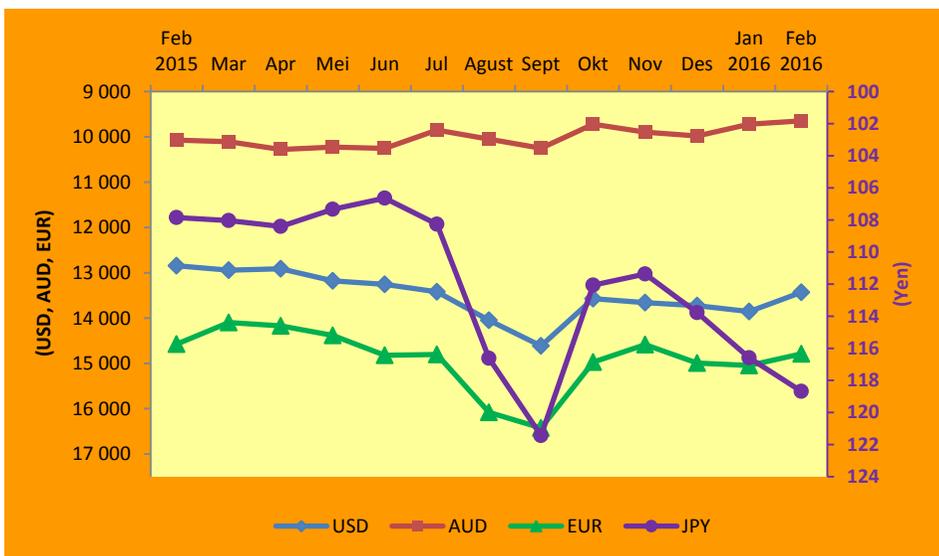
1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap euro pada Februari 2016 cenderung mengalami penguatan dibanding minggu terakhir Januari 2016. Secara rata-rata nasional, rupiah terapresiasi sebesar 42,39 poin pada minggu pertama atau menguat sebesar 0,28 persen dan terapresiasi kembali sebesar 257,52 poin pada minggu terakhir atau menguat sebesar 1,71 persen dibanding minggu terakhir Januari 2016.

Rupiah terapresiasi 257,52 poin atau 1,71 persen terhadap euro pada Februari 2016. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Banten
2. Level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap euro tercatat di Provinsi Lampung sebesar Rp14.870,00 per euro pada minggu terakhir Januari 2016 dan di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp14.525,00 per euro pada minggu terakhir Februari 2016. Sementara itu, level terendah nilai tukar rupiah terhadap euro (kurs tengah), pada minggu terakhir Januari 2016 terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Rp15.171,75 per euro dan pada minggu terakhir Februari 2016 terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Rp14.975,50 per euro.
3. Pada minggu pertama Februari 2016, nilai tukar rupiah mengalami penguatan terbesar di Provinsi Aceh yang mencapai 205,50 poin atau 1,36 persen. Sebaliknya, depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Maluku yang mencapai 123,00 poin atau 0,82 persen. Pada minggu terakhir Februari 2016, apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Banten yang mencapai 406,50 poin atau 2,70 persen, dan apresiasi terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 66,00 poin atau 0,44 persen.

Grafik 20.1
Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR
(Februari 2016 dibanding Januari 2015 M.V)



Grafik 20.2
Kurs Tengah Rupiah terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR
(Minggu Terakhir)



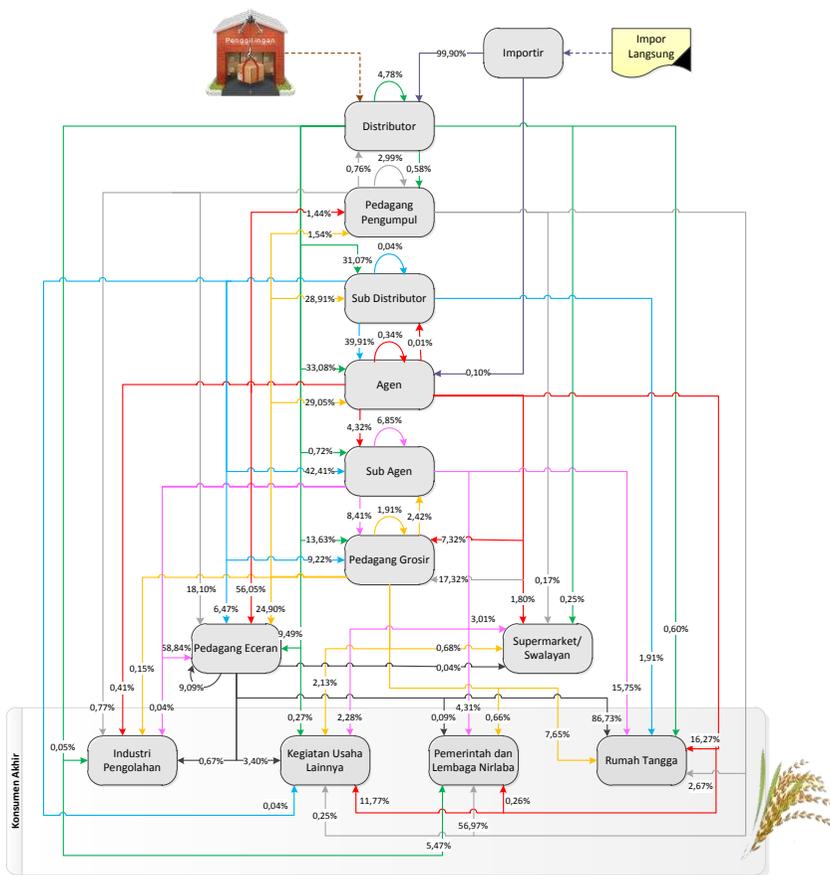
XXI. PERDAGANGAN KOMODITAS STRATEGIS 2015

A. Pola Distribusi Perdagangan

1. Distribusi perdagangan beras, cabai merah, bawang merah, jagung pipilan, dan daging ayam ras dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan dua hingga sembilan fungsi kelembagaan usaha perdagangan.

Distribusi perdagangan komoditi dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan antara 2 s.d. 9 fungsi kelembagaan usaha perdagangan

Grafik 21.1
Pola Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia, 2015



2. Alur distribusi perdagangan terpanjang cabai merah, bawang merah, dan jagung pipilan berada di Jawa Tengah, sedangkan beras dan daging ayam ras di DKI Jakarta. Sementara itu, alur distribusi perdagangan terpendek beras, cabai merah dan jagung pipilan berada di Sulawesi Utara, bawang merah di Maluku Utara, dan daging ayam ras di Kalimantan Barat.

B. Peta Distribusi Perdagangan

1. Persentase komoditi yang masuk terhadap ketersediaan beras dan cabai merah Kalimantan Utara adalah yang terbesar di Indonesia dengan persentase mencapai 99,81 persen untuk masing-masing komoditas. Sedangkan untuk bawang merah adalah Maluku, yaitu mencapai 99,83 persen, jagung pipilan adalah DKI Jakarta yaitu mencapai 99,12 persen, dan daging ayam ras adalah Papua, yaitu mencapai 95,57 persen.

Jaringan terluas pendistribusian beras, cabai merah, dan daging ayam ras dilakukan oleh Jawa Tengah. Sedangkan untuk bawang merah adalah Jawa Barat dan jagung pipilan adalah Gorontalo

2. Persentase komoditi yang keluar terhadap ketersediaan beras Sumatera Barat adalah yang terbesar di Indonesia dengan persentase sebesar 15,49%. Sedangkan untuk komoditas cabai merah adalah di DI Yogyakarta (76,24%), bawang merah adalah di Nusa Tenggara Barat (56,53%), jagung pipilan adalah di Gorontalo (93,82%), dan daging ayam ras adalah di Kalimantan Utara (16,05%).
3. Jaringan terluas pendistribusian beras, cabai merah, dan daging ayam ras dilakukan oleh Jawa Tengah. Sedangkan untuk bawang merah adalah Jawa Barat dan jagung pipilan adalah Gorontalo.

C. Margin Perdagangan dan Pengangkutan

1. Rata-rata rasio MPP beras secara nasional berdasarkan Survei Poldis 2015 sebesar 10,42 persen, cabai merah 25,33 persen, bawang merah 22,61 persen, jagung pipilan 31,90 persen dan daging ayam ras 11,63 persen.

Rata-rata rasio MPP beras secara nasional berdasarkan Survei Poldis 2015 sebesar 10,42 persen, cabai merah 25,33 persen, bawang merah 22,61 persen, jagung pipilan 31,90 persen, dan daging ayam ras 11,63 persen.

Tabel 21.1
Rata-rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)
Menurut Komoditi, 2015

No	Komoditi	MPP (persen)
(1)	(2)	(3)
1	Beras	10,42
2	Cabai Merah	25,33
3	Bawang Merah	22,61
4	Jagung Pipilan	31,90
5	Daging Ayam Ras	11,63

XXII. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2015

A. Indeks Perilaku Anti Korupsi 2015

1. Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) menugaskan BPS untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini telah dilaksanakan setiap tahun mulai tahun 2012. Untuk tahun 2015, SPAK dilaksanakan pada November yang mencakup 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan jumlah sampel 10.000 rumah tangga. Analisis mengenai perilaku anti korupsi dalam survei ini hanya untuk representasi level nasional.
2. SPAK ditujukan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal perilaku anti korupsi. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).
3. Contoh pertanyaan penyuapan adalah pengalaman masyarakat membayar uang lebih untuk mempercepat proses pengurusan KTP/KK. Contoh pemerasan ialah pengalaman masyarakat diminta uang lebih oleh petugas dalam urusan sertifikat tanah. Contoh nepotisme adalah pengalaman masyarakat ditawarkan bantuan oleh saudara/teman untuk dapat diterima menjadi pegawai negeri/swasta.
4. IPAK dihitung tiap tahun untuk menggambarkan dinamika perilaku anti korupsi masyarakat. IPAK Indonesia 2015 sebesar 3,59 dalam skala 0 sampai 5. Angka tersebut sedikit lebih rendah (0,02 poin) dibandingkan dengan 2014 yang besarnya 3,61.
5. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka lima menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, yang berarti bahwa budaya *zero tolerance* terhadap korupsi semakin melekat dan mewujud dalam perilaku masyarakat. Sebaliknya, nilai IPAK yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

**Indeks Perilaku Anti
Korupsi (IPAK) Indonesia
2015 sebesar 3,59 dari
skala 0 sampai 5.**

Tabel 22.1
Nilai IPAK Tahun 2012–2015

Tahun	IPAK
(1)	(2)
2012	3,55
2013	3,63
2014	3,61
2015	3,59

B. IPAK Berdasarkan Dimensi Utama

1. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama, yakni pertama persepsi yang berupa pendapat/penilaian terhadap kebiasaan perilaku koruptif di masyarakat, dan kedua adalah pengalaman (pengalaman perilaku koruptif).
2. Tabel 2 menunjukkan tren indeks persepsi menunjukkan pola meningkat dari tahun 2012 hingga 2015, dari 3,54 menjadi 3,73 (indeks tersebut juga dalam skala 0 sampai 5). Sementara, indeks pengalaman terus turun dari 3,58 menjadi 3,39.
3. Dari hasil pengukuran IPAK terlihat fenomena yang menarik untuk dicermati. Indeks dari dimensi persepsi menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun 2012 ke 2015. Hal ini menggambarkan sisi pemahaman dan penilaian masyarakat cenderung semakin idealis anti korupsi.
4. Sebaliknya dari dimensi pengalaman cenderung menurun. Keadaan demikian menggambarkan bahwa masyarakat dalam tataran praktek ketika berhadapan dengan pelayanan publik masih melakukan perilaku korupsi. Dengan kata lain, terkesan masyarakat semakin membenci korupsi (idealisme) namun tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 22.2
Indeks Menurut Dimensi, 2012–2015

Dimensi	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Persepsi	3,54	3,66	3,71	3,73
Indeks Pengalaman	3,58	3,58	3,49	3,39
IPAK Indonesia	3,55	3,63	3,61	3,59

C. IPAK Berdasarkan Karakteristik Demografi

1. IPAK 2015 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding di wilayah perdesaan. Gambaran tersebut nampak pada 2012–2015 yang disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan klasifikasi wilayah, IPAK perkotaan dibandingkan perdesaan pada tahun 2015 adalah 3,71 banding 3,46.

IPAK masyarakat di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi

Tabel 22.3
IPAK Menurut Wilayah, 2012–2015

Klasifikasi Wilayah	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	3,66	3,71	3,71	3,71
Perdesaan	3,46	3,55	3,51	3,46

2. IPAK lebih tinggi pada jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan, meski perbedaannya tidak terlalu signifikan. IPAK 2015 di kalangan laki-laki sedikit lebih tinggi (3,63) dibanding di kalangan perempuan (3,55). Konsisten sejak tahun 2012 sampai 2015 menunjukkan gambaran serupa.

IPAK laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan

Tabel 22.4
IPAK Menurut Jenis Kelamin, 2012–2015

Jenis Kelamin	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	3,59	3,66	3,64	3,63
Perempuan	3,53	3,60	3,59	3,55

3. Gambaran pada 2012–2015 menunjukkan IPAK penduduk dengan usia 40 hingga 60 tahun selalu menjadi yang tertinggi disusul IPAK penduduk kurang usia kurang dari 40 tahun. Pada 2015, IPAK masyarakat usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,62, IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,59, sedangkan IPAK masyarakat usia 60 tahun ke atas sebesar 3,49. Dengan kata lain, IPAK penduduk usia lebih dari 60 tahun lebih rendah dibandingkan IPAK usia yang lebih muda.

IPAK masyarakat usia 40–59 tahun lebih tinggi dibandingkan IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun dan lebih dari 60 tahun

Tabel 22.5
IPAK Menurut Umur, 2012–2015

Umur (Tahun)	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kurang dari 40	3,57	3,63	3,63	3,59
40 sampai 59	3,58	3,65	3,64	3,62
60 atau lebih	3,45	3,55	3,54	3,49

4. Secara konsisten (tahun 2012–2015) tampak bahwa semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka cenderung semakin anti korupsi. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi IPAK. IPAK 2015 untuk responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,49, SLTA sebesar 3,80 dan di atas SLTA sebesar 4,00.

Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi IPAK

Tabel 22.6
IPAK Menurut Pendidikan Tertinggi, 2012–2015

Pendidikan Tertinggi	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SLTP ke bawah	3,47	3,55	3,52	3,49
SLTA	3,78	3,82	3,85	3,80
SLTA ke atas	3,94	3,94	4,01	4,00

D. Indikator Tunggal IPAK 2015

1. Pendapat Terhadap Kebiasaan/Perilaku di Masyarakat

Berikut merupakan persepsi masyarakat terhadap kebiasaan/perilaku di masyarakat dalam tiga ruang lingkup.

a) Lingkup Keluarga

Tabel 22.7
Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Keluarga
merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2015

Kebiasaan/Perilaku	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Istri yang menerima uang pemberian suami diluar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut	68,69	76,43	78,65	76,04
Seorang Pegawai Negeri bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi	72,95	76,16	78,11	79,05
Orang tua mengajak anaknya dalam kampanye PEMILU/PILKADA demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak	80,15	82,70	86,07	85,64
Seseorang mengetahui saudaranya tanpa izin mengambil uang orang tuanya tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya	95,06	96,56	97,44	97,31

1. Sekitar 76 persen masyarakat menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku istri yang menerima uang pemberian suami diluar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal-usul uang tersebut.
2. Sekitar 79 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi.
3. Sekitar 86 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku orang tua yang mengajak anaknya dalam kampanye PILKADA/PEMILU demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak.
4. Sekitar 97 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang mengetahui saudaranya tanpa izin mengambil uang orang tuanya tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya.

b) Lingkup Komunitas

Tabel 22.8
Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Komunitas
merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2015

Kebiasaan/Perilaku	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memberi uang/barang kepada tokoh adat/agama/masyarakat ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian, dsb)	30,77	36,30	37,76	36,32
Memberi uang/barang kepada tokoh adat/agama/masyarakat ketika menjelang hari raya keagamaan.	38,25	42,33	45,17	46,42
Memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian, dsb)	52,97	57,49	60,57	60,37
Memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika menjelang hari raya keagamaan	65,24	68,40	71,12	72,56

1. Sekitar 36 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh adat/agama/masyarakat ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian).
2. Sekitar 46 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh adat/agama/masyarakat ketika menjelang hari raya keagamaan.
3. Sekitar 60 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh formal (Ketua RT/RW/Kades/Lurah) ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian).
4. Sekitar 73 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh formal (Ketua RT/RW/Kades/Lurah) ketika menjelang hari raya keagamaan.

c) Lingkup Publik

Tabel 22.9
Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Tingkat Publik merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2015

Kebiasaan/Perilaku	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Demi mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan, seseorang menjamin keluarga/ saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri/swasta	53,39	61,10	67,20	68,39
Memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta	81,38	84,28	87,21	87,51
Memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP, KK)	55,09	57,20	58,34	62,28
Memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK	60,67	62,96	65,08	69,44
Pelanggar lalu lintas yang memberi uang damai kepada Polisi	67,58	70,99	73,80	77,20
Petugas KUA meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah	66,95	71,80	71,57	74,76
Guru mendapat jaminan (jatah) anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar	64,45	69,69	70,95	73,32
Guru meminta uang/barang dari orangtua murid ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor	83,16	87,93	89,00	89,49
Memberi uang/barang kepada pihak sekolah agar anaknya dapat diterima di sekolah tersebut.	84,05	88,17	88,96	90,63
Pegawai melakukan pekerjaan/usaha sampingan di luar tugasnya pada saat jam kerja	87,14	88,04	88,00	87,86
Membagikan uang/barang kepada calon pemilih	72,15	72,57	77,38	78,20
Mengharapkan pembagian uang/barang pada pelaksanaan PEMILU/PILKADA	72,90	72,69	76,90	77,61

1. Sekitar 68 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri atau swasta demi mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan.

2. Sekitar 88 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang yang memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta.
3. Sekitar 62 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK).
4. Sekitar 69 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK.
5. Sekitar 77 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang damai kepada polisi.
6. Sekitar 75 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku petugas KUA meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah.
7. Sekitar 73 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku guru yang mendapatkan jaminan (jatah) agar anaknya diterima di sekolah tempatnya mengajar.
8. Sekitar 89 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku guru yang meminta uang/barang ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor.
9. Sekitar 91 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada pihak sekolah agar anaknya dapat diterima di sekolah tersebut.
10. Sekitar 88 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku pegawai melakukan pekerjaan/usaha sampingan di luar tugasnya pada saat jam kerja.
11. Sekitar 78 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap tindakan membagikan uang/barang kepada calon pemilih.
12. Sekitar 78 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku membagikan atau mengharapkan uang/barang pada pelaksanaan PILKADA/PEMILU.

2. Pengalaman Masyarakat

1. Pengalaman masyarakat dalam survei ini mencakup sepuluh layanan publik dan lima tawaran, yakni di RT/RW, Kelurahan/Kecamatan, Kepolisian, PLN, Rumah Sakit, Sekolah, Pengadilan, KUA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pertanahan Nasional, tawaran mendapat uang/barang ketika Pilkada/Pilkada/pemilu, tawaran untuk menjadi pegawai dengan membayar sejumlah uang, tawaran untuk menjadi pegawai dari saudara/teman, tawaran dari keluarga/teman ketika penerimaan masuk sekolah, dan tawaran untuk membayar uang damai saat ditilang petugas polisi lalu lintas.
2. Pada 2015 dari keseluruhan pengalaman masyarakat berurusan dengan layanan publik dan mendapatkan tawaran, sebesar 41,36 persen diantaranya terjadi peristiwa korupsi. Persentase kejadian korupsi yang dialami masyarakat pada seluruh layanan publik atau mendapatkan tawaran pada periode 2012 hingga 2015 cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan intensitas kejadian korupsi yang dialami oleh masyarakat semakin tinggi.
3. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa tujuan membayar melebihi ketentuan ketika mengurus di layanan publik adalah demi mempercepat proses pengurusan sebesar 43,53 persen dan sebagai tanda terima kasih sebesar 35,69 persen.

XXIII. SUPLEMEN: METODOLOGI

1. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan positif Indeks Harga Konsumen (IHK). Sebaliknya, perubahan negatif IHK disebut deflasi. IHK tersebut dihitung dengan menggunakan formula *Modified Laspeyres*.

Bahan dasar penyusunan diagram timbang (bobot) IHK adalah hasil Survei Biaya Hidup (SBH) atau *Cost of Living Survey*. SBH diadakan 5 (lima) tahun sekali, SBH terakhir diadakan tahun 2012, mencakup 136,080 rumah tangga di Indonesia yang dipantau baik pengeluaran konsumsinya maupun jenis barang/jasa yang dikonsumsi selama setahun penuh.

Berdasarkan hasil SBH diperoleh paket komoditas yang representatif, dapat dipantau harganya, dan selalu tersedia di pasaran. Paket komoditas nasional sebanyak 859 barang/jasa, bertambah dari 774 barang/jasa pada paket komoditas tahun 2007. Hal ini sejalan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Bobot awal setiap barang/jasa merupakan persentase nilai konsumsi setiap barang/jasa terhadap total rata-rata nilai konsumsi per rumah tangga per bulan, berdasarkan hasil SBH. Sejak Januari 2014, penghitungan inflasi mulai menggunakan tahun dasar 2012 (sebelumnya menggunakan tahun dasar 2007) berdasarkan hasil SBH 2012. Cakupan kota bertambah dari 66 menjadi 82 kota.

Jumlah barang/jasa yang dicakup bervariasi antarkota, yang terkecil di Kota Singaraja sebanyak 225 barang/jasa, sedangkan yang terbanyak di Jakarta sebanyak 462 barang/jasa. Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) yang diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Inflasi umum (*headline inflation*)

Inflasi umum adalah komposit dari inflasi inti, inflasi *administered prices*, dan inflasi *volatile goods*.

a. Inflasi inti (*core inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum, seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran, yang sifatnya cenderung permanen, *persistent*, dan bersifat umum. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasa inti sebanyak 751, antara lain: kontrak rumah, upah buruh, mie, susu, mobil, sepeda motor, dan sebagainya.

b. Inflasi yang harganya diatur pemerintah (*administered prices inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya secara umum diatur oleh pemerintah. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasanya sebanyak 23, antara lain: bensin, tarif listrik, rokok, dan sebagainya.

c. Inflasi bergejolak (*volatile goods*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Berdasarkan tahun dasar 2012, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai inflasi *volatile foods*. Jumlah komoditas sebanyak 85, antara lain : beras, minyak goreng, cabai, daging ayam ras, dan sebagainya.

Responden

Harga dari paket komoditas dikumpulkan/dicatat setiap hari, setiap minggu, setiap 2 minggu, atau setiap bulan dari pedagang atau pemberi jasa eceran. Mereka termasuk yang berada di pasar tradisional, pasar modern, dan outlet mandiri (seperti toko eceran, praktek dokter, restoran siap saji, bengkel, rumah tangga yang mempunyai pembantu, dan sebagainya),

2. Produk Domestik Bruto

PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa (produk) akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar

PDB atas dasar harga berlaku (nominal PDB) dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun Pendekatan yang digunakan untuk menghitung angka-angka PDB adalah (1) pendekatan produksi, menghitung nilai tambah dari proses produksi setiap kategori/aktivitas ekonomi, (2) pendekatan pendapatan, menghitung semua komponen nilai tambah, dan (3) pendekatan pengeluaran, menghitung semua komponen pengeluaran PDB Secara teoritis, ketiga pendekatan ini akan menghasilkan nilai PDB yang sama

3. Ekspor-Impor

Data Nonmigas diperoleh dari KPPBC (Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai), data Migas dari KPPBC, Pertamina dan BP Migas, Sistem pencatatan statistik ekspor menggunakan *General Trade* (semua barang yang keluar dari Daerah Pabean Indonesia tanpa kecuali dicatat), sedangkan impor pada awalnya menggunakan *Special Trade* (dicatat dari Daerah Pabean Indonesia kecuali Kawasan Berikat yang dianggap sebagai “luar negeri”), namun sejak bulan Januari 2008 sistem pencatatan statistik impor juga menggunakan *General Trade*, Sistem pengolahan data menggunakan sistem *carry over* (dokumen ditunggu selama satu bulan setelah transaksi, apabila terlambat dimasukkan pada pengolahan bulan berikutnya),

Data ekspor-impor yang disajikan pada bulan terakhir merupakan angka sementara

4. Kependudukan

Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi, Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Data dasar perhitungan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 adalah data penduduk hasil SP2010. Penghitungan proyeksi penduduk ini dilakukan dengan menggunakan program RUP (*Rural Urban Projection*).

Penghitungan proyeksi penduduk mempertimbangkan perapihan umur, dengan tujuan untuk memperkecil kesalahan yang ada dalam data. Penentuan asumsi merupakan proses yang paling penting, mencakup asumsi tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Asumsi kelahiran dibuat berdasarkan tren tingkat kelahiran di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang dilakukan berhubungan dengan tingkat kelahiran di masa mendatang. Asumsi tingkat kematian dibuat berdasarkan tren tingkat kematian di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang dilakukan terkait dengan kesehatan. Asumsi migrasi, untuk proyeksi nasional menyangkut migrasi internasional (melintasi batas negara) masih dianggap nol, yaitu seimbang antara yang keluar dan masuk. Sedangkan untuk proyeksi provinsi diperhitungkan migrasi internal, yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas provinsi.

Proyeksi penduduk Indonesia dibangun dengan dasar kesepakatan dari berbagai pihak baik kementerian/lembaga terkait, akademisi, dan pakar kependudukan. Hasil proyeksi ini digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi kinerja pemerintah.

5. Ketenagakerjaan

Data diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pengumpulan data berbasis sampel, dengan pendekatan rumah tangga. Estimasi ketenagakerjaan Februari 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk, sedangkan Februari–Agustus 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk yang digunakan pada Februari 2014

Definisi yang digunakan antara lain:

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), Pekerja Tidak Penuh terdiri dari:

Setengah Penganggur (*Underemployment*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

Pekerja Paruh Waktu (*Part time worker*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Pengangguran Terbuka (*Unemployment*), adalah mereka yang tidak bekerja tetapi berharap mendapatkan pekerjaan, yang terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja.

6. Upah Buruh

Upah Nominal adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan.

Upah Riil menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh, upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Penghitungan upah nominal buruh tani menggunakan rata-rata tertimbang, sedangkan upah nominal buruh bangunan menggunakan rata-rata hitung biasa.

Pengumpulan data upah buruh tani dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dengan responden petani. Data upah buruh bangunan diperoleh dari Survei Harga Konsumen Perkotaan dengan responden buruh bangunan.

Survei Harga Perdesaan dilaksanakan di 33 provinsi, sedangkan Survei Harga Konsumen Perkotaan dilaksanakan di 82 kota.

7. Nilai Tukar Petani (NTP) 2012=100

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Indeks harga yang diterima petani (I_t) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani (I_b) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

NTP dihitung dengan menggunakan formula:

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Formula atau rumus yang digunakan dalam penghitungan I_t dan I_b adalah formula Indeks Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres Indices*). Pengumpulan data harga untuk penghitungan NTP dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dan Survei Konsumen Perdesaan, dengan cakupan 33 provinsi di Indonesia yang meliputi lima subsektor yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Responden Survei Harga Perdesaan adalah petani produsen, sedangkan responden Survei Harga Konsumen Perdesaan adalah pedagang di pasar perdesaan.

NTUP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (I_t) terhadap indeks harga yang dibayar petani (I_b), dimana komponen I_b hanya terdiri dari BPPBM. Dengan dikeluarkannya konsumsi rumah tangga dari komponen indeks harga yang dibayar petani (I_b), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

8. Harga Produsen Gabah dan Beras di Penggilingan

Harga di Tingkat Petani adalah harga yang disepakati pada waktu terjadinya transaksi antara petani dengan pedagang pengumpul/tengkulak/pihak penggilingan yang ditemukan pada hari dilaksanakannya observasi dengan kualitas apa adanya, sebelum dikenakan ongkos angkut pasca panen.

Harga di Tingkat Penggilingan adalah harga di tingkat petani ditambah dengan besarnya biaya ke penggilingan terdekat.

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga minimal yang harus dibayarkan pihak penggilingan kepada petani sesuai dengan kualitas gabah sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah. Penetapan harga dilakukan secara kolektif antara Departemen Pertanian, Menko Bidang Perekonomian, dan Bulog.

Gabah Kering Panen (GKP) adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 25,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 10,0 persen.

Gabah Kering Giling (GKG) adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 14,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 3,0 persen.

Gabah Kualitas Rendah adalah gabah yang mengandung kadar air minimum dari 25,0 persen dan hampa/kotoran minimum 10,0 persen.

Survei Monitoring Harga Gabah dilaksanakan di 25 propinsi di Indonesia yang meliputi 158 kabupaten terpilih (sampel). Dari masing-masing kabupaten terpilih diambil tiga kecamatan tetap dan satu kecamatan tidak tetap. Responden adalah petani produsen yang melakukan transaksi penjualan gabah. Pencatatan harga dilaksanakan setiap bulan, tetapi saat panen raya (Maret s.d. Mei dan Agustus)

pencatatan harga dilakukan setiap minggu. Panen dengan sistem tebasan tidak termasuk dalam pencatatan ini.

Beras Kualitas Premium adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) maksimum 10 persen.

Beras Kualitas Medium adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 10,1-20 persen.

Beras Kualitas Rendah adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 20,1 - 25 persen.

Survei harga produsen beras di tingkat penggilingan dilakukan di 26 provinsi. Responden survei harga produsen beras di penggilingan adalah unit penggilingan di tingkat kecamatan yang memiliki kapasitas giling cukup besar dan dianggap representatif. Jumlah sampel survei tersebut sebanyak 478 penggilingan, dengan periode survei dilakukan setiap bulan.

9. A. Indeks Harga Produsen (IHP)

Indeks Harga Produsen (IHP) adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Selain itu dapat juga digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi (PDB/PDRB), distribusi barang, margin perdagangan, dan sebagainya.

Sesuai dengan *Manual Producer Price Index* (PPI), penghitungan IHP yang ideal dirancang menurut tingkatan produksi-*Stage of Production* (SoP), yakni *preliminary demand* (produk awal), *intermediate demand* (produk antara), dan *final demand* (produk akhir). Namun IHP (2010=100) yang disajikan BPS baru mencakup *final demand* (produk akhir).

IHP dihitung menggunakan formula *Laspeyres* yang dimodifikasi, dengan tahun dasar 2010=100. Hal ini berkaitan dengan sumber data yang digunakan untuk menyusun diagram timbang yaitu Tabel Input-Output 2010 Updating. Data IHP tersebut disajikan BPS secara triwulanan, dan baru sampai tingkat/level nasional dalam bentuk indeks gabungan, indeks sektor dan indeks subsektor.

Harga yang digunakan untuk menghitung IHP bersumber dari Survei Harga Produsen dan data sekunder. Pengumpulan harga dilakukan setiap bulan (tanggal 1-15). Pemilihan responden dilakukan secara *purposive*, sedangkan pemilihan komoditas menggunakan kriteria *cut off point*. Pengelompokan komoditas dalam IHP didasarkan pada Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI).

Mulai tahun 2014, pengumpulan data Survei Harga Produsen mengalami perluasan cakupan yaitu Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman. Pengumpulan data dilakukan setiap bulan, tanggal 1-15 di 18 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua). Pada triwulan I-2015, penyajian data IHP (2010=100) selain terdiri dari IHP Gabungan yang meliputi Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan, juga disajikan IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman.

B. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB adalah harga indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara/daerah, Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri ataupun yang diekspor dan komoditas yang berasal dari impor,

IHPB Konstruksi adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan yang dapat menggambarkan perkembangan statistik harga bahan bangunan/konstruksi dapat digunakan sebagai dasar untuk penghitungan eskalasi nilai kontrak sesuai dengan Keppres No,8 Tahun 2003, dan telah direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No,105/PMK,06/2005 tanggal 9 November 2005, serta didukung oleh Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No,11/SE/M/2005 tanggal 16 Desember 2005, Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IHPB Konstruksi diambil dari data *Bill of Quantity* (BoQ) kegiatan konstruksi,

Penghitungan IHPB tahun dasar 2010=100 mencakup 317, sedangkan perdagangan internasional masing-masing mencakup 93 kelompok Harmonized System (HS) untuk IHPB ekspor maupun impor, IHPB disajikan dalam 3 sektor yakni: Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Industri, Data harga yang digunakan dalam penghitungan IHPB dikumpulkan dari 34 provinsi di Indonesia setiap bulannya, Formula yang digunakan untuk menghitung IHPB adalah formula Modified Laspeyres, Penimbang (*weight*) yang digunakan dalam penghitungan IHPB adalah nilai barang yang dipasarkan oleh pedagang grosir untuk setiap komoditas terpilih yang diolah dari Tabel Input-Output 2010 Updating,

10. Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang datanya diperoleh dari Survei Tendensi Bisnis (STB) yang dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Bank Indonesia, Survei ini dilakukan setiap triwulan di beberapa kota besar terpilih di seluruh provinsi di Indonesia, Jumlah sampel STB sebanyak 2,400 perusahaan besar dan sedang, dengan responden pimpinan perusahaan,

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan BPS melalui Survei Tendensi Konsumen (STK), Sebelum triwulan I-2011, BPS hanya melaksanakan STK di wilayah Jabodetabek, tetapi sejak triwulan I-2011 pelaksanaan STK diperluas di seluruh provinsi, Jumlah sampel pada triwulan I-2012 sebanyak 14,232 rumah tangga,

ITB dan ITK dihitung dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa variabel, Tujuan penghitungan ITB dan ITK adalah memberikan informasi dini tentang perkembangan perekonomian baik dari sisi pengusaha maupun sisi konsumen serta perkiraan kondisi bisnis dan kondisi konsumen triwulan mendatang,

11. Produksi Tanaman Pangan

Angka produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas (rata-rata hasil per hektar).

Angka Sementara (ASEM) 2015, diperoleh dari hasil perkalian antara realisasi luas panen dan produktivitas pada periode Januari-Desember 2015 tetapi masih belum final karena masih menunggu beberapa laporan yang belum masuk.

Data realisasi luas panen diperoleh dari laporan bulanan Mantri Pertanian/Kepala Cabang Dinas Kecamatan (KCD) secara lengkap dari seluruh kecamatan di Indonesia. Data realisasi produktivitas diperoleh dari hasil Survei Ubinan yang dilakukan setiap *subround* (caturwulan/empat bulanan) oleh BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian setempat.

Penghitungan produksi ASEM 2015 dilakukan menurut *subround* sebagai berikut:

1. **Produksi *subround* 1** (Januari–April) merupakan hasil perkalian antara realisasi luas panen *subround* 1 dengan realisasi produktivitas *subround* 1.
2. **Produksi *subround* 2** (Mei–Agustus) merupakan hasil perkalian antara angka realisasi luas panen *subround* 2 dengan angka realisasi produktivitas *subround* 2.

3. **Produksi *subround 3*** (September–Desember) merupakan hasil perkalian antara realisasi luas panen *subround 3* dengan realisasi produktivitas *subround 3*.
4. **Produksi Januari–Desember** merupakan penjumlahan produksi *subround 1*, *subround 2*, dan *subround 3*.
5. **Luas panen Januari–Desember** merupakan penjumlahan luas panen *subround 1*, *subround 2*, dan *subround 3*.
6. **Produktivitas Januari–Desember** adalah hasil bagi antara produksi Januari–Desember dengan luas panen Januari–Desember.

12. Industri

Industri yang dimaksudkan adalah industri manufaktur (*manufacturing industry*) dengan cakupan perusahaan industri berskala besar, sedang, kecil, dan mikro, Perusahaan industri berskala besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, perusahaan industri berskala sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang, perusahaan industri berskala kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 orang, sedangkan perusahaan industri berskala mikro adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang, Indeks produksi industri besar dan sedang merupakan hasil pengolahan data hasil dari Sampel Survei Industri Besar dan Sedang (IBS) yang dilakukan secara bulanan, dengan sampling unit perusahaan industri berskala besar dan sedang, Banyaknya perusahaan IBS yang ditetapkan sebagai sampel adalah 1.703 perusahaan, Metode penghitungan indeks produksi bulanan menggunakan “Metode Divisia”, Indeks produksi industri mikro dan kecil merupakan hasil pengolahan data hasil dari Sampel Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) yang dilakukan secara triwulanan, dengan sampling unit perusahaan industri berskala mikro dan kecil, Banyaknya perusahaan IMK yang ditetapkan sebagai sampel adalah 24.000 perusahaan, Metode penghitungan indeks produksi IMK triwulanan menggunakan “Metode Paasche yang dimodifikasi”, Semua Indeks disajikan pada level 2-digit KBLI 2009 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009), Indeks produksi IBS dan IMK digunakan sebagai dasar penghitungan tingkat pertumbuhan produksi IBS dan IMK, yang disajikan dalam BRS Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur triwulanan,

13. Pariwisata

Data pariwisata mancanegara (wisman) diperoleh setiap bulan dari laporan Ditjen Imigrasi, yang meliputi seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia.

Wisman yang masuk dirinci menurut WNI (berdasarkan jenis paspor) dan WNA (berdasarkan jenis visa), termasuk di dalamnya *Crew* WNA, baik laut maupun udara. Untuk data karakteristik wisman yang lebih detil diperoleh dari hasil pengolahan kartu kedatangan dan keberangkatan (*arrival/departure card*). Namun pada tahun 2015 penghitungan Jumlah kunjungan wisman dilengkapi dengan data lalu lintas WNA yang terdiri dari:

- a. Kunjungan minimal WNA melalui pos lintas batas (PLB) darat
- b. Kunjungan WNA lainnya dan WNA berada di Indonesia kurang dari satu tahun
 - Tidak bekerja (wisata lanjut usia mancanegara, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dakwah/rohaniawan, berobat, mengadakan penelitian, dan lain-lain)
 - Bekerja (bidang konstruksi, konsultan, instruktur, dan lain-lain)

Data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel diperoleh dari hasil Survei Hotel yang dilakukan setiap bulan terhadap seluruh hotel bintang serta sebagian (sampel) hotel non bintang (hotel melati) di seluruh Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah kamar tersedia, jumlah kamar terpakai, jumlah tamu yang datang (menginap) maupun jumlah tamu yang keluar dari hotel setiap harinya.

Wisatawan mancanegara (wisman) ialah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun.

Pelancong (Excursionist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, di mana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

TPK Hotel adalah persentase banyaknya malam kamar yang dihuni terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia.

Rata-rata lamanya tamu menginap adalah hasil bagi antara banyaknya malam tempat tidur yang terpakai dengan banyaknya tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya.

14. Transportasi Nasional

Data transportasi diperoleh setiap bulan dari PT (Persero) Angkasa Pura I dan II, Kantor Bandara yang dikelola Ditjen Perhubungan Udara, PT (Persero) KAI (Kantor Pusat dan Divisi Jabodetabek), PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I s.d, IV, dan Kantor Pelabuhan yang dikelola Ditjen Perhubungan Laut, Data yang disajikan

mencakup jumlah penumpang berangkat dan jumlah barang dimuat dalam negeri, Khusus untuk transportasi udara disajikan jumlah penumpang berangkat baik domestik maupun internasional.

15. Kemiskinan

- a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
- b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- c. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- d. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
- e. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) bulan September 2015. Sebagai informasi tambahan, digunakan juga hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

16. Produksi Hortikultura

Pengumpulan data produksi dan luas panen hortikultura dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas (KCD)/Mantri Tani/Petugas Pengumpul Data Tingkat Kecamatan dengan metode perkiraan pengamatan lapang. Pengumpulan data menggunakan daftar register kecamatan dan daftar isian Statistik Pertanian Hortikultura (SPH).

Daftar nama kecamatan yang digunakan keadaan pada Semester I Tahun 2013 dengan jumlah kecamatan sebanyak 6.911 kecamatan. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isian dokumen SPH dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Hasilnya diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kota untuk diolah. Validasi data dilakukan dalam forum sinkronisasi hasil pencatatan dan pengolahan baik di tingkat kabupaten/kota, dan provinsi maupun tingkat nasional.

Bentuk hasil produksi cabai besar adalah buah segar dengan tangkai. Cabai besar terdiri dari cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau keriting.

Bentuk hasil produksi cabai rawit (cabai rawit merah dan cabai rawit hijau) adalah buah segar dengan tangkai.

Bentuk hasil produksi bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun.

17. Struktur Ongkos Usaha Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan 2014

Survei usaha rumah tangga pertanian menggunakan 2 jenis kerangka sampel yaitu kerangka sampel pemilihan blok sensus dan pemilihan rumah tangga. Untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel yang digunakan yaitu daftar blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan cakupan ST2013 yang distratifikasi menurut jenis komoditas utama yang diurutkan menurut strata.

Blok sensus yang memenuhi syarat (*eligible*) adalah blok sensus yang memiliki jumlah *eligible* rumah tangga sebanyak 10 atau lebih. Sedangkan, kerangka sampel untuk pemilihan sampel rumah tangga, yaitu daftar nama kepala rumah tangga usaha tanaman pangan hasil pemutakhiran rumah tangga di setiap blok sensus terpilih yang diurutkan menurut komoditas utama dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, budidaya ikan dan penangkapan ikan, serta tanaman kehutanan siap tebang.

Komoditas yang dicakup dalam survei ini adalah komoditas yang menjadi prioritas pembangunan pertanian dan memiliki batas minimal usaha yang ditentukan kementerian terkait.

Batas Minimal Usaha dan Jumlah Sampel

Subsektor Pertanian	Komoditas	Batas Minimal Usaha	Jumlah Sampel		
			Musim Kemarau	Musim Hujan	Jumlah
Tanaman Pangan	Padi Sawah	1.700 m ²	55.964	61.291	117.255
	Padi Ladang	1.700 m ²	2.448	3.949	6.397
	Jagung	1.500 m ²			67.100
	Kedelai	2.000 m ²			9.382
Tanaman Hortikultura	Cabai Merah	200 m ²	13.542	6.090	19.632
	Cabai Rawit	200 m ²	24.067	10.265	34.332
	Bawang Merah	140 m ²	6.604	2.993	9.597
	Jeruk	25 pohon			7.300
Tanaman Perkebunan	Kelapa Sawit	15 pohon			27.726
	Karet	250 pohon			46.569
	Tebu	650 m ²			8.831
Peternakan	Sapi Perah				1.420
	Sapi Potong				59.537
	Ayam Ras Pedaging				897
	Ayam Ras Petelur				568
Budidaya Perikanan	Rumput Laut				8.011
	Bandeng				9.444
	Udang Windu				3.550
Penangkapan Ikan	Kapal Motor				6.733
	Perahu Motor Tempel				22.354
Budidaya Kehutanan	Jati				28.917
	Mahoni				9.880
	Sengon				26.203

Metode sampling yang digunakan adalah dua tahap. Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus, dipilih sejumlah blok sensus secara *probability proportional to size* dengan *size* jumlah rumah tangga usaha subsektor hasil pencacahan lengkap (ST2013-L). Tahap kedua, dari kerangka sampel rumah tangga dipilih sejumlah rumah tangga secara sistematis. Rumah tangga usaha pertanian terpilih diwawancarai oleh petugas yang telah dilatih.

Pengumpulan data biaya produksi berpedoman pada prinsip *opportunity cost*, yaitu dilakukan penilaian harga pasar untuk lahan milik sendiri, benih produksi sendiri, dan pekerja keluarga tidak dibayar.

Usaha pertanian adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual/ditukar atas risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga).

Rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga yang salah satu anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Untuk tanaman pangan, termasuk juga yang bertujuan untuk konsumsi sendiri atau tidak dijual.

Nilai Produksi:

- Tanaman pangan: adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumahtangga dari usaha per satu hektar komoditas tanaman pangan per musim tanam.
- Tanaman hortikultura: adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha satu hektar komoditas tanaman hortikultura per musim tanam untuk tanaman semusim (cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) dan usaha per 100 pohon tanaman menghasilkan selama setahun yang lalu untuk tanaman tahunan (jeruk).
- Tanaman perkebunan: adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha satu hektar komoditas tanaman perkebunan untuk tanaman semusim (tebu) dan tanaman tahunan (kelapa sawit dan karet) selama setahun yang lalu.
- Peternakan: adalah total nilai produksi yang bersumber dari penambahan bobot, produksi telur dan susu, produksi ikutan, dan jasa peternakan selama setahun dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha peternakan per ekor (sapi potong dan sapi perah) atau per 1.000 ekor (ayam ras petelur), atau per 5.000 ekor (ayam ras pedaging) yang cara pemeliharaan tenak dikandangkan.
- Budidaya ikan: adalah nilai produksi budidaya yang dihasilkan rumah tangga usaha budidaya ikan per siklus per satuan tertentu (rumput laut, bandeng dan udang windu dalam satuan hektar).
- Penangkapan ikan: adalah nilai dari produksi hasil tangkapan rumah tangga usaha penangkapan ikan dalam satu trip yang dihitung mulai dari berangkat melakukan penangkapan ikan sampai kembali ke tempat asal.
- Tanaman kehutanan: adalah nilai produksi (selisih nilai dari tanaman kehutanan pada saat pencacahan dengan nilai tanaman setahun yang lalu untuk tanaman yang sudah dipanen/ditebang dan atau tanaman siap panen/tebang) dan ongkos produksi untuk usaha budidaya tanaman kehutanan yang siap tebang dan atau ditebang selama setahun yang lalu per 100 pohon.

Ongkos/Biaya Produksi:

- Tanaman pangan: adalah total ongkos/biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk usaha satu hektar komoditas tanaman pangan per musim

tanam yang mencakup kegiatan produksi hingga kualitas standar (padi adalah gabah kering panen/GKP, jagung adalah pipilan kering, dan kedelai adalah biji kering) dan sudah memasukkan perkiraan sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, perkiraan sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, perkiraan upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan perkiraan bunga kredit modal sendiri/bebas bunga yang dihitung dengan cara imputasi sesuai harga pasar.

- Tanaman hortikultura: adalah rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk usaha satu hektar tanaman hortikultura per musim tanam untuk tanaman semusim (cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) dan per 100 pohon untuk tanaman tahunan yang menghasilkan (jeruk) pada periode pencacahan yang mencakup kegiatan produksi hingga kualitas standar (cabai merah dan cabai rawit adalah buah segar dengan tangkai, bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun, dan jeruk adalah buah segar) dan sudah memperkirakan/mengimputasi besarnya sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan bunga kredit model sendiri/bebas bunga.
- Tanaman perkebunan: adalah seluruh ongkos/biaya yang benar-benar telah digunakan (bukan jumlah yang dibeli/disimpan) selama setahun yang lalu untuk seluruh bidang tanaman untuk tanaman semusim dan pada seluruh pengeluaran tanaman perkebunan semusim yang panen. Benih, tanaman pelindung, pupuk, stimulan, dan pestisida yang bukan pembelian diperkirakan nilai sesuai harga setempat.
- Peternakan: adalah biaya yang benar-benar telah digunakan (bukan jumlah yang dibeli/disimpan) selama setahun yang lalu oleh rumah tangga yang cara pemeliharaan ternak dikandangan. Biaya tersebut adalah biaya yang benar-benar dibayarkan oleh peternak ditambah dengan imputasi dari biaya yang tidak dibayarkan oleh peternak seperti biaya pakan yang tidak dibeli, biaya pengurusan ternak oleh pekerja tidak dibayar (peternak atau pekerja keluarga).
- Budidaya ikan: adalah biaya yang meliputi biaya benih/bibit, pupuk dan obat-obatan, pakan dihitung baik yang berasal dari pembelian maupun bukan pembelian (diperkirakan nilainya), upah pekerja baik pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga (diperkirakan upahnya), dan biaya lainnya mencakup sewa lahan (termasuk perkiraan sewa lahan milik sendiri dan bebas sewa), alat/sarana usaha (termasuk perkiraan bebas sewa dan perbaikan kecil/pemeliharaan) dan lainnya

(bunga kredit/pinjaman, penyusutan barang modal, pajak tak langsung, pengangkutan, jasa perikanan, dan sebagainya).

- Penangkapan ikan: adalah biaya yang meliputi upah pekerja dihitung untuk pekerja dibayar maupun perkiraan upah untuk pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, bahan bakar minyak (bensin, solar, minyak tanah), oli/pelumas, garam/es, perbekalan baik yang berasal dari pembelian maupun perkiraan nilai dari bukan pembelian, biaya lainnya (sewa alat/sarana, penyusutan barang modal), dan lainnya (umpan, pajak tak langsung, jasa perikanan, wadah, dan sebagainya).
- Tanaman kehutanan: adalah seluruh ongkos/biaya yang dikeluarkan yang sudah termasuk perkiraan sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, perkiraan sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, perkiraan upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan perkiraan bunga kredit modal sendiri/bebas sewa selama setahun yang lalu per 100 pohon untuk tanaman yang sudah dipanen/ditebang dan atau tanaman siap panen/tebang (tanaman yang sudah cukup umur dan secara ekonomis sudah dapat dipanen/ditebang atau digunakan kayunya).

Periode tanam musim kemarau (MK) adalah rumah tangga yang menanam tanaman pada periode Februari–September 2013 dan atau Februari–Mei 2014.

Periode tanam musim hujan (MH) adalah rumah tangga yang menanam tanaman pada periode Oktober 2013–Januari 2014.

Produktivitas ayam ras petelur adalah jumlah butir telur yang dihasilkan dari 1.000 ekor ayam ras petelur produktif per hari.

Survei Kehutanan 2014

Metode sampling yang digunakan adalah metode sampling dua tahap terstratifikasi. Pada tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus (blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan cakupan ST2013 pada desa-desa yang terletak di kawasan hutan (yang di-*overlay* dengan peta kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan) dan diurutkan menurut strata), dipilih sejumlah blok sensus secara *probability proportional to size* dengan *size* jumlah rumah tangga hasil ST2013-L. Tahap kedua, dari kerangka sampel rumah tangga dipilih 10 rumah tangga secara sistematis. Jumlah sampel untuk Survei Kehutanan sebanyak 99.993 rumah tangga.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Rumah tangga di sekitar kawasan hutan adalah rumah tangga yang bermukim di desa yang berada di dalam dan di tepi kawasan hutan.

Perladangan berpindah adalah suatu kegiatan usaha tani tanaman semusim/pangan secara tradisional/pindah-pindah di dalam maupun di luar kawasan hutan tanpa memperhatikan aspek pelestarian sumber daya hutan, tanah, dan air.

Pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar adalah kegiatan memungut/mengambil hasil hutan dan juga menangkap satwa-satwa liar di hutan seperti: memungut kayu, getah, kulit kayu, buah-buahan, rumput, rotan, tumbuhan obat, gaharu, serta menangkap ayam hutan, babi hutan, rusa, dan sebagainya.

18. Pendataan Potensi Desa (Podes)

Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Sejak saat itu, Podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sepuluh tahun untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, ataupun Sensus Ekonomi. Dengan demikian, fakta penting terkait ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau perkembangannya secara berkala dan terus menerus.

Podes 2014 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (yaitu: desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait). Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki batas wilayah yang jelas, (2) memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya, dan (3) memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Salah satu tujuan podes adalah menyediakan data dasar bagi keperluan penentuan klasifikasi/tipologi wilayah, seperti perkotaan-perdesaan, wilayah tertinggal, wilayah pesisir dan sebagainya. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan klasifikasi wilayah desa berdasarkan tingkat kesulitan geografis. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, salah satu komponen yang digunakan untuk pengalokasian dana desa adalah IKG.

BPS telah menyusun IKG untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. IKG disusun melalui metode Analisis Faktor. IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai

skala 0–100 yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.

19. Nilai Tukar Eceran Rupiah

Nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain bervariasi. Nilai tukar mata uang untuk transaksi besar yang meliputi aktivitas ekspor, impor, *swap*, *derivative*, dan lain-lain, dipantau dan dilaporkan secara periodik oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, transaksi eceran penukaran mata uang melalui *money changer* (tempat penukaran mata uang) yang tersebar di seluruh Indonesia menggambarkan tingkat retail *spot rate* suatu mata uang.

BPS melaporkan informasi nilai tukar eceran rupiah secara periodik. Statistik yang dihasilkan dapat digunakan untuk melihat pengaruh nilai tukar transaksi besar terhadap nilai tukar transaksi eceran, perkembangan nilai tukar rupiah transaksi eceran, melengkapi informasi *real-time* yang beredar di internet, dan sebagainya.

Mata uang asing yang dimonitor mencakup empat jenis, yaitu dolar Amerika (USD), dolar Australia (AUD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR) dengan alasan merupakan mata uang yang hampir selalu diperdagangkan di 34 provinsi di Indonesia, sehingga dapat dimonitor transaksinya.

20. Perdagangan Komoditas Strategis 2015

Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2015 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup 186 kabupaten/kota terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 152 kabupaten/kota. Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan perdagangan menengah, besar, dan kecil baik sebagai distributor, subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, eksportir, importir, maupun pengecer. Komoditi yang dicakup dalam survei ini adalah sebanyak 5 komoditi, yaitu: beras, cabai merah, bawang merah, jagung pipilan, dan daging ayam ras. Produsen komoditi yang diteliti didekati melalui industri skala besar dan sedang. Kerangka sampel yang dibentuk ada dua, yaitu kerangka sampel pedagang dan kerangka sampel produsen. Banyaknya sampel perusahaan/usaha/pengusaha perdagangan menengah dan besar serta produsen secara keseluruhan sebanyak 3.500 perusahaan. Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditi utama yang diperdagangkan berdasarkan 5 komoditi terpilih. Untuk perusahaan yang bersumber dari SE06-UMB, seluruhnya diambil sebagai perusahaan sampel, sedangkan sisanya dipilih secara sistematis pada setiap komoditi. Jika jumlah perusahaan/usaha dalam kerangka sampel tidak mencukupi,

maka seluruh perusahaan/usaha akan dicacah. Sedangkan sampel industri pengolahan dipilih dari kerangka sampel industri pengolahan secara *systematic sampling*.

21. Indeks Perilaku Anti Korupsi

- a. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2015 adalah indikator komposit yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan oleh BPS. SPAK 2015 merupakan survei dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan pada bulan November 2015 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan jumlah sampel sebanyak 10.000 rumah tangga.
- b. Analisis mengenai perilaku anti korupsi dalam survei ini hanya untuk representasi level nasional.
- c. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama, yakni **persepsi atau penilaian** masyarakat terhadap kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai yang dipahami maupun sikap diri terhadap korupsi dan **pengalaman langsung** pada jenis layanan publik tertentu yang biasa diakses, menyangkut perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), nepotisme (*nepotism*).
- d. Variabel penyusun IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK 2015 menggunakan *explanatory factor analysis*.
- e. Responden adalah kepala rumah tangga atau pasangannya yang dipilih dengan acak (Tabel *Kish*) dan diwawancarai secara langsung (tatap muka).



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

ISSN 2087-930X



9 772087 930006